

**EVALUASI PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI PEMERINTAH
KOTA BATU MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA
PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT* INDONESIA (PEGI)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun oleh:
Ridho Fadhlurrahman
145150400111108



SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

PENGESAHAN

EVALUASI PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI PEMERINTAH KOTA BATU
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT*
INDONESIA (PEGI)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun Oleh :
Ridho Fadhlurrahman
NIM: 145150400111108

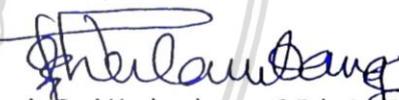
Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada
24 Juli 2018

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

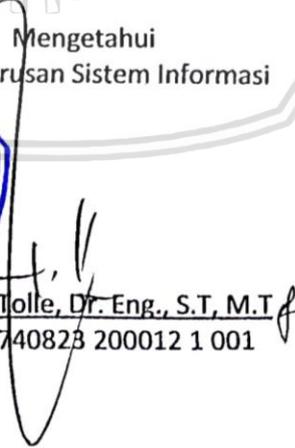
Dosen Pembimbing 2


Moch. Chandra Saputra, S.Kom., M.T., M.Eng.
NIK: 2016098601061001


Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M.Pd.
NIK: 2016098908021001

Mengetahui
Ketua Jurusan Sistem Informasi




Herman Tolle, Dr. Eng., S.T., M.T.
NIP: 19740823 200012 1 001



IDENTITAS TIM PENGUJI

Penguji 1

Nama : Yusi Tyroni Mursityo, S.Kom., M.AB.

NIP : 198002282006041001

Email : yusi_tyro@ub.ac.id

Penguji 2

Nama : Aditya Rachmadi, S.ST., M.TI

NIK : 2012018604211001

Email : rachmadi.aditya@ub.ac.id



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 3 Juli 2018



Ridho Fadhlurrahman
NIM: 145150400111108



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ridho Fadhlurrahman
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 18 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Datuak Mangkuto Ameh, Garegeh, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat
E-mail : frahman.ridho@gmail.com

Pendidikan

2002 – 2008 : SD Negeri 03 Pakan Kurai
2008 – 2011 : MTs Negeri 1 Kota Bukittinggi
2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Kota Bukittinggi
2014 – 2018 : Sistem Informasi Universitas Brawijaya

Organisasi

- Staff Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2015
- Wakil Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2016
- Ketua Biro Pusat Komunikasi dan Informasi Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan *E-Government* Di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)” yang disusun sebagai bagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta keluarga dan sahabat sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini ada banyak keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman penulis. Namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si, M.T, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
2. Bapak Herman Tolle, Dr.Eng., S.T, M.T selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
3. Bapak Suprpto, ST, MT selaku ketua Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, yang telah menyetujui penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi.
4. Bapak Mochamad Chandra Saputra, S.Kom., M.T., M.Eng. selaku pembimbing pertama dan Bapak Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M. Pd. selaku pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta dukungan dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Temmy Indrawan, Bapak Riski Yuniar, Bapak Cahyawisesa, Bapak Rudianto dan Ibu Sri Nurcahyani serta pegawai di Balaikota Among Tani Kota Batu yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, ayahanda Novri dan ibunda Yumiharlen beserta adik Fadhlurrahman Muharrik dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendo’akan, menasehati dan memberikan dukungan baik moril dan materil selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
7. Konco arek GEJO dan teman teman PUS-K serta teman sepermainan, Ahmad Muzakir Mahmud, Adi Supriyanto, Muhammad Hanif, Farhan Agastha Putra, Muhammad Ilmar Alamsyah yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan di setiap kesempatan.
8. Teman teman keluarga besar Sistem Informasi angkatan 2014, yang telah memotivasi dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai proses pembelajaran, tentunya skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Malang, 6 Juli 2018

Penulis,

frahman.ridho@gmail.com



ABSTRAK

Ridho Fadhlurrahman, Evaluasi Penerapan *E-Government* Di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI)

Dosen Pembimbing: Mochamad Chandra Saputra, S.Kom., M.T., M.Eng. dan Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M. Pd.

Pengembangan *e-government* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang terbuka, bersih dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah Kota Batu, sebagai bagian dari instansi pemerintah di Indonesia juga mulai menggunakan *e-government* dalam mendukung kinerja pemerintahannya. Namun, berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), selama 2 tahun berturut turut Kota Batu menempati peringkat terendah dari 38 kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Batu untuk memaksimalkan penerapan *e-government*.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan *e-government* di Pemerintah Kota Batu dengan melakukan studi kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dan Dinas Pertanian Kota Batu. Kerangka kerja yang digunakan untuk menilai penerapan *e-government* dalam penelitian ini adalah kerangka kerja Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI). Berdasarkan hasil penilaian, penerapan *e-government* di Dinas Kominfo berada pada kategori kurang, Bapelitbanda berada pada kategori kurang dan Dinas Pertanian berada pada kategori kurang. Dari hasil penilaian tersebut kemudian disusun rekomendasi perbaikan layanan *e-government* untuk mencapai kondisi pelaksanaan dengan kategori sangat baik berdasarkan kerangka kerja PeGI.

Kata kunci: *e-government*, PeGI, pemanfaatan TIK

ABSTRACT

Ridho Fadhlurrahman, Evaluation Of E-Government Application in Batu City Government Using the Indonesian E-Government Ranking Framework (PEGI).

Supervisor: Mochamad Chandra Saputra, S.Kom., M.Eng. and Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M. Pd.

The development of e-government is one of the government's efforts to create open, clean, and accountable bureaucracy by utilizing the use of information technology. Batu City Government, as part of government agencies in Indonesia also began to use e-government in supporting the performance of his government. However, based on the results of the Government Accountability System Performance Accountability (SAKIP), for 2 years Batu City was ranked the lowest of 38 cities in East Java Province. This encourages Batu City Government to maximize the implementation of e-government.

This research aims to assess the implementation of e-government in Batu City Government by doing a case study in three government divisions, which are Departement of Communications and Informatics, Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bapelitbangda), and Departement of Agricultural. The framework used in this research is The Indonesia E-Government Rangking Framework (PeGI). Based on the result of the analysis, it was found that the implementation of e-government in the Departement of Communications and Informatics is in less category, Bapelitbangda is in less category and Departement of Agricultural is in less category. From this result, the researcher then prepared recommendations for the improvement of e-government in order to achieve very good category based on PeGI framework.

Keywords: e-government, PeGI, ICT Utilization

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	19
1.1. Latar belakang.....	19
1.2. Rumusan masalah.....	20
1.3. Tujuan	21
1.4. Manfaat	21
1.5. Batasan masalah	21
1.6. Sistematika pembahasan	22
BAB 2 LANDASAN PUSTAKA	23
2.1 Kajian Pustaka.....	23
2.1.1. Penyusunan Strategi <i>E-government</i> Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Di Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	23
2.1.2. Strategi Pengembangan <i>E-Government</i> Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Studi Kasus Kementerian Pertanian RI	23
2.1.3. Uji Validitas Indikator Indikator Pemeringkatan <i>e-government</i> Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi dengan Analisis Faktor	24
2.2. <i>E-Government</i>	24
2.2.1. Definisi <i>E-government</i>	24
2.2.2. Model <i>E-government</i>	26
2.2.3. Kebijakan <i>E-government</i> Nasional	27
2.3. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	28
2.3.1. Tujuan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI).....	28

2.3.2. Dimensi Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI)	29
2.4. Profil Kota Batu	35
2.4.1. Demografi Kota Batu	35
2.4.2. Visi dan Misi Kota Batu	35
2.5. Subyek Penelitian	36
2.5.1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu	36
2.5.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu	37
2.5.3. Dinas Pertanian Kota Batu	39
2.6. Populasi dan Sampel Penelitian Kualitatif	41
BAB 3 METODOLOGI	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Studi Literatur dan Observasi	43
3.2.1. Analisis Kebutuhan	43
3.2.2. Subyek dan Obyek Penelitian	43
3.3. Pengumpulan Data	43
3.3.1. Observasi	43
3.3.2. Wawancara	43
3.3.3. Kuisiner	43
3.4. Sistem Penilaian Kerangka Kerja Pemingkatan <i>E-government</i> Indonesia (PeGI)	44
3.5 Analisis dan Pengolahan Data	48
3.5.1. Penilaian Penerapan <i>E-government</i> di SOPD Terkait	48
3.5.2. Pembuatan Rekomendasi	49
3.6. Kesimpulan	49
BAB 4 HASIL DAN ANALISIS DATA	50
4.1. Penilaian Dimensi Kebijakan	50
4.1.1. Sub Dimensi Proses Kebijakan	50
4.1.2. Sub Dimensi Visi dan Misi Berkaitan Dengan TIK	52
4.1.3. Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan	53
4.1.4. Sub Dimensi Pedoman	54
4.1.5. Sub Dimensi Peraturan	56
4.1.6. Sub Dimensi Keputusan Instansi	57

4.1.7. Sub Dimensi Skala Prioritas.....	58
4.1.8. Sub Dimensi Manajemen Risiko/Evaluasi TIK	60
4.1.9. Hasil Penilaian Dimensi Kebijakan	62
4.2. Penilaian Dimensi Kelembagaan.....	63
4.2.1. Sub Dimensi Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif	63
4.2.2. Sub Dimensi Tugas dan Fungsi	65
4.2.3. Sub Dimensi Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang Lengkap dan Terdokumentasi	66
4.2.4. Sub Dimensi Ketersediaan SDM dengan Jumlah dan Tingkat Kompetensi yang Sesuai	67
4.2.5. Sub Dimensi Pengembangan SDM TIK.....	69
4.2.6. Hasil Penilaian Dimensi Kelembagaan	71
4.3. Penilaian Dimensi Infrastruktur.....	72
4.3.1. Sub Dimensi <i>Data center</i>	72
4.3.2. Sub Dimensi Jaringan Data.....	74
4.3.3. Sub Dimensi Keamanan	75
4.3.4. Sub Dimensi <i>Disaster Recovery</i>	79
4.3.5. Sub Dimensi Pemeliharaan TIK	80
4.3.6. Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK.....	82
4.3.7. Hasil Penilaian Dimensi Infrastruktur.....	84
4.4. Penilaian Dimensi Aplikasi	85
4.4.1. Sub Dimensi Situs Wajib <i>Home Page</i>	85
4.4.2. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan Publik) ...	87
4.4.3. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum).....	88
4.4.4. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi)	90
4.4.5. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 (Manajemen Pembangunan).....	91
4.4.6. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 (Manajemen Keuangan)	92
4.4.7. Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 (Manajemen Kepegawaian)	93
4.4.8. Sub Dimensi Dokumentasi	95
4.4.9. Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK.....	96

4.4.10. Sub Dimensi Interoperabilitas.....	97
4.4.11. Hasil Penilaian Dimensi Aplikasi.....	99
4.5. Penilaian Dimensi Perencanaan	100
4.5.1. Sub Dimensi Pengorganisasian/Fungsi	100
4.5.2. Sub Dimensi Sistem Perencanaan TIK.....	102
4.5.3. Sub Dimensi Dokumentasi <i>Master Plan</i>	103
4.5.4. Sub Dimensi Implementasi <i>Master Plan</i>	104
4.5.5. Sub Dimensi Pembiayaan.....	106
4.5.6. Hasil Penilaian Dimensi Perencanaan	107
4.6. Hasil Penilaian Seluruh Dimensi.....	108
BAB 5 PEMBAHASAN.....	110
5.1. Dimensi Kebijakan	110
5.2. Dimensi Kelembagaan	113
5.3. Dimensi Infrastruktur.....	116
5.4. Dimensi Aplikasi.....	118
5.5. Dimensi Perencanaan.....	120
BAB 6 PENUTUP	123
6.1. Kesimpulan	123
6.2. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	129



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Sub Dimensi Kerangka Kerja PeGI	47
Tabel 3.2 Jumlah Pertanyaan di Kuisisioner Kerangka Kerja PeGI	44
Tabel 3.3 Kelompok nilai dalam PeGI	44
Tabel 4.1 Penilaian Sub Dimensi Proses Kebijakan di Dinas Kominfo	50
Tabel 4.2 Penilaian Sub Dimensi Proses Kebijakan di Bapelitbangda	51
Tabel 4.3 Penilaian Sub Dimensi Proses Kebijakan di Dinas Pertanian	51
Tabel 4.4 Penilaian Sub Dimensi Visi dan Misi Berkaitan dengan di TIK Dinas Kominfo	52
Tabel 4.5 Penilaian sub dimensi visi dan misi berkaitan dengan TIK di Bapelitbangda	52
Tabel 4.6 Penilaian Sub Dimensi Visi dan Misi Berkaitan dengan TIK di Dinas Pertanian	53
Tabel 4.7 Penilaian Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan di Dinas Kominfo	53
Tabel 4.8 Penilaian Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan di Bapelitbangda	54
Tabel 4.9 Penilaian Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan di Dinas Pertanian	54
Tabel 4.10 Penilaian Sub Dimensi Pedoman di Dinas Kominfo	55
Tabel 4.11 Penilaian Sub Dimensi Pedoman di Bapelitbangda	55
Tabel 4.12 Penilaian Sub Dimensi Pedoman di Dinas Pertanian	55
Tabel 4.13 Penilaian Sub Dimensi Peraturan di Dinas Kominfo	56
Tabel 4.14 Penilaian Sub Dimensi Peraturan di Bapelitbangda.....	56
Tabel 4.15 Penilaian Sub Dimensi Peraturan di Dinas Pertanian	57
Tabel 4.16 Penilaian Sub Dimensi Keputusan Instansi di Dinas Kominfo	57
Tabel 4.17 Penilaian Sub Dimensi Keputusan Instansi di Bapelitbangda	58
Tabel 4.18 Penilaian Sub Dimensi Keputusan Instansi di Dinas Pertanian	58
Tabel 4.19 Penilaian Sub Dimensi Skala Prioritas di Dinas Kominfo.....	59
Tabel 4.20 Penilaian Sub Dimensi Skala Prioritas di Bapelitbangda	59
Tabel 4.21 Penilaian Sub Dimensi Skala Prioritas di Dinas Pertanian.....	60
Tabel 4.22 Penilaian Sub Dimensi manajemen risiko/evaluasi TIK di Dinas Kominfo	60

Tabel 4.23 Penilaian Sub Dimensi manajemen resiko/evaluasi TIK di Bapelitbangda.....	61
Tabel 4.24 Penilaian Sub Dimensi manajemen resiko/evaluasi TIK di Dinas Pertanian	61
Tabel 4.25 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Kebijakan	62
Tabel 4.26 Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif Dinas Kominfo	63
Tabel 4.27 Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif di Bapelitbangda.....	64
Tabel 4.28 Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif di Dinas Pertanian	64
Tabel 4.29 Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi di Dinas Kominfo.....	65
Tabel 4.30 Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi Di Bapelitbangda.....	65
Tabel 4.31 Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi di Dinas Pertanian.....	66
Tabel 4.32 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Kominfo	66
Tabel 4.33 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Bapelitbangda	67
Tabel 4.34 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Pertanian	67
Tabel 4.35 Penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai di Dinas Kominfo	68
Tabel 4.36 Penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai di Bapelitbangda	68
Tabel 4.37 Penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai di Dinas Pertanian.....	69
Tabel 4.38 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Kominfo	69
Tabel 4.39 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Bapelitbangda	70
Tabel 4.40 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Pertanian	70
Tabel 4.41 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Kelembagaan	71
Tabel 4.42 Penilaian Sub Dimensi <i>Data center</i> di Dinas Kominfo.....	72
Tabel 4.43 Penilaian Sub Dimensi <i>Data center</i> di Bapelitbangda.....	73
Tabel 4.44 Penilaian Sub Dimensi <i>Data center</i> di Dinas Pertanian.....	73



Tabel 4.45 Penilaian Sub Dimensi Jaringan Data di Dinas Kominfo.....	74
Tabel 4.46 Penilaian Sub Dimensi Jaringan Data di Bapelitbangda.....	74
Tabel 4.47 Penilaian Sub Dimensi Jaringan Data di Dinas Pertanian.....	75
Tabel 4.48 Penilaian Sub Dimensi Keamanan di Dinas Kominfo	76
Tabel 4.49 Penilaian Sub Dimensi Keamanan di Bapelitbangda.....	76
Tabel 4.50 Penilaian Sub Dimensi Keamanan di Dinas Pertanian	77
Tabel 4.51 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Dinas Kominfo	77
Tabel 4.52 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Bapelitbangda.....	78
Tabel 4.53 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Dinas Pertanian	78
Tabel 4.54 Penilaian Sub Dimensi <i>disaster recovery</i> di Dinas Kominfo	79
Tabel 4.55 Penilaian Sub Dimensi <i>disaster recovery</i> di Bapelitbangda	80
Tabel 4.56 Penilaian Sub Dimensi <i>disaster recovery</i> di Dinas Pertanian	80
Tabel 4.57 Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK di Dinas Kominfo	81
Tabel 4.58 Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK di Bapelitbangda	81
Tabel 4.59 Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK di Dinas Pertanian	82
Tabel 4.60 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Dinas Kominfo .	82
Tabel 4.61 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Bapelitbangda .	83
Tabel 4.62 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Dinas Pertanian	83
Tabel 4.63 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Infrastruktur	85
Tabel 4.64 Penilaian Sub Dimensi Situs Web <i>Home Page</i> di Dinas Kominfo.....	86
Tabel 4.65 Penilaian Sub Dimensi Situs Web <i>Home Page</i> di Bapelitbangda.....	86
Tabel 4.66 enilaian Sub Dimensi Situs Web <i>Home Page</i> di Dinas Pertanian.....	87
Tabel 4.67 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 di Dinas Kominfo	87
Tabel 4.68 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 di Bapelitbangda.....	88
Tabel 4.69 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 di Dinas Pertanian	88
Tabel 4.70 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 di Dinas Kominfo	89
Tabel 4.71 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 di Bapelitbangda.....	89

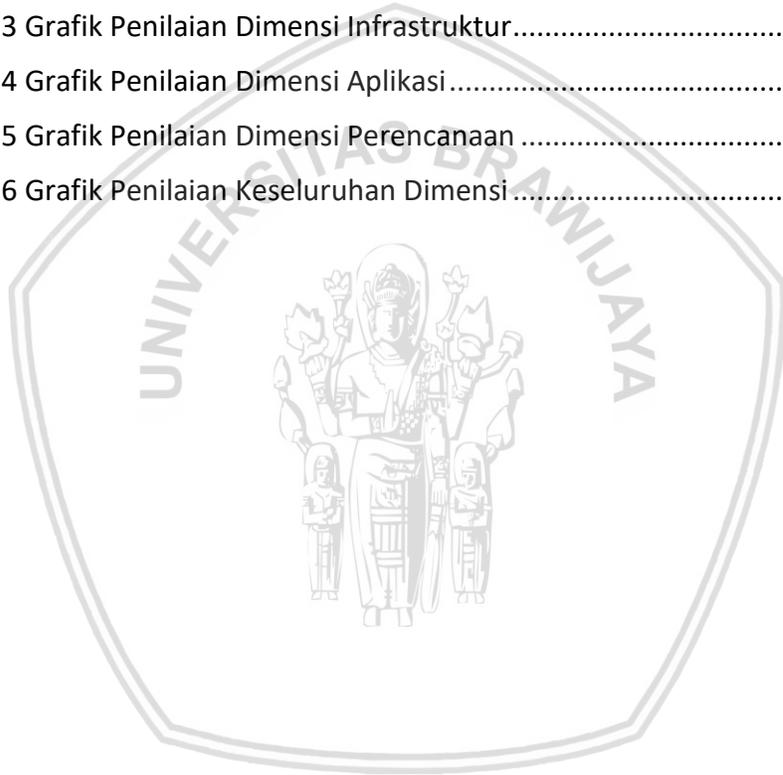
Tabel 4.72 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 di Dinas Pertanian	89
Tabel 4.73 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 di Dinas Kominfo	90
Tabel 4.74 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 di Bapelitbangda.....	90
Tabel 4.75 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 di Dinas Pertanian	91
Tabel 4.76 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 di Dinas Kominfo	91
Tabel 4.77 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 di Bapelitbangda.....	91
Tabel 4.78 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 di Dinas Pertanian	92
Tabel 4.79 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 di Dinas Kominfo	92
Tabel 4.80 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 di Dinas Pertanian	93
Tabel 4.81 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 di Dinas Pertanian	93
Tabel 4.82 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 di Dinas Kominfo	93
Tabel 4.83 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 di Bapelitbangda.....	94
Tabel.4 84 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 di Dinas Pertanian	94
Tabel 4.85 Penilaian Sub Dimensi Dokumentasi di Dinas Kominfo	95
Tabel 4.86 Penilaian Sub Dimensi Dokumentasi di Bapelitbangda	95
Tabel 4.87 Penilaian Sub Dimensi Dokumentasi di Dinas Kominfo	96
Tabel 4.88 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK di Dinas Kominfo....	96
Tabel 4.89 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK di Bapelitbangda	96
Tabel 4.90 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK di Dinas Pertanian..	97
Tabel 4.91 Penilaian Sub Dimensi Interoperabilitas di Dinas Kominfo.....	97
Tabel 4.92 Penilaian Sub Dimensi Interoperabilitas di Bapelitbangda	98
Tabel 4.93 Penilaian Sub Dimensi Interoperabilitas di Dinas Pertanian.....	98
Tabel 4.94 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Aplikasi	99

Tabel 4.95 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Dinas Kominfo...	100
Tabel 4.96 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Bapelitbangda...	101
Tabel 4.97 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Dinas Pertanian.	101
Tabel 4.98 Penilaian sub dimensi sistem perencanaan TIK di Dinas Kominfo....	102
Tabel 4.99 Penilaian sub dimensi sistem perencanaan TIK di Bapelitbangda....	102
Tabel 4.100 Penilaian sub dimensi sistem perencanaan TIK di Dinas Pertanian	103
Tabel 4.101 Penilaian sub dimensi dokumentasi <i>master plan</i> di Dinas Kominfo	103
Tabel 4.102 Penilaian sub dimensi dokumentasi <i>master plan</i> di Bapelitbangda	104
Tabel 4.103 Penilaian sub dimensi dokumentasi <i>master plan</i> di Dinas Pertanian	104
Tabel 4.104 Penilaian sub dimensi implementasi <i>master plan</i> di Dinas Kominfo	104
Tabel 4.105 Penilaian sub dimensi implementasi <i>master plan</i> di Bapelitbangda.....	105
Tabel 4.106 Penilaian sub dimensi implementasi <i>master plan</i> di Dinas Pertanian	105
Tabel 4.107 Penilaian sub dimensi pembiayaan di Dinas Kominfo	106
Tabel 4.108 Penilaian sub dimensi pembiayaan di Bapelitbangda	106
Tabel 4.109 Penilaian sub dimensi pembiayaan di Dinas Pertanian	107
Tabel 4.110 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Perencanaan.....	108
Tabel 4.111 Penilaian seluruh dimensi di seluruh SOPD yang diteliti	109
Tabel 5.1 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Kebijakan	112
Tabel 5.2 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Kelembagaan	115
Tabel 5.3 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Infrastruktur	117
Tabel 5.4 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Aplikasi	119
Tabel 5.5 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Perencanaan.....	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Batu.....	37
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bapelitbangda Kota Batu.....	39
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Batu	40
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	42
Gambar 4.1 Grafik Penilaian Dimensi Kebijakan.....	62
Gambar 4.2 Grafik Penilaian Dimensi Kelembagaan	71
Gambar 4.3 Grafik Penilaian Dimensi Infrastruktur.....	84
Gambar 4.4 Grafik Penilaian Dimensi Aplikasi	99
Gambar 4.5 Grafik Penilaian Dimensi Perencanaan	107
Gambar 4.6 Grafik Penilaian Keseluruhan Dimensi	108



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A PEDOMAN PENILAIAN PeGI.....	129
LAMPIRAN B NILAI KESELURUHAN SUB DIMENSI PeGI	138
LAMPIRAN C HASIL PENGISIAN KUISIONER DINAS KOMINFO	141
LAMPIRAN D HASIL WAWANCARA DINAS KOMINFO	148
LAMPIRAN E HASIL PENGISIAN KUISIONER BAPELITBANGDA	150
LAMPIRAN F HASIL WAWANCARA BAPELITBANGDA.....	157
LAMPIRAN G HASIL WAWANCARA DINAS PERTANIAN	158
LAMPIRAN H DOKUMEN PENDUKUNG	163



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Kota Batu, sebagai bagian dari instansi pemerintah Indonesia mulai melaksanakan perbaikan terhadap kinerja pemerintahannya sejalan dengan program reformasi birokrasi pemerintah, yaitu menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Namun, pada hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), selama 2 tahun (2016-2017) berturut turut Kota Batu menempati peringkat terakhir dari 38 kota di Provinsi Jawa Timur, hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batu belum berjalan maksimal akibat koordinasi antara elemen pemerintah yang lemah, ketidak sesuaian agenda dinas daerah dengan RPJMD yang telah disusun dan penataan anggaran pemerintah yang tidak detail. Hal ini mendorong pemerintah Kota Batu untuk segera memperbaiki proses kerja pemerintahannya, salah satunya dengan memaksimalkan penerapan *e-government* di setiap SOPD di Kota Batu. Dengan harapan, penerapan *e-government* dapat memperbaiki kinerja pemerintah menjadi efektif, efisien dan produktif secara menyeluruh.

E-government sendiri merupakan implementasi serangkaian proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga memungkinkan kelancaran informasi lintas program dan sektor pemerintah, dengan tujuan agar pemerintah menjadi lebih tanggap dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat (Rubel, 2013). Kesuksesan penerapan *e-government* membutuhkan perubahan yang fundamental mulai dari cara kerja pemerintahan sampai bagaimana pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Interaksi dalam *e-government* dapat berupa layanan antar lembaga pemerintah (*Government to Government*), layanan antara lembaga pemerintah dan masyarakat (*Government to Citizen*) dan layanan lembaga pemerintah dengan bisnis (*Government to Business*).

Pengembangan *e-government* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang terbuka, bersih dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Inisiatif pelaksanaan *e-government* oleh pemerintah dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah harus menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Komitmen pengembangan *e-government* di Indonesia kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, dimana dalam instruksi ini presiden mendorong agar setiap instansi pemerintah melakukan perumusan strategi *e-government* di lingkungan pemerintahannya masing masing.

Dalam program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, salah satu indikator keberhasilan dalam reformasi birokrasi adalah tersedianya *e-government* pada masing masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang bertujuan agar terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e-government* dalam lingkup Struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) di Kota Batu, diperlukan penilaian dan analisis bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah dilakukan. Dalam penelitian ini, penilaian dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas kominfo) Kota Batu, Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu dan Dinas Pertanian Kota Batu. Dinas Kominfo dipilih karena dinas ini sudah seharusnya menjadi *leader sector* dalam penerapan teknologi informasi di Kota Batu. Sedangkan Dinas Pertanian dipilih karena sesuai dengan visi dan misi Kota Batu untuk memajukan sektor pertanian sebagai sentra pariwisata internasional, tentunya *e-government* yang baik akan menunjang pencapaian visi tersebut. Sedangkan Bapelitbangda dipilih karena Badan ini bertugas dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan penerapan *e-government* di Kota Batu.

Penilaian dilakukan menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMKOMINFO). Kerangka kerja ini dipilih karena PeGI merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan *e-government* di instansi-instansi pemerintah Indonesia mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah. PeGI sendiri disusun agar dapat menjadi acuan pengembangan *e-government*, dengan harapan hasil penilaian PeGI dapat digunakan untuk melihat peta kondisi penerapan *e-government* di lingkungan pemerintah secara nasional.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi kebijakan di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu?
2. Bagaimana hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi kelembagaan di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu?
3. Bagaimana hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi infrastruktur di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu?
4. Bagaimana hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi aplikasi di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu?

5. Bagaimana hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi perencanaan di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu?
6. Bagaimana rekomendasi perbaikan untuk setiap penilaian dimensi dalam PeGI di setiap SOPD?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi kebijakan di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu.
2. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi kelembagaan di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu.
3. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi infrastruktur di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu.
4. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi aplikasi di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu.
5. Mengetahui hasil penilaian penerapan *e-government* menggunakan kerangka kerja PeGI pada dimensi perencanaan di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu.
6. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan kerangka kerja PeGI.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Batu terutama Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e-government* telah dilakukan. Hasil penilaian dan analisa tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan tertentu untuk memperbaiki atau mempertahankan strategi penerapan *e-government* yang telah diterapkan.

1.5 Batasan masalah

1. Penerapan *e-government* di lingkungan Dinas Kominfo Kota Batu, Dinas Pertanian Kota Batu dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.
2. Penilaian menggunakan kerangka kerja Peningkatan *e-government* Indonesia (PeGI) dengan 5 dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, perencanaan dan aplikasi.

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur, kuisioner, wawancara dan observasi.
4. Hasil penelirian berupa rekomendasi akademis yang penerapannya diserahkan kembali ke Dinas Kominfo Kota Batu, Dinas Pertanian Kota Batu dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.

1.6 Sistematika pembahasan

Penelitian ini terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu pendahuluan, landasan kepastakaan, metodologi penelitian, hasil, pembahasan dan penutup.

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah dan manfaat penelitian Evaluasi Penerapan *E-government* di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGI).

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

Berisi tinjauan pustaka dari buku, jurnal, artikel, website, peraturan, dan penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Berisi langkah langkah pengerjaan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL

Memaparkan hasil dan analisis yang didapatkan dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI).

BAB 5 PEMBAHASAN

Berisi penyusunan rekomendasi perbaikan penerapan *e-government* berdasarkan kerangka kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI).

BAB 6 PENUTUP

Berisi rangkuman keseluruhan penelitian dari awal sampai akhir, beserta saran untuk pengembangan penelitian kedepan.

BAB 2 LANDASAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam sub bab ini, akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penilaian penerapan *e-government*. Membahas penelitian terdahulu dapat membentuk kerangka berfikir yang sistematis, sehingga dapat menjadi tolak ukur dan acuan dalam melakukan penelitian.

2.1.1 Penyusunan Strategi *E-government* Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan *E-government* Indonesia (Pegi) Di Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

Judul	Penulis	Metode	Hasil/Simpulan
Penyusunan Strategi <i>E-government</i> Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan <i>E-government</i> Indonesia (Pegi) Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2013)	Fahmi Alusi dan Dana Indra Sensusue	Kualitatif Deskriptif	Fahmi Alusi dan Dana Indra Sensusue melakukan penelitian untuk menyusun strategi penerapan <i>e-government</i> di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sebelum strategi disusun, terlebih dahulu peneliti melakukan penilaian sejauh mana <i>e-government</i> telah diterapkan di LAPAN, menggunakan kerangka kerja PeGI. Dari hasil penilaian, didapat nilai penerapan <i>e-government</i> di LAPAN adalah 1,88 yang berarti "kurang". Berdasarkan hasil penilaian tersebut, disusun strategi implementasi <i>e-government</i> di LAPAN untuk bisa diterapkan selanjutnya. Strategi ini disusun berdasarkan 5 dimensi yang terdapat di kerangka kerja PeGI.

2.1.2 Strategi Pengembangan *E-Government* Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) Studi Kasus Kementerian Pertanian RI

Judul	Penulis	Metode	Hasil/Simpulan
Strategi Pengembangan <i>E-Government</i> Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan	Armilawaty Razak	Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini, Armilawaty Razak melakukan penelitian evaluasi penerapan <i>e-government</i> pada Kementerian Pertanian RI menggunakan kerangka kerja PeGI. Hasil dari penilaian didapatkan

<p><i>E-Government</i> Indonesia (PeGI) Studi Kasus Kementerian Pertanian RI (2013)</p>			<p>bahwa nilai penerapan <i>e-government</i> di Kementerian Pertanian RI adalah 2,63 yang berarti “Baik”. Dari penilaian tersebut, menyusun strategi penerapan <i>e-government</i> ke depan untuk setiap subdimensi di setiap dimensi PeGI.</p>
---	--	--	---

2.1.3 Uji Validitas Indikator Indikator Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi dengan Analisis Faktor

Judul	Penulis	Metode	Hasil/Simpulan
<p>Uji Validitas Indikator Indikator Pemeringkatan <i>e-government</i> Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi dengan Analisis Faktor (2016)</p>	<p>Dewi Hernikawati dan Dana Indra Sensue</p>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p>	<p>Kerangka kerja Pemeringkatan <i>e-government</i> di Indonesia telah digunakan oleh KEMKOINFO untuk melakukan pemeringkatan <i>e-government</i> sejak tahun 2007. Dewi Hernikawati dan Dana Indra Sensue menguji apakah indikator indikator didalam PeGI masih valid digunakan saat ini. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa seluruh indikator didalam setiap dimensi PeGI masih dapat digunakan untuk melakukan penilaian <i>e-government</i>, kecuali indikator aplikasi manajemen keuangan yang terdapat didalam dimensi aplikasi yang dianggap tidak valid.</p>

2.2 *E-Government*

2.2.1 Definisi *E-government*

Konsep *e-government* awal kali muncul pada tahun 1993 di Amerika. Sejak saat itu, baik negara maju dan negara berkembang berupaya menerapkan *e-government* dalam lingkungan pemerintahannya. *E-government* memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan internet untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, bisnis dan antar pemerintahan itu sendiri secara penuh selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Zafiroopoulos, 2012).

Menurut Bruno Lanvin, dalam bukunya berjudul *The E-government Handbook for Developing Country*, *e-government* merupakan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam memperbaiki kinerja pemerintahan menjadi lebih mudah diakses, efektif dan bertanggung jawab, termasuk untuk menyediakan akses yang lebih baik untuk informasi pemerintahan, melibatkan



partisipasi penduduk sipil melalui interaksi dengan pemangku jabatan di pemerintah, membuat pemerintah lebih bertanggung jawab dengan membuat kebijakan yang lebih transparan dan mengurangi peluang korupsi serta mengembangkan potensi wilayah pedesaan dan masyarakat tradisional yang kurang terlayani.

Sedangkan dalam Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yaitu pertama, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronis dan kedua pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

E-government menggunakan teknologi informasi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan, menyediakan layanan pemerintah yang lebih mudah diakses, menciptakan lingkungan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Layanan teknologi informasi seperti internet, *mobile communication*, *wireless devices* dan kombinasi teknologi lainnya digunakan untuk menerapkan solusi *e-government*. Tujuan utama dari penerapan *e-government* adalah menyediakan akses yang mudah terhadap informasi dan layanan pemerintah menggunakan teknologi. Kesuksesan penerapan *e-government* dalam sebuah instansi dapat dilihat dari 2 kriteria, pertama ketersediaan layanan dalam 24 jam sehari 7 hari seminggu, layanan *e-government* harus tersedia setiap waktu sehingga pengguna bisa berinteraksi kapanpun dengan pemerintah. Kedua, aksesibilitas, layanan *e-government* sangat bergantung pada kemudahan akses layanannya. Jika layanan tertentu tidak tersedia bagi penggunaannya, maka dapat dikatakan penerapan *e-government* tidak akan berhasil (Alhomod dkk, 2012).

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *e-government* merupakan bentuk penerapan teknologi dan informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan dengan tujuan memberikan pelayanan yang mudah diakses bagi masyarakat. Penerapan *e-government* dapat meningkatkan serta memperbaiki layanan dan proses kerja pemerintah, meningkatkan keterbukaan, kontrol dan akuntabilitas instansi pemerintah serta mengurangi biaya interaksi dan administrasi antara pemerintah, bisnis dan masyarakat. Dari sisi masyarakat, penerapan *e-government* dapat memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adil dan demokratis (Hernikawati, 2013).

2.2.2 Model *E-government*

Menurut Sutabri (2012), *e-government* dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat menghasilkan bentuk hubungan baru menjadi 3 model *e-government*, yaitu:

2.2.2.1 G2C (*Government to Citizen*)

G2C merupakan bentuk layanan pemerintah berupa penyebaran informasi kepada publik serta layanan dasar masyarakat. Layanan ini ditandai dengan sebuah sistem pertukaran informasi pemerintah dan aplikasi aplikasi berbasis internet yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan lainnya menggunakan portal online *single window* yang menyediakan layanan layanan masyarakat seperti pemrosesan dan penerbitan surta perizinan dan sertifikat, informasi terhadap hal hal legislatif atau administratif dan hukum hukum yang berkaitan, jasa pembayaran, termasuk pajak dan iuran sosial dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintah melalui permintaan pendapat publik dan pemungutan suara elektronik (*e-vote*).

2.2.2.2 G2B (*Government to Business*)

Layanan *government to business* dapat berupa *one-stop single-window service* bagi layanan bisnis. Layanan di dalamnya meliputi urusan administrasi perusahaan, informasi industry, layanan transaksi elektronik seperti pengadaan, penawaran, pengumuman, layanan pembayaran untuk berbagai pajak dan pungutan public. Agar tercapai layanan sektor G2B yang efektif dibutuhkan pengaplikasian TIK seperti adanya sistem *e-procurement* terintegrasi (contohnya sistem pengadaan pemerintah yang *single-window* di mana semua proses-proses terkait pengadaan, pendaftaran, tender, kontrak dan pembayaran dilakukan melalui internet), sistem *e-customs* berguna untuk memperlancar administrasi bea cukai dalam industry ekspor impor dan menggalakkan larangan penyelundupan yang efektif dan layanan *e-commerce* untuk mendukung proses penjualan dan pembelian baik barang dan atau jasa secara *online*.

2.2.2.3 G2G (*Government to Government*)

Bentuk pemerintahan *government to government* bertujuan untuk mereformasi proses kerja internal pemerintah untuk meningkatkan efisiensi. Hasil yang diharapkan dengan adanya reformasi proses kerja pemerintah adalah, adanya sistem pelaporan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang saling terhubung sehingga dapat meningkatkan akurasi, ada pertukaran informasi antar lembaga dalam bentuk penggunaan basis data bersama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, pertukaran ide dan sumber daya antar lembaga-lembaga pemerintah dan pengambilan keputusan yang terkolaborasi melalui konferensi video. Tujuan utama dari G2G adalah digitalisasi pemrosesan dokumen di lembaga pemerintah dan gerakan menuju pemerintah yang *paperless*. Sektor G2G dalam banyak hal mewakili kekuatan dari *e-government*. Pengamat menyarankan agar pemerintah di setiap tingkatan memperbaiki dan memperbaharui sistem internal sebelum berhubungan dalam sektor G2C dan G2B. G2G melibatkan pertukaran data yang bersifat elektronis antara pelaku pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga daerah.

2.2.3 Kebijakan *E-government* Nasional

Pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, dijelaskan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Hal ini membuat pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk memangkas sekat-sekat birokrasi. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktifitas yang saling berkaitan, pertama pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronik, dan kedua pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk mencapai tujuan strategis *e-government*, perlu dilaksanakan 6 strategi yang saling berkaitan, sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 yaitu, mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* (kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi) masyarakat dan melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Berdasarkan pertukaran informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat 1-Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi setiap Lembaga, kemudian penyiapan SDM untuk mendukung pengembangan *e-government*, penyiapan sarana akses yang mudah seperti wi-fi gratis, *community center*, dan lainnya, dan melakukan sosialisasi situs informasi baik internal maupun publik.
2. Tingkat 2-Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi publik yang interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Tingkat 3-Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

4. Tingkat 4-Pemanfaatan, berupa pembuatan aplikasi untuk pelayanan dengan model G2G, G2B dan G2C yang saling terintegrasi.

2.3 Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGI)

PeGI merupakan kegiatan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga-lembaga pemerintah oleh Direktorat *e-government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO). Harapannya, terjadi peningkatan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. PeGI bertujuan untuk menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif dan mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

2.3.1 Tujuan Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGI)

Pelaksanaan penilaian menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) memiliki 3 tujuan utama yaitu:

1. **Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.** PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan harapan, agar lingkungan pemerintah baik tingkat propinsi, kabupaten/kota, kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK dengan lebih terarah.
2. **Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif.** PeGI diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga pemerintah. Evaluasi yang utuh meliputi seluruh aspek yang memberikan kontribusi atas suksesnya pengembangan dan implementasi *e-government*, bukan hanya aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja. Evaluasi yang seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari suatu aspek yang dapat mengurangi akurasi hasil penelitian. Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi subyektivitas yang dapat mengganggu kepercayaan hasil evaluasi.
3. **Melihat hasil peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.** PeGI meliputi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional. PeGI diharapkan dapat menggambarkan kondisi dari sisi kekuatan dan kelemahan seluruh instansi yang nantinya berguna untuk mengembangkan TIK di masa yang akan datang.

2.3.2 Dimensi Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGI)

Dalam kerangka kerja Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) terdapat 5 dimensi *e-government*; kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Berikut penjelasan umum untuk masing masing dimensi:

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan utama dalam pengembangan dan implementasi *e-government*, didukung dengan adanya dukungan dari pimpinan di instansi pemerintahan terkait penerapan *e-government*. Kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik, merupakan tindakan berupa kewenangan pemerintah yang sah untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan individu atau lembaga swasta. Terdapat dua ciri pokok dari kebijakan publik, pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintah, kedua bersifat mempengaruhi tindakan masyarakat luas. Contoh, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan privat, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang tidak bersifat memaksa orang atau lembaga lain. Keputusan dari kebijakan privat bersifat tidak mengikat (Simatupang, 2003).

Merujuk kepada pengertian kebijakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kebijakan merupakan konsep dan asas dasar yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Menurut James E. Anderson (2003), kebijakan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan agar diikuti oleh aktor atau seperangkat aktor dalam menangani suatu masalah, dimana kebijakan ini dikembangkan oleh pejabat-pejabat pemerintah atau badan-badan pemerintah. Konsep ini menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan berorientasi pada tujuan, (2) Kebijakan terdiri atas pola pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah, (3) Kebijakan publik merupakan respon dari tuntutan dalam menangani suatu masalah, (4) Kebijakan merepresentasikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, (5) Kebijakan publik bisa menjadi hal yang positif atau negatif. Tindakan pemerintah yang transparan dalam menangani permasalahan merupakan tindakan positif. Tidak adanya tindakan pemerintah dalam hal hal tertentu yang membutuhkan keterlibatannya merupakan hal yang negatif. James E. Anderson (2003) menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan peran pemerintah.

Menurut Suharto (2008), dalam menganalisis kebijakan yang akan dikeluarkan, terdapat 6 tahap yang harus dilakukan, pertama, mendefinisikan masalah kebijakan, perlu dilakukan eksplorasi isu dan masalah sosial untuk kemudian ditetapkan menjadi suatu masalah yang menjadi fokus dalam analisis kebijakan. Pemilihan masalah berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti bersifat aktual, penting, mendesak, relevan dengan kebutuhan, merupakan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, serta sesuai dengan visi. Tahap kedua adalah mengumpulkan bukti masalah. Masalah kebijakan harus didukung oleh bukti yang relevan, memadai dan akurat. Bukti bisa berasal dari data primer

berupa hasil penelitian dan atau data sekunder berupa publikasi di koran, internet, buku atau dokumen pemerintah. Tahap ketiga, mengkaji penyebab masalah, para pembuat kebijakan mengidentifikasi penyebab dan faktor dalam masalah yang terbentuk. Kebijakan yang dihasilkan dapat dikembangkan berdasarkan faktor dan penyebab yang ditemukan. Tahap keempat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada, tahap ini dapat menjadi lebih efektif dengan melakukan perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Tahap kelima adalah mengembangkan alternatif kebijakan, alternatif kebijakan dapat dikembangkan dengan mengeliminasi faktor-faktor masalah dan mengkaji ulang kebijakan yang telah berjalan saat ini. Alternatif kebijakan dapat digunakan ketika kebijakan yang telah diterapkan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap terakhir adalah menyeleksi alternatif terbaik, dengan mempertimbangkan fisibilitas dan efektifitas dalam menyeleksi alternatif kebijakan terbaik. Pada tahap ini juga dilakukan pemantauan tujuan yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan yang diusulkan.

2. Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang secara umum merupakan institusi atau pranata dimana di dalamnya terdapat hubungan norma-norma, nilai dan keyakinan yang berpusat kepada kebutuhan sosial serta rangkaian tindakan yang penting dan berulang. Lembaga merupakan organisasi atau kaidah kaidah baik formal atau informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu, baik dalam kegiatan rutin harian, maupun dalam usahanya mencapai tujuan tertentu (Mubyarto, 1984). Lembaga dapat dibedakan atas 2 bentuk, pertama lembaga formal merupakan hubungan kerja antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu dan struktur organisasi yang jelas, kedua lembaga non-formal merupakan hubungan antara dua orang atau lebih tanpa struktur organisasi dan tujuan lembaga yang spesifik, biasanya terdiri dari ketua saja.

Di dalam masyarakat, terdapat lembaga yang bersifat asli yang berasal dari adat kebiasaan yang secara turun temurun dijalankan seperti gotong royong, arisan, jual beli, koperasi dan lainnya dan terdapat lembaga yang diciptakan dari dalam atau dari luar desa. Lembaga-lembaga ini memiliki peranan tertentu di dalam masyarakat yang diikuti dengan tertib oleh anggota masyarakat desa, dimana jika terjadi penyimpangan akan disoroti dengan tajam oleh masyarakat (Mubyarto, 1984).

Terdapat berbagai definisi kelembagaan menurut para ahli dari berbagai bidang (Djogo, T., Sirait M, T., Suharjito, 2003):

1. Ruttan dan Hayami, 1984

“..... aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.”

2. Ostrom, 1985;1986

“..... aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.”

3. Williamson, 1985

“.... mencakup penataan institusi (*institutional arrangement*) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi.”

Didalam PeGI, kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi atau institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap peraturan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *e-government*.

3. Infrastruktur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur diartikan sebagai prasarana, yang secara umum diketahui sebagai jalan, jembatan, rumah sakit, dan sarana publik lainnya. Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005), infrastruktur merupakan sistem yang menyediakan kebutuhan sarana publik seperti transportasi, pengairan, drainase, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik sosial maupun ekonomi.

Menurut Kodoatie (2005), Infrastruktur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan input dan outputnya terhadap masyarakat, pertama, infrastruktur yang memberikan input kepada penduduk, seperti listrik dan air minum, kedua, Infrastruktur yang mengambil input dari penduduk, seperti pembuangan sampah dan sanitasi dan ketiga, Infrastruktur yang dipakai untuk memberi input juga mengambil output, seperti jalan dan telepon.

Sedangkan menurut jenisnya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi dapat didefinisikan sebagai sarana fisik yang biasanya terdapat monopoli didalamnya, seperti energi, listrik, minyak, gas, telekomunikasi, transportasi dan air. Sedangkan infrastruktur sosial merupakan sarana non fisik yang melingkupi area yang terbatas dalam kehidupan masyarakat tertentu seperti kepemimpinan dan organisasi. (Kasper, 2015). Dalam sub-bab ini, infrastruktur yang akan dibahas adalah infrastruktur ekonomi (infrastruktur fisik).

Menurut Kasper (2005) Infrastruktur dapat dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu telekomunikasi, transportasi, energi dan air. Sektor telekomunikasi merujuk pada transmisi informasi dalam jarak tertentu. Saat ini, data bisa ditransfer melalui struktur fisik, baik dengan kabel maupun tanpa kabel. Data dapat ditransfer ke radio, telepon, telefax, telegram, televisi, komputer, dan lainnya sebagai bentuk komunikasi elektronik. Sektor transportasi berupa jaringan transportasi yang berkontribusi besar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Semakin tinggi kualitas jaringan transportasi (ukuran, teknologi dan koneksi) maka akan semakin cepat barang dan jasa bisa ditransaksikan. Sektor transportasi dapat berupa penerbangan, jalan, rel dan terusan. Sektor energi dapat dibedakan menjadi minyak dan gas, sebagai energi utama saat ini. Sektor energi merupakan penggerak utama dalam kegiatan industri. Sektor Air merupakan sumberdaya paling penting sebagai salah satu penopang kehidupan di bumi. Pertumbuhan populasi dan kekeringan di banyak tempat di dunia meningkatkan kebutuhan akan makanan dan air bersih, yang saat ini menjadi ancaman kelangsungan hidup di beberapa wilayah. Dan sektor telekomunikasi merupakan infrastruktur yang penting dalam penerapan *e-government*, karena sektor ini menjadi syarat fisik *e-government* dapat dijalankan dengan baik.

4. Aplikasi

Aplikasi merupakan suatu program yang terdapat di dalam komputer yang berisi instruksi-instruksi tertentu atau pernyataan yang disusun untuk melakukan pengolahan data. Secara umum, aplikasi merupakan transformasi proses manual menjadi terkomputerisasi (Jogiyanto, 2006). Menurut Sutabri (2012), aplikasi merupakan alat terapan yang berfungsi untuk melakukan suatu pekerjaan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Aplikasi dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Pertama merupakan aplikasi dasar (*general-purpose application*), atau biasa disebut dengan aplikasi dengan tujuan penggunaan umum. Dan yang kedua adalah aplikasi produktifitas (*productivity applications*), aplikasi ini digunakan secara luas dalam berbagai disiplin dan kebutuhan, seperti aplikasi pengolah kata, spreadsheets, sistem pengelola database dan presentasi. Kategori lainnya disebut aplikasi khusus (*specialized applications*) merupakan aplikasi yang fungsinya fokus pada disiplin dan kebutuhan tertentu, seperti aplikasi pengolah suara, program multimedia, program grafis, dan lainnya.

Menurut Hasibuan dan Santoso (2005), dalam penerapan *e-government* perlu adanya standarisasi aplikasi untuk mempermudah pengembangan *e-government* sehingga dapat mencegah terbentuknya kelompok-kelompok data, inkonsistensi informasi, serta infrastruktur dan keamanan yang tidak memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun kebutuhan fungsional seperti:

- Membuat standar website atau situs pemerintah, seperti fitur apa yang perlu dimasukkan dan informasi apa yang akan ditampilkan.
- Menyediakan informasi pada fitur informasi yang dipilih.

- Melakukan pemilihan fitur yang diinginkan, disesuaikan dengan *computer literacy* atau *e-literacy* di daerah tersebut.
- Menyediakan bentuk komunikasi yang mendukung interaktifitas secara dua arah antara pemerintah dan masyarakat, seperti forum diskusi, penyampaian kritik dan keluhan.

Dalam buku Cetak Biru (*Blue Print*) Sistem Aplikasi *E-Government* yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, terdapat standar kebutuhan sistem aplikasi *e-government* yaitu:

- *Reliable*: jaminan bahwa sistem aplikasi akan berjalan dengan handal, dapat menerima perubahan sistem informasi dan mencegah kesalahan data serta bebas *bug*.
- *Interoperable*: sistem aplikasi dapat saling bertukar data sehingga membentuk sistem yang saling bersinergi.
- *Scalable*: aplikasi dapat dengan mudah diperbaharui sehingga meningkatkan kemampuannya, seperti penambahan fitur, penambahan user dan pengelolaan data yang semakin lama semakin meningkat.
- *User Friendly*: dapat dioperasikan dengan mudah, dengan antar muka yang lazim digunakan sesuai kebiasaan dan budaya pengguna.
- *Integrateable*: adanya fitur yang mendukung kemudahan integrasi dengan aplikasi lain

5. Perencanaan

Menurut Husen (2010), perencanaan merupakan suatu tahapan dalam manajemen proyek dimana dalam proses tersebut dilakukan penentuan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program, baik teknis maupun administratif agar dapat segera diimplementasikan. Perencanaan bertujuan untuk memenuhi persyaratan spesifikasi proyek yang ditentukan dalam batasan biaya, waktu, mutu dan keselamatan. Perencanaan memiliki 4 filosofi, yang pertama aman (terjaminnya keselamatan), efektif (output bekerja sesuai harapan) efisien (output yang dihasilkan menghemat biaya) dan mutu terjamin (tidak menyimpang dari rencana yang ditentukan).

Perencanaan merupakan fungsi yang vital dalam kegiatan manajemen proyek, sehingga manajemen dituntut untuk dapat membuat langkah langkah yang bijak agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan dinilai baik jika seluruh proses kegiatan di dalamnya dapat diimplementasikan sesuai dengan saran dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Hasil akhir dari proses perencanaan akan menjadi dasar acuan bagi proses selanjutnya. Perencanaan harus dapat mengantisipasi adanya kemungkinan situasi yang belum jelas dan tidak pasti, karena aspek utama dari proses perencanaan adalah peramalan yang bergantung pada subyektivitas perencana (Husen, 2010).

Menurut Tantra (2012), proses perencanaan berhubungan dengan pembagian, pengalokasian dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkup manajemen

proyek. Rencana-rencana yang perlu disiapkan dalam proses perencanaan adalah pertama, pembuatan rencana proyek. Proses ini menggali aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama masa pengembangan proyek, estimasi jadwal dan durasi pelaksanaan dan penanggung jawab. Kedua, rencana sumberdaya manusia, proses ini merupakan proses pengalokasian setiap sumberdaya manusia yang ada kepada masing masing tugas yang ada. Setelah sumberdaya manusia dialokasikan, kemudian disusun struktur organisasi proyek, yang didalamnya terdapat manajer sebagai pemimpin. Selanjutnya, dilakukan perencanaan keuangan, proses perencanaan keuangan atau alokasi biaya memastikan proyek didukung oleh dana yang cukup. Penyusunan alokasi biaya membutuhkan ketelitian agar alokasi biaya yang dianggarkan mencukupi hingga proyek selesai dikerjakan. Proses selanjutnya adalah rencana kualitas. Output dari perencanaan kualitas dapat menjadi referensi fungsi kontrol dalam fase pengembangan proyek. Proses selanjutnya adalah rencana risiko, penyusunan rencana risiko dilakukan sebagai langkahantisipasi risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Tahap ini merupakan salah satu bagian dari kontrol terhadap proyek, sehingga penyusunan rencana ini harus dikontrol secara rutin terhadap pelaksanaan proyek. Proses selanjutnya adalah rencana penerimaan, penerimaan merupakan persetujuan dari klien bahwa permintaan dalam proyek telah sesuai dengan kriteria kualitas yang disepakati berdasarkan batasan proyek yaitu waktu, batasan dan biaya. Rencana penerimaan penting agar proyek dapat berakhir dengan baik sesuai rencana. Proses selanjutnya adalah rencana komunikasi. Rencana komunikasi merupakan penyampaian berbagai informasi kepada seluruh *stakeholder* proyek, untuk menghindari kesalah pahaman antara masing masing pihak. Rencana komunikasi ini dapat berupa jenis informasi yang dibutuhkan masing masing stake holder, jadwal pemberitahuan informasi, metode komunikasi yang digunakan, dan sebagainya. Proses selanjutnya proses rencana pengadaan, rencana ini dilakukan jika dalam pelaksanaan proyek memerlukan inventaris atau jasa tertentu, seperti *hardware* dan alat alat tertentu yang dibutuhkan dalam proyek. Proses terakhir adalah tinjauan perencanaan. Peninjauan perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat masih dapat mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan proyek. Jika terjadi perubahan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan proyek, maka dapat dilakukan perubahan-perubahan tertentu untuk menghindari berbagai potensi risiko.

2.4 Profil Kota Batu

2.4.1 Demografi Kota Batu

Kota Batu terletak di dataran tinggi kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter diatas permukaan laut. Di awal abad 19, Kota Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, terutama bagi orang orang Belanda, yang membangun tempat tempat peristirahatan (villa) di Kota Batu. Situs peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda itu masih ada bahkan menjadi aset dan tujuan kunjungan wisata hingga saat ini. Kota Batu dijuluki sebagai *De Klein*

Switzerland atau Swiss kecil, karena keindahan dan keelokannya yang dikagumi bangsa Belanda.

Topografi Kota Batu berupa perbukitan dan pegunungan, dikelilingi oleh 6 gunung, Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno, Gunung Banyak, Gunung Kawi, Gunung Panderman dan Gunung Welirang. Sebagai daerah wilayah pegunungan, Kota Batu memiliki tanah yang subur, yang membuat pertanian dan perkebunan menjadi salah satu komoditas utama di Kota Batu. Area yang ditempati penduduk hanya 7.7% dari total luas lahan. 39.2% berupa hutan, 5.08% berupa perkebunan dan sisanya adalah area persawahan. Kota Batu merupakan salah satu kota baru di Indonesia, resmi berdiri pada tahun 2001 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Malang. Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Kota Batu merupakan daerah paling kecil dikawasan Malang Raya, dengan luas 202,800 km².

2.4.2. Visi dan Misi Kota Batu

Visi Kota Batu adalah:

“Kota Batu Sentra Pertanian Organik berbasis kepariwisataan Internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, ditopang oleh sumber daya (alam, manusia, dan budaya) yang tangguh, diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Sedangkan misi Kota Batu adalah:

1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik
4. Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional
5. Optimalisasi pemerintahan daerah
6. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
7. Peningkatan kualitas kesehatan
8. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas
9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di kota batu yang harmonis dan demokratis
11. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan ukm

2.5 Subyek Penelitian

2.5.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu

Dinas Kominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, yang bertanggung jawab kepada Walikota Kota Batu

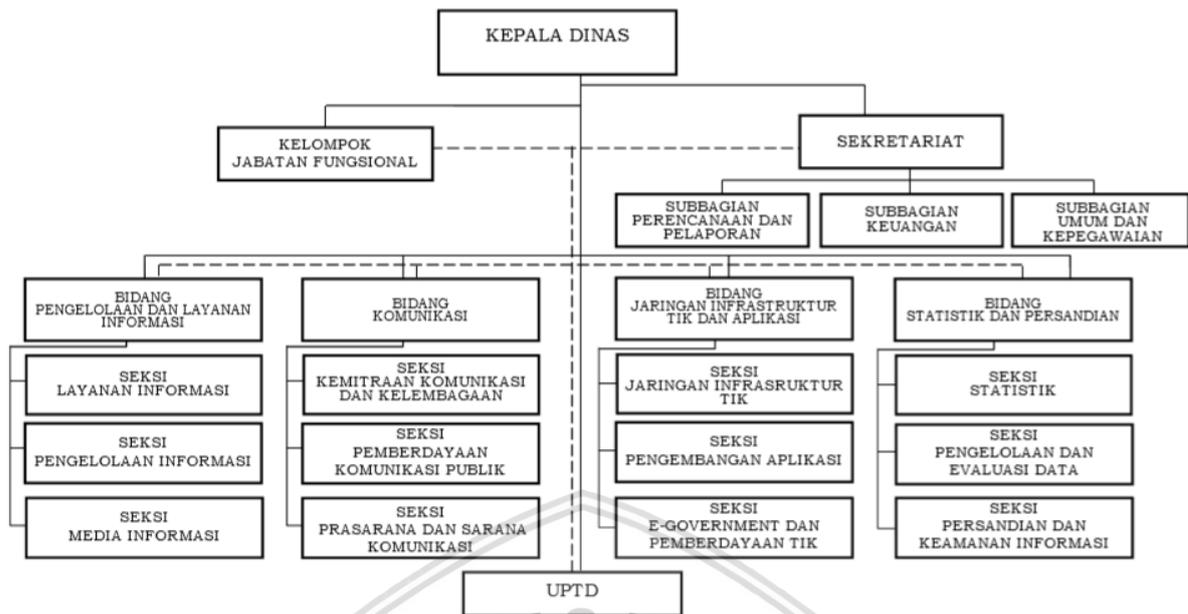
melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batu, Dinas Kominfo Kota Batu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang komunikasi dan informatika.
- Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang komunikasi dan informatika.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.
- Penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di bidang komunikasi dan informatika.
- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi dan informatika.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kominfo Kota Batu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi, yang membawahi:
 - Seksi Layanan Informasi;
 - Seksi Pengelolaan Informasi;
 - Seksi Media Informasi.
- d. Bidang Komunikasi, yang membawahi:
 - Seksi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan;
 - Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik;
 - Seksi Prasarana dan Sarana Komunikasi.
- e. Bidang Jaringan Infrastruktur TIK dan Aplikasi, yang membawahi:
 - Seksi Jaringan Infrastruktur TIK;
 - Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - Seksi *E-Government* dan Pemberdayaan TIK.
- f. Bidang Statistik dan Persandian, yang membawahi:
 - Seksi Statistik;
 - Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data;
 - Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Batu

Sumber: Lampiran Perwali Kota Batu No. 74 Tahun 2016

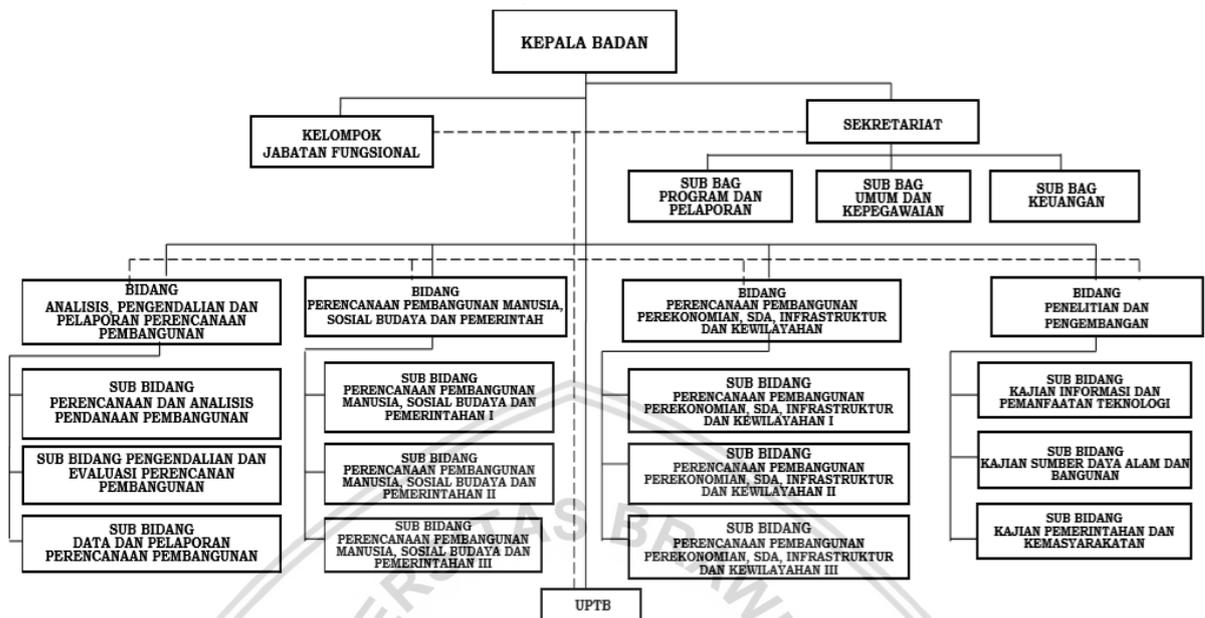
2.5.2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu merupakan unsur pelaksana unsur pemerintahan di bidang perencanaan dan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Bapelitbangda Kota Batu bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kota Batu, Bapelitbangda mempunyai tugas untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, serta memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah, kemudian berfungsi dalam penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, penyelenggaraan administrasi dinas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bapelitbangda Kota Batu terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan yang membawahi:
 - Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan.
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan, yang membawahi:
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan I.
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan II.
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan III.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan, yang membawahi:
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan I.
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan II.
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan III.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi:
 - Sub Bidang Informasi dan Pemanfaatan Teknologi.
 - Sub Bidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan.
 - Sub Bidang Kajian Pemerintahan dan Masyarakat.
- d. UPT Badan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Batu



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bapelitbangda Kota Batu

Sumber: Lampiran Perwali Kota Batu No. 89 Tahun 2016

2.5.3 Dinas Pertanian Kota Batu

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian di Kota Batu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Batu, Dinas Pertanian bertugas membantu Walikota dalam urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan fungsi sebagai berikut:

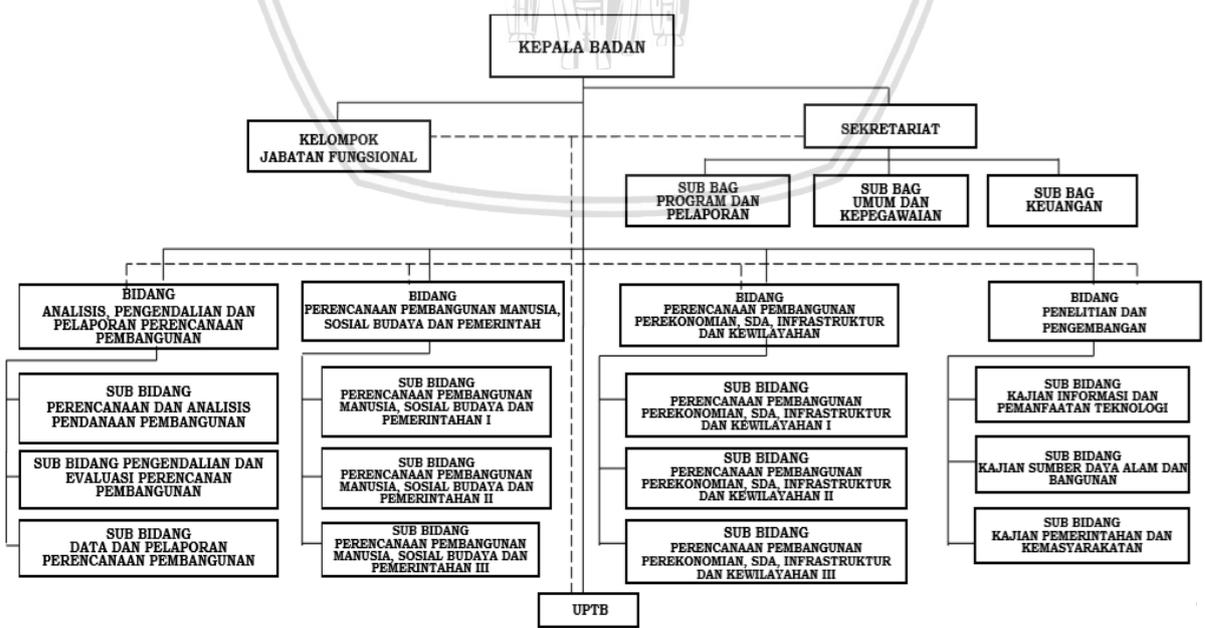
- Merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pertanian.
- Menetapkan rencana kerja dan anggaran bidang pertanian.
- Melaksanakan kebijakan di bidang pertanian.
- Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk aparatur di bidang pertanian.
- Melaksanakan administrasi di bidang pertanian.
- Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pertanian.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi lainnya.

Struktur organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahi:

- Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Hortikultura yang membawahi:
 - Seksi Produksi Hortikultura.
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura.
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan yang membawahi:
 - Seksi Produksi, Tanaman Pangan dan Perkebunan.
 - Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Perkebunan.
 - Seksi Pengolahan, Pemasaran Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- e. Bidang Peternakan dan Perikanan yang membawahi:
 - Seksi Bina Produksi dan Pemasaran Peternakan.
 - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
 - Seksi Perikanan.
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Pembiayaan yang membawahi:
 - Seksi Lahan, Irigasi, dan Konservasi.
 - Seksi Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian.
 - Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- g. Bidang Penyuluhan yang membawahi:
 - Seksi Kelembagaan.
 - Seksi Ketenagaan.
 - Seksi Metode dan Informasi.
- h. UPTD.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Batu



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Batu
 Sumber: Lampiran Perwali Kota Batu Nomor 84 Tahun 2016



2.6 Populasi dan Sampel Penelitian Kualitatif

Populasi merupakan wilayah generalisasi subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel, merupakan bagian dari populasi yang ada (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian kualitatif, terdapat perbedaan dalam memaknai populasi. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016), populasi dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berawal dari kasus yang ada pada lingkungan sosial tertentu. Hasil dari penelitian kualitatif tidak akan diberlakukan ke populasi, melainkan ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus yang sedang dipelajari. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, guru dalam penelitian. Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan adalah narasumber.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi maksimum, bukan untuk tujuan generalisasi. Wawancara atau pengisian kuisioner dilakukan kepada orang-orang yang dianggap memahami keadaan dan situasi di lingkup penelitian tersebut, atau yang biasa disebut *purposive*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan pertimbangan tertentu seperti narasumber dianggap mengetahui lingkungan subyek yang diteliti atau posisi narasumber yang dapat mempermudah peeliti dalam menjelajahi subyek penelitian.

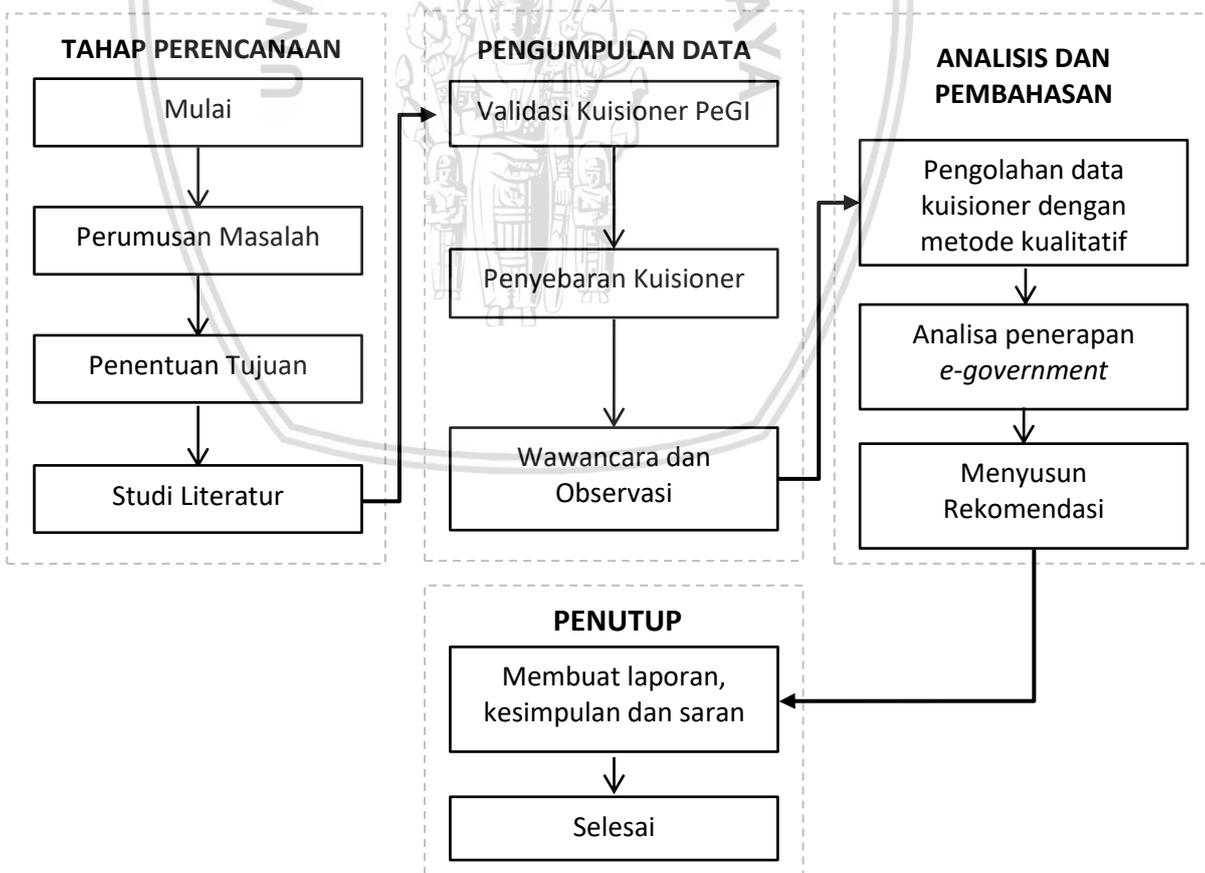
BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat aturan prosedur untuk memperoleh penelitian yang valid dan reliabel, dimana metode penelitian tidak hanya berkaitan dengan metode pengumpulan data, tetapi juga mencakup teknik analisis data, teknik *sampling*, dan bahkan teknik perumusan masalah dan hipotesis penelitian (Brewer, 2000). Metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan *e-government* ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* (penyelidikan) yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dan sederhana, dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2016).

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan dalam diagram alir Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.2 Studi Literatur dan Observasi

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan studi literatur untuk memperdalam wawasan mengenai *e-government*, seperti sejauh mana penerapannya telah dilakukan dalam skala nasional dan bagaimana penerapannya di Pemerintah Kota Batu, produk-produk hukum yang berlaku yang berkaitan dengan *e-government*, kondisi pemerintahan Kota Batu, penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan Kota Batu dan sebagainya. Studi literatur juga dilakukan untuk mendalami kerangka kerja Pemingkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.2 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tiga Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang dalam penelitian ini adalah Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian. Objek penelitian yang akan diteliti mencakup evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penerapan *e-government* di lingkungan SOPD.

3.3 Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati pemanfaatan teknologi informasi di masing masing SOPD terkait, observasi juga dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap hasil kuisisioner yang telah diisi oleh pihak SOPD, contohnya untuk mengecek keberadaan website atau keberadaa dokumen pendukung untuk kebijakan-kebijakan tertentu.

3.3.2 Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengecek keabsahan pengisian kuisisioner. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah bentuk wawancara dimana dimana pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan. Dalam bentuk wawancara ini peneliti belum mengetahui data seperti apa yang akan diperoleh, sehingga lebih banyak mendengarkan narasumber (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, garis besar pertanyaan didapatkan berdasarkan jawaban dari kuisisioner yang telah diisi oleh narasumber.

3.3.3 Kuisisioner

Jenis kuisisioner dalam penelitian ini adalah kuisisioner terbuka, dimana, responden bebas mengisi jawaban atas setiap pertanyaan. Dalam penelitian ini, kuisisioner yang digunakan merupakan kuisisioner yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) sebagai instrumen untuk menilai penerapan *e-government* dalam kerangka kerja PeGI. Kuisisioner memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 29

pertanyaan, yang terbagi kedalam 5 bagian sesuai dengan jumlah dimensi kerangka kerja PeGI. Jumlah pertanyaan setiap dimensi ditunjukkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Jumlah Pertanyaan di Kuisisioner Kerangka Kerja PeGI

No.	Dimensi	Jumlah Pertanyaan
1.	Kebijakan	7
2.	Kelembagaan	5
3.	Infrastruktur	7
4.	Aplikasi	5
5.	Perencanaan	5

Setiap pertanyaan dalam kuisisioner PeGI memiliki bobot yang sama dalam skala 1-4, karena setiap pertanyaan saling mendukung satu sama lain. Hasil penilaian yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai penilaian pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Kelompok nilai dalam PeGI

No.	Nilai	Keterangan
1.	$\leq 4,00$ dan $\geq 3,60$	Sangat Baik
2.	$< 3,60$ dan $\geq 2,60$	Baik
3.	$< 2,60$ dan $\geq 1,60$	Kurang
4.	$< 1,60$ dan $\geq 1,00$	Sangat Kurang

Sebelum dilakukan penyebaran kuisisioner, dilakukan validasi kuisisioner untuk memeriksa keterbacaan setiap pertanyaan yang ada dengan melakukan konsultasi dengan ahli.

3.4 Sistem Penilaian Kerangka Kerja Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGI)

PeGI merupakan kegiatan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga lembaga pemerintah oleh Direktorat *e-government* didalam Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO). Harapannya, terjadi peningkatan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga pemerintah, diseluruh Indonesia. PeGI bertujuan untuk menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif dan mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Terdapat 5 dimensi yang dinilai di dalam kerangka kerja PeGI yaitu:

1. Kebijakan

Dalam kerangka kerja PeGI, Kebijakan merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi *e-government*. Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal. Dokumen-dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan arah atau tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan pengembangan dan implementasi *e-government* di lingkungan instansi. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya.

2. Kelembagaan

Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. Evaluasi dimensi kelembagaan dilakukan terhadap :

1. Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.
2. Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas dan Fungsi
3. Adanya kelengkapan unit kerja dan aparaturnya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
4. Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implementasi TIK di instansi peserta.

3. Infrastruktur

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:

1. Pusat data (*data center*) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak
2. Jaringan komunikasi (Akses Internet)
3. Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (*desktop, notebook* dan lain lain)
4. Saluran layanan (*service delivery channel*) berbasis web, telepon, sms dan lain lain
5. Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS, genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.

4. Aplikasi

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan *e-government* secara langsung

(*front office*) atau tidak langsung (*back office*). Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi *e-government* yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Kelompok aplikasi yang dievaluasi:

1. Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain.
2. Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
3. Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain.
4. Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan, dan lain-lain.
5. Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
6. Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, pengukuran kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.
7. Pemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.
8. Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.
9. Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenaga-kerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial
10. Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

Pertimbangan dalam evaluasi dimensi aplikasi adalah:

1. Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang dilayani
2. Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain.
3. Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal
4. Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).

5. Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak pihak lain.

5. Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Evaluasi dimensi perencanaan dilakukan terhadap:

1. Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekanisme kerja yang baku dan teratur)
2. Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan persiapan kebutuhan di masa yang akan datang
3. Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan

Kelima dimensi PeGI tersebut memiliki 35 indikator penilaian yang terdiri dari 8 Sub Dimensi untuk dimensi kebijakan, 5 Sub Dimensi untuk dimensi kelembagaan, 7 Sub Dimensi untuk dimensi infrastruktur, 10 Sub Dimensi untuk dimensi aplikasi dan 5 Sub Dimensi untuk dimensi perencanaan. Keseluruhan sub dimensi dapat dilihat dalam tabel 3.3 (Romayah dkk, 2014) berikut:

Tabel 3.3 Dimensi dan Sub Dimensi Kerangka Kerja PeGI

No	Dimensi	Sub Dimensi
1.	Kebijakan	Manajemen/Proses Kebijakan TIK
		Visi dan Misi TIK
		Strategi Penerapan Kebijakan
		Pedoman
		Peraturan
		Keputusan Instansi
		Skala Prioritas TIK
		Evaluasi/Manajemen Risiko TIK
2.	Kelembagaan	Keberadaan Organisasi
		Tupoksi
		SOP
		SDM
		Pengembangan SDM

3.	Infrastruktur	Data Center
		Jaringan Data
		Kemanan
		Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK
		Pusat Pemulihan Bencana (<i>Disaster recovery center</i>)
		Pemeliharaan TIK
		Inventaris Peralatan TIK
4.	Aplikasi	Situs Wajib (Homepage)
		Aplikasi Fungsional Utama (Pelayanan)
		Aplikasi Fungsional Utama (Administrasi dan Manajemen)
		Aplikasi Fungsional Utama (Legislasi)
		Aplikasi Fungsional Utama (Pembangunan)
		Aplikasi Fungsional Utama (Keuangan)
		Aplikasi Fungsional Utama (Kepegawaian)
		Manual Petunjuk Aplikasi TIK
		Inventaris Aplikasi TIK
		Interoperabilitas
5.	Perencanaan	Pengorganisasian/Fungsi
		Sistem Perencanaan
		Dokumentasi <i>Master Plan</i>
		Implementasi <i>Master Plan</i>
		Anggaran/ Pembiayaan

3.5 Analisis dan Pengolahan Data

3.5.1 Penilaian Penerapan *E-government* di SOPD Terkait

Penilaian dilakukan dengan menganalisis data kualitatif yang didapat dari narasumber melalui kuisisioner, wawancara dan observasi. Kemudian membandingkan data tersebut dengan skor penilaian yang terdapat didalam pedoman penilaian kerangka kerja PeGI (Lampiran A). Proses penilaian mengacu pada sub dimensi dan kriteria data yang terdapat di setiap dimensi kerangka kerja PeGI.

3.5.2 Pembuatan Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian berdasarkan kerangka kerja PeGI. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan agar pelayanan *e-government* di lingkungan SOPD yang diteliti dapat mencapai kategori penilaian sangat baik berdasarkan kerangka kerja PeGI.

3.6 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisisnya melalui observasi, wawancara dan kuisisioner yang akan dibahas dalam BAB 4 dan BAB 5, dapat diputuskan nilai penerapan *e-government* di lingkungan SOPD Kota Batu berdasarkan kerangka kerja Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang akan disimpulkan pada BAB 6.



BAB 4 HASIL DAN ANALISIS DATA

4.1 Penilaian Dimensi Kebijakan

Penilaian dimensi kebijakan bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan kebijakan berkaitan dengan teknologi informasi yang telah diterapkan, seperti peraturan, produk hukum dan dokumen dokumen resmi yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu. Penjabaran hasil dan analisis ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi sub dimensi yang terdapat di dalam dimensi kebijakan, indikator yang menjadi fokus penilaian, dan nilai kondisi antara 1 hingga 4 dengan keterangan dari nilai kondisi tersebut, berdasarkan pedoman penilaian PeGI (Lampiran A).

4.1.1 Sub Dimensi Proses Kebijakan

Hal yang dinilai dalam sub dimensi proses kebijakan adalah apakah instansi terkait telah memiliki proses kebijakan yang berkaitan dengan penerapan TIK, bagaimana pelaksanaannya dan apakah sudah didokumentasikan dengan baik.

4.1.1.1 Dinas Kominfo

Tabel 4.1 Penilaian Sub Dimensi Proses Kebijakan di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Proses Kebijakan	Adanya manajemen atau proses terkait kebijakan	3 (Baik)	Terdapat manajemen/proses kebijakan, dilaksanakan secara konsisten tetapi belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan kuisisioner (lampiran C) dan wawancara (lampiran D) yang dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2017, sudah dikeluarkan peraturan walikota yang membahas proses kebijakan TIK, melalui Peraturan Walikota no. 78 tahun 2017 tentang Masterplan Batu Smart City yang ditetapkan pada 10 November 2017 (lampiran G). Dokumen master plan ini berisi perencanaan penerapan *smart city* di Kota Batu termasuk di dalamnya perencanaan strategi penerapan *e-government*. Berdasarkan master plan tersebut, pelaksanaan saat ini sedang berjalan pada tahap pertama yaitu penguatan infrastruktur dan *data center*. Nilai 3 (baik) diberikan karena Dinas Kominfo Kota Batu memiliki dokumentasi proses kebijakan TIK dengan strategi pelaksanaan yang jelas.

4.1.1.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.2 Penilaian Sub Dimensi Proses Kebijakan di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Proses Kebijakan	Adanya manajemen atau proses terkait kebijakan	2 (Kurang)	Terdapat manajemen/proses kebijakan, tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan kuisisioner (lampiran D) yang telah diisi oleh narasumber di Bapelitbangda Kota Batu, diketahui bahwa perumusan kebijakan berkaitan dengan TIK di Bapelitbangda Kota Batu belum berjalan dengan konsisten. Perumusan kebijakan masih jarang mengakomodir atau menyelaraskan dengan kebutuhan dan penerapan TIK. Ketidak konsistenan penerapan TIK dikarenakan belum adanya perencanaan menyeluruh yang disusun di awal. Sehingga perumusan kebijakan lebih sering berdasarkan situasi dan kondisi birokrasi yang berjalan pada saat itu (*ad hoc*).

4.1.1.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.3 Penilaian Sub Dimensi Proses Kebijakan di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Proses Kebijakan	Adanya manajemen atau proses terkait kebijakan	2 (Kurang)	Terdapat manajemen/proses kebijakan, tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan wawancara (lampiran F) yang telah dilakukan terhadap narasumber di Dinas Pertanian, diketahui bahwa saat ini belum ada kebijakan berkaitan dengan penerapan TIK. Pembahasan kebijakan TIK di Dinas Pertanian Kota Batu terakhir kali baru berupa kajian penerapan sistem informasi pertanian, tetapi hasil kajian tersebut belum sampai dirumuskan menjadi kebijakan. Yang saat ini berjalan terkait perumusan kebijakan berkaitan dengan TIK di lingkungan Dinas Pertanian Kota Batu saat ini adalah mengikuti arahan atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo, sedangkan Dinas Pertanian merupakan pelaksana atau partisipan saja. Karena Dinas Pertanian belum memiliki proses kebijakan TIK nya sendiri, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.1.2 Sub Dimensi Visi dan Misi Berkaitan Dengan TIK

Hal yang dinilai dalam Sub Dimensi visi dan misi berkaitan dengan TIK adalah apakah visi dan misi telah dijadikan acuan dalam menentukan strategi.

4.1.2.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.4 Penilaian Sub Dimensi Visi dan Misi Berkaitan dengan di TIK Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Proses Kebijakan	Adanya visi dan misi berkaitan dengan TIK.	3 (Baik)	Terdapat visi dan misi yang berkaitan dengan TIK, isinya jelas, tetapi belum dijadikan acuan dalam menentukan strategi.

Dalam visi dan misi Kota Batu 2012-2017, belum secara langsung disebutkan mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam urusan pemerintahan. Namun, pada penjabaran misi Kota Batu point ke 2 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan”, salah satu indikator target untuk mencapai misi tersebut adalah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan misi tersebut, berdasarkan wawancara (Lampiran C) diketahui bahwa penerapan TIK sudah selaras dan sesuai dengan RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017.

4.1.2.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.5 Penilaian sub dimensi visi dan misi berkaitan dengan TIK di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Proses Kebijakan	Adanya visi dan misi berkaitan dengan TIK.	3 (Baik)	Terdapat visi dan misi yang berkaitan dengan TIK, isinya jelas, tetapi belum dijadikan acuan dalam menentukan strategi.

Dalam visi dan misi Kota Batu 2012-2017, belum secara langsung disebutkan mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam urusan pemerintahan. Namun, pada penjabaran misi Kota Batu point ke 2 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan”, salah satu indikator target untuk mencapai misi

tersebut adalah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan misi tersebut, berdasarkan jawaban kuisisioner (Lampiran D) diketahui bahwa penerapan TIK belum selaras dengan visi dan misi yang diterapkan. Penerapan kebijakan masih jarang mengakomodir kebutuhan penerapan TIK. Perumusan kebijakan sendiri lebih sering berdasarkan situasi dan kondisi birokrasi saat ini.

4.1.2.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.6 Penilaian Sub Dimensi Visi dan Misi Berkaitan dengan TIK di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Proses Kebijakan	Adanya visi dan misi berkaitan dengan TIK.	3 (Baik)	Terdapat visi dan misi yang berkaitan dengan TIK, isinya jelas, tetapi belum dijadikan acuan dalam menentukan strategi.

Dalam visi dan misi Kota Batu 2012-2017, belum secara langsung disebutkan mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam urusan pemerintahan. Namun, pada penjabaran misi Kota Batu point ke 2 yaitu "Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan", salah satu indikator target untuk mencapai misi tersebut adalah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam Dinas Pertanian sendiri, belum ada kebijakan atau strategi-strategi yang berkaitan dengan TIK, sehingga hal ini menunjukkan bahwa visi dan misi belum dijadikan acuan dalam menentukan strategi TIK.

4.1.3 Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan

Pada Sub Dimensi strategi penerapan kebijakan, penilaian didasarkan pada pelaksanaan strategi penerapan TIK.

4.1.3.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.7 Penilaian Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Strategi Penerapan Kebijakan	Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK.	3 (Baik)	Terdapat strategi penerapan kebijakan TIK, isinya jelas tetapi belum terlaksana dengan baik.

Penerapan strategi kebijakan TIK di Dinas Kominfo sudah jelas, yang terdapat di dalam Perwali no.78 tahun 2017, namun pelaksanaannya belum maksimal, sehingga nilai untuk sub dimensi strategi penerapan kebijakan adalah 3 (baik). Strategi penerapan kebijakan terdapat pada Peraturan Walikota no. 78 tahun 2017 tentang Masterplan Batu Smart City, dimana didalamnya terdapat tahapan pelaksanaan *smart city* Kota Batu termasuk *e-government* Kota Batu. Dari segi infrastruktur, pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Namun dari penerimaan terutama manfaat yang dirasakan oleh masyarakat masih belum bisa diketahui apakah telah mencapai target pelaksanaan yang baik atau belum.

4.1.3.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.8 Penilaian Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Strategi Penerapan Kebijakan	Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi strategi penerapan kebijakan TIK.

Untuk penilaian sub dimensi ini, berdasarkan wawancara dan kuisioner yang telah diisi oleh narasumber, diketahui bahwa saat ini belum ada penerapan strategi IT secara khusus di Bapelitbangda Kota Batu. Strategi kebijakan hanya berdasarkan *trend* penggunaan teknologi dalam masyarakat, belum berangkat dari kebutuhan akan data.

4.1.3.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.9 Penilaian Sub Dimensi Strategi Penerapan Kebijakan di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Strategi Penerapan Kebijakan	Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi strategi penerapan kebijakan TIK.

Saat ini belum ada strategi penerapan kebijakan TIK di Dinas Pertanian. Strategi kebijakan TIK mengikuti arahan dari Dinas Kominfo, sedangkan Dinas Pertanian sebagai pelaksana dan partisipan.

4.1.4 Sub Dimensi Pedoman

Pada Sub Dimensi pedoman, penilaian didasarkan pada ada atau tidaknya dokumen pedoman penerapan TIK yang jelas dan telah terlaksana dengan baik.

4.1.4.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.10 Penilaian Sub Dimensi Pedoman di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pedoman	Adanya acuan acuan untuk penerapan kebijakan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi pedoman penerapan kebijakan TIK.

Berdasarkan kuisisioner (Lampiran C) dan wawancara (Lampiran D) yang dilakukan dengan narasumber, Dinas Kominfo Kota Batu saat ini belum memiliki pedoman penerapan kebijakan TIK sebagai acuan penerapan kebijakan TIK. Pelaksanaan tugas dilakukan secara langsung tanpa ada pedoman tertentu. Karena belum adanya pedoman sebagai acuan pelaksanaan TIK, nilai untuk sub dimensi pedoman adalah 1 (sangat kurang).

4.1.4.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.11 Penilaian Sub Dimensi Pedoman di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pedoman	Adanya acuan acuan untuk penerapan kebijakan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi pedoman penerapan kebijakan TIK.

Dari wawancara yang dilakukan (Lampiran F) di Bapelitbangda, saat ini juga belum terdapat pedoman (SOP) sebagai acuan penerapan kebijakan TIK. Karena belum adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan TIK, nilai untuk sub dimensi pedoman adalah 1 (sangat kurang).

4.1.4.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.12 Penilaian Sub Dimensi Pedoman di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pedoman	Adanya acuan acuan untuk penerapan kebijakan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi pedoman penerapan kebijakan TIK.

Saat ini belum ada acuan acuan atau pedoman tertentu dalam penerapan TIK di Dinas Pertanian, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.1.5 Sub Dimensi Peraturan

Pada Sub Dimensi peraturan, penilaian didasarkan pada ada atau tidaknya peraturan instansi terkait penerapan kebijakan TIK yang jelas dan telah terlaksana dengan baik.

4.1.5.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.13 Penilaian Sub Dimensi Peraturan di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Peraturan	Adanya regulasi dan aturan lain terkait dengan TIK.	3 (Baik)	Terdapat peraturan kementerian/lembaga pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK, isinya jelas, tetapi belum terlaksana dengan baik.

Dilihat dari sub dimensi peraturan, telah ada Peraturan Wali Kota Batu No.78 tahun 2017 (Lampiran H) sebagai dasar hukum penerapan TIK, namun belum berjalan maksimal karena peraturan ini belum genap satu tahun berjalan. Sehingga nilai untuk sub dimensi peraturan adalah 3 (baik).

4.1.5.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.14 Penilaian Sub Dimensi Peraturan di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Peraturan	Adanya regulasi dan aturan lain terkait dengan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi peraturan kementerian/lembaga/pemerintah/daerah terkait penerapan kebijakan TIK

Saat ini Bapelitbangda Kota Batu belum memiliki peraturan terkait yang mendukung penerapan kebijakan TIK. Sehingga penilaian untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang)

4.1.4.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.15 Penilaian Sub Dimensi Peraturan di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Peraturan	Adanya regulasi dan aturan lain terkait dengan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi peraturan kementerian/lembaga/pemerintah/daerah terkait penerapan kebijakan TIK

Berdasarkan wawancara, saat ini belum ada kebijakan khusus terkait TIK di Dinas Pertanian, yang pernah dilakukan adalah kajian kajian terkait penerapan teknologi informasi pertanian seperti kebijakan penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi pertanian menggunakan web, namun belum ada tindak lanjut dari kajian tersebut.

4.1.6 Sub Dimensi Keputusan Instansi

Pada sub dimensi keputusan instansi, penilaian didasarkan pada ada atau tidaknya keputusan instansi terkait penerapan kebijakan TIK yang jelas dan telah terlaksana dengan baik.

4.1.6.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.16 Penilaian Sub Dimensi Keputusan Instansi di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keputusan Instansi	Adanya regulasi dan aturan lain terkait dengan TIK.	3 (Baik)	Terdapat keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK, isinya jelas, tetapi belum terlaksana dengan baik

Berdasarkan wawancara (Lampiran D) dan observasi (Lampiran H) yang dilakukan, terdapat beberapa keputusan instansi yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 terakit penerapan TIK yaitu:

- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu Nomor: 560/003/KEP/422.104/2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Non PNS Pengelola Batu Smart City Tahun 2018.

- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu Nomor: 180/002/KEP/422.104/2018 Tentang Susunan Tim Pengelola Command Center Kota Batu.
- Surat Keputusan Tim Teknis Optimalisasi E-Government Kota Batu

4.1.6.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.17 Penilaian Sub Dimensi Keputusan Instansi di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keputusan Instansi	Adanya regulasi dan aturan lain terkait dengan TIK.	1 (Kurang)	Tidak ada dokumentasi keputusan instansi terkait penerapan kebijakan TIK.

Berdasarkan wawancara (Lampiran E) yang dilakukan, belum ada keputusan instansi terkait penerapan kebijakan TIK di Bapelitbangda Kota Batu. Namun, pemanfaatan TIK untuk mendukung kinerja pemerintahan akan dimaksimalkan pada tahun 2018, yang peraturannya masih sedang dalam proses pengerjaan saat ini. Sehingga penilaian untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.1.6.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.18 Penilaian Sub Dimensi Keputusan Instansi di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keputusan Instansi	Adanya regulasi dan aturan lain terkait dengan TIK.	1 (sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi keputusan instansi terkait penerapan kebijakan TIK.

Dari hasil wawancara (Lampiran G) diketahui bahwa saat ini belum terdapat keputusan terkait penerapan kebijakan TIK di lingkungan Dinas Pertanian Kota Batu. Karena keputusan terkait TIK di Dinas Pertanian biasanya berjalan secara vertikal mengikuti keputusan instansi di provinsi atau langsung dari keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.1.7 Sub Dimensi Skala Prioritas

Pada Sub Dimensi skala prioritas, penilaian didasarkan pada ada atau tidaknya dokumentasi skala prioritas TIK yang jelas dan telah terlaksana dengan baik.

4.1.7.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.19 Penilaian Sub Dimensi Skala Prioritas di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Skala Prioritas	Adanya penentuan skala prioritas dalam kebijakan TIK.	2 (Kurang)	Terdapat skala prioritas penerapan TIK, tetapi isinya masih kurang jelas.

Dari kuisisioner (Lampiran C) dan wawancara (Lampiran D) yang dilakukan, diketahui skala prioritas Dinas Kominfo pada tahun berjalan saat ini adalah:

- Optimalisasi layanan smart city yang dinamakan Batu Among Tani Teknologi, yang terdiri dari 4 aplikasi pelayanan publik yaitu Among Warga, Among Tani, Among Kota dan Among Warga Petugas
- Pengembangan e-government melalui integrasi 9 aplikasi yaitu E-Planning, E-Budgeting, SIMDA, Sikomar, E-Project Planning, SAKIP, SMEP, E-Musrenbang dan E-Delivery.

Prioritas penerapan TIK telah terdokumentasi, namun masih kurang jelas. Dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, contohnya optimalisasi layanan *smart city* melalui 4 aplikasi, dari observasi yang dilakukan, masing masing aplikasi belum dimanfaatkan secara penuh oleh pengguna, bisa dilihat dari jumlah pengunduh yang masih sedikit, berkisar antara 100 hingga 500 pengunduh saja sejak diluncurkan pada akhir Desember 2017. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.1.7.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.20 Penilaian Sub Dimensi Skala Prioritas di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Skala Prioritas	Adanya penentuan skala prioritas dalam kebijakan TIK.	2 (Kurang)	Terdapat skala prioritas penerapan TIK, tetapi isinya masih kurang jelas

Dari wawancara (Lampiran F) yang dilakukan, diketahui bahwa skala prioritas Bapelitbangda Kota Batu pada tahun berjalan saat ini adalah:

- Pengembangan (pembuatan dan pemanfaatan) E-Planning sebagai salah satu sub sistem pendukung *e-government*.
- Pembuatan website yang direncanakan sebagai portal induk dalam bidang perencanaan, sebagai media pelayanan public.

Bentuk dokumentasi skala prioritas ini masih dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belum ada dokumentasi teknis khusus prioritas penerapan TIK. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.1.7.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.21 Penilaian Sub Dimensi Skala Prioritas di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Skala Prioritas	Adanya penentuan skala prioritas dalam kebijakan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi skala prioritas penerapan TIK.

Berdasarkan wawancara (Lampiran G) yang dilakukan, saat ini belum ada skala prioritas pengembangan TIK di lingkungan Dinas Pertanian, prioritas pelaksanaan kegiatan TIK hanya mengikuti kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, karena sebagai SOPD teknis, Dinas Pertanian hanya sebagai pelaksana saja.

4.1.8 Sub Dimensi Manajemen Risiko/Evaluasi TIK

Pada Sub Dimensi manajemen resiko/evaluasi TIK, penilaian didasarkan pada ada atau tidaknya kegiatan evaluasi/manajemen resiko TIK yang dilakukan secara terstruktur.

4.1.7.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.22 Penilaian Sub Dimensi manajemen resiko/evaluasi TIK di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Manajemen Resiko/Evaluasi TIK	Adanya evaluasi internal dan independent.	3 (Baik)	Terdapat kegiatan evaluasi/manajemen resiko TIK, secara terstruktur, tetapi belum dilaksanakan secara reguler.

Saat ini belum terdapat kegiatan manajemen risiko di Dinas Kominfo Kota Batu. Namun telah ada kegiatan evaluasi pemanfaatan TIK di Kota Batu, yang dilakukan oleh Tim Evaluator SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) yang terdiri dari BAPELITBANGDA, BKD, BKPSDM, Diskominfo, Bagian Organisasi, Inspektorat, Bagian Layanan Pengadaan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip) yang dilakukan secara rutin dan terdokumentasi. Kegiatan evaluasi TIK mengikuti kegiatan evaluasi SPBE yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dinas Kominfo telah memiliki kegiatan evaluasi TIK yang terstruktur dan dilaksanakan secara regular, namun belum memiliki kegiatan manajemen risiko. Sehingga nilai untuk sub dimensi peraturan adalah 3 (baik). Manajemen risiko TIK penting untuk mencegah terjadinya risiko atau kejadian yang berakibat fatal yang dapat mengganggu aktifitas pemerintahan.

4.1.7.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.23 Penilaian Sub Dimensi manajemen risiko/evaluasi TIK di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Manajemen Risiko/Evaluasi TIK	Adanya evaluasi internal dan independent.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada kegiatan evaluasi/manajemen risiko TIK.

Dari kuisioner yang diisi oleh narasumber, diketahui bahwa saat ini belum ada mekanisme evaluasi yang disepakati di lingkungan Bapelitbangda Kota Batu. Yang sudah dilakukan hanya berupa pengukuran secara spasial apakah suatu sistem TIK yang digunakan telah mencapai output yang maksimal, yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.1.7.3. Dinas Pertanian

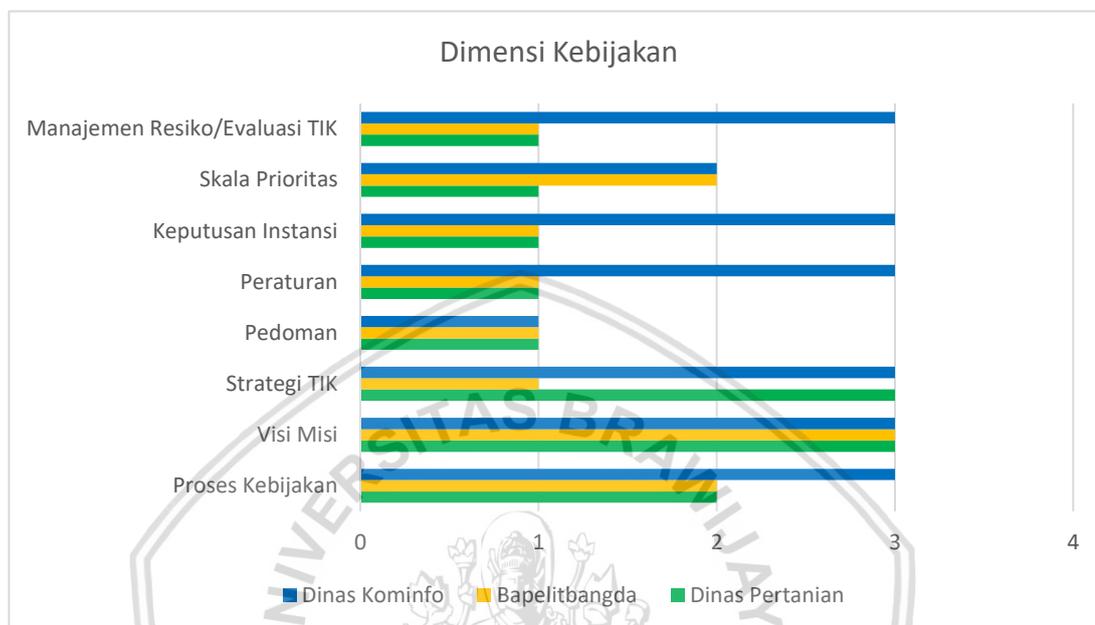
Tabel 4.24 Penilaian Sub Dimensi manajemen risiko/evaluasi TIK di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Manajemen Risiko/Evaluasi TIK	Adanya evaluasi internal dan independent.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada kegiatan evaluasi/manajemen risiko TIK.

Evaluasi pengembangan penerapan e-government di Dinas Pertanian berupa evaluasi secara spasial oleh unit atau badan terkait, seperti evaluasi oleh BKD, Ekbang dan BKPSDM. Sedangkan pemeliharaan terkait infrastruktur baik aset TIK maupun non TIK dilakukan oleh unit khusus Pengurus Barang Pengguna. Namun belum ada kegiatan manajemen risiko yang diterapkan. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.1.9 Hasil Penilaian Dimensi Kebijakan

Hasil penilaian keseluruhan sub dimensi dari dimensi kebijakan ditampilkan dalam bentuk grafik batang dan tabel penilaian dibawah ini. Sumbu x menunjukkan rentang nilai setiap sub dimensi, mulai dari 1 (sangat kurang) – 4 (baik sekali) dan sumbu y yang berisi seluruh sub dimensi dari dimensi kebijakan.



Gambar 4.1 Grafik Penilaian Dimensi Kebijakan

Tabel 4.25 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Kebijakan

No.	Sub Dimensi	Penilaian		
		Dinas Kominfo	Bapelitbangda	Dinas Pertanian
1.	Proses Kebijakan	3	2	2
2.	Visi Misi Berkaitan dengan TIK	3	3	3
3.	Strategi Penerapan	3	1	1
4.	Pedoman	1	1	1
5.	Peraturan	3	1	1
6.	Keputusan Instansi	3	1	1
7.	Skala Prioritas	2	2	1
8.	Evaluasi/Manajemen Risiko TIK	3	1	1
Rata Rata		2,6 (Baik)	1,5 (Sangat Kurang)	1,4 (Sangat Kurang)

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI), didapatkan nilai rata rata untuk dimensi kebijakan pada Dinas Kominfo adalah 2,6 yang berarti baik, 1,5 untuk Bapelitbangda yang berarti sangat kurang dan 1,4 untuk Dinas Pertanian yang berarti sangat kurang.

4.2 Penilaian Dimensi Kelembagaan

Penilaian dimensi kelembagaan bertujuan untuk untuk keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. Penjabaran hasil dan analisis dimensi kelembagaan ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi sub dimensi dari dimensi kelembagaan, indikator yang menjadi fokus penilaian, dan nilai kondisi antara 1 (sangat kurang) hingga 4 (baik sekali) dengan keterangan dari nilai kondisi tersebut, berdasarkan pedoman penilaian PeGI (Lampiran A).

4.2.1 Sub Dimensi Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif

Penilaian Sub Dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif didasarkan atas keberadaan unit yang mengelola TI dengan struktur yang jelas, merupakan unit sendiri dan memiliki wewenang yang tinggi.

4.2.1.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.26 Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif	Adanya bagian organisasi yang sudah beroperasi secara resmi.	4 (Baik Sekali)	Ada unit yang mengelola TI yang jelas strukturnya dan merupakan unit tersendiri serta memiliki wewenang yang tinggi.

Dari wawancara (Lampiran D) yang dilakukan, dijelaskan bahwa hampir seluruh bagian organisasi Dinas Kominfo Kota Batu bertanggung jawab dalam tugas pelaksanaan TIK, berdasarkan Peraturan Walikota Batu No. 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu diantaranya Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi, Bidang Komunikasi, Bidang Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Aplikasi, dan Bidang Statistik dan Persandian. Setiap bagian organisasi dalam Dinas Kominfo menjalankan fungsi pengelolaan teknologi dan informasi dalam pemerintahan Kota Batu. Sehingga nilai untuk sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif adalah 4 (baik sekali).

4.2.1.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.27 Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif	Adanya bagian organisasi yang sudah beroperasi secara resmi.	2 (Kurang)	Unit yang mengelola TI masih merupakan bagian dari unit lain (tidak berdiri sendiri) serta memiliki wewenang yang terbatas.

Dari wawancara (Lampiran F) yang dilakukan oleh narasumber, tidak ada bidang yang khusus mengelola TIK di Bapelitbangda Kota Batu, yang ada adalah Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi, yang berfungsi untuk melakukan pengkajian dan penelitian terkait pemanfaatan TIK. Sedangkan tugas pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagian besar ada di Dinas Kominfo Kota Batu. Sehingga nilai untuk dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.2.1.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.28 Penilaian sub dimensi keberadaan struktur organisasi yang efektif di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif	Adanya bagian organisasi yang sudah beroperasi secara resmi.	2 (Kurang)	Unit yang mengelola TI masih merupakan bagian dari unit lain (tidak berdiri sendiri) serta memiliki wewenang yang terbatas.

Dilihat dari struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Batu, tidak ada bagian atau unit khusus yang bertugas dalam pengelolaan TIK. Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran G), pengelolaan TIK hanya dilakukan oleh Pengurus Badan Pengguna yang berfungsi melakukan pengelolaan seluruh aset baik aset TIK maupun non TIK sebanyak lebih kurang 2 orang dengan kedudukan sebagai staff. Karena belum adanya unit khusus yang melakukan tugas pengelolaan TIK di lingkungan Dinas Pertanian Kota Batu, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.2.2 Sub Dimensi Tugas dan Fungsi

4.2.2.1. Dinas Kominfo

Penilaian Sub Dimensi tugas dan fungsi didasarkan atas keberadaan unit yang mengelola TI dengan struktur yang jelas, merupakan unit sendiri dan memiliki wewenang yang tinggi.

Tabel 4.29 Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Tugas dan Fungsi	Dokumentasi yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit unit kerja didalamnya.	3 (Baik)	Ada tupoksi yang jelas/lengkap namun belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan observasi mengenai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan TIK, Dinas Kominfo telah memiliki tupoksi yang lengkap. Tugas tersebut diatur dalam Perwali no. 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batu. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal, salah satunya karena kurangnya SDM dengan latar belakang TIK di Dinas Kominfo Kota Batu. Sehingga nilai untuk sub dimensi tugas dan fungsi adalah 3 (baik).

4.2.2.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.30 Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi Di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Tugas dan Fungsi	Dokumentasi yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit unit kerja didalamnya.	2 (Kurang)	Ada tugas dan fungsi yang berkaitan dengan TIK namun belum lengkap.

Dari wawancara (Lampiran F) dan jawaban dari kuisisioner (Lampiran E) yang diberikan, diketahui bahwa belum ada tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan TIK di lingkungan Bapelitbangda Kota batu. Yang ada hanya fungsi pengkajian dan penelitian terkait pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi. Karena belum adanya tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan TIK, maka nilai untuk dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.2.2.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.31 Penilaian sub dimensi tugas dan fungsi di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Tugas dan Fungsi	Dokumentasi yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit unit kerja didalamnya.	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan lengkap berkaitan dengan TIK.

Berdasarkan Peraturan Walikota No.84 tahun 2016, telah ada tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap bagian atau unit di lingkungan Dinas Pertanian Kota Batu dalam lingkup urusan pertanian, namun belum ada tugas dan fungsi untuk unit tertentu yang khusus berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan TIK. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.2.3 Sub Dimensi Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang Lengkap dan Terdokumentasi

Penilaian Sub Dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi didasarkan atas ada atau tidaknya SOP berkaitan dengan TIK yang jelas, terdokumentasi dan telah dilakukan evaluasi dan revisi secara periodik.

4.2.3.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.32 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Ketersediaan Sistem Dan Prosedur Kerja Yang Lengkap Dan Terdokumentasi	Dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur tata cara kerja dan peraturan pelaksanaan tugas atau kegiatan TIK.	2 (Kurang)	SOP yang berkaitan dengan TIK belum lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.

Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa Dinas Kominfo telah memiliki beberapa prosedur kerja terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan TIK. Namun seluruh prosedur kerja baru mengakomodir kegiatan TIK yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan saja (Lampiran H), sehingga belum menyeluruh. Nilai untuk sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi adalah 2 (kurang).

4.2.3.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.33 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Ketersediaan Sistem Dan Prosedur Kerja Yang Lengkap dan Terdokumentasi	Dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur tata cara kerja dan peraturan pelaksanaan tugas atau kegiatan TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki SOP yang berkaitan dengan TIK.

Dari kusioner (Lampiran E) yang telah diisi oleh narasumber, diketahui bahwa Bapelitbangda Kota Batu telah memiliki beberapa SOP, seperti sistem/prosedur perencanaan, sistem/prosedur pengelolaan keuangan, namun belum ada SOP/prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas TIK. Sehingga nilai untuk dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.2.3.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.34 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Ketersediaan Sistem Dan Prosedur Kerja Yang Lengkap dan Terdokumentasi	Dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur tata cara kerja dan peraturan pelaksanaan tugas atau kegiatan TIK.	2 (Kurang)	SOP yang berkaitan dengan TIK belum lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran G), sudah ada SOP berkaitan dengan TIK di Dinas Pertanian Kota Batu, terutama dalam penggunaan aplikasi aplikasi tertentu, namun belum ada dokumentasi khusus. Prosedur kerja masih berupa petunjuk yang diberikan kepada pengguna pada saat pelatihan penggunaan aplikasi. Contohnya prosedur kerja penggunaan fasilitas *workstation* untuk memperbaharui data di *command center* Kota Batu.

4.2.4 Sub Dimensi Ketersediaan SDM dengan Jumlah dan Tingkat Kompetensi yang Sesuai

Penilaian Sub Dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai didasarkan atas telah tersedia atau tidaknya SDM dengan kompetensi TIK yang memadai.

4.2.4.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.35 Penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Ketersediaan SDM Dengan Jumlah Dan Tingkat Kompetensi Yang Sesuai	Inventarisasi atau pendataan tenaga kerja yang lengkap.	2 (Kurang)	Memiliki SDM yang memiliki kemampuan TI namun jumlahnya terbatas.

Jumlah keseluruhan pegawai di Dinas Kominfo adalah 65 orang. Pegawai dengan latar belakang TIK adalah 3 orang. Dengan latar belakang pendidikan: 1 orang lulusan SD, 1 orang lulusan SLTP, 20 orang lulusan SMA atau sederajat, 5 orang lulusan D3, 1 orang lulusan D1, 25 orang lulusan S1 dan 12 orang lulusan S2. Dari wawancara yang dilakukan (Lampiran D), diketahui bahwa jumlah SDM dengan kompetensi TIK belum memenuhi kegiatan operasional harian di Dinas Kominfo Kota Batu. Sehingga nilai untuk sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai adalah 2 (kurang).

4.2.4.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.36 Penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Ketersediaan SDM Dengan Jumlah Dan Tingkat Kompetensi Yang Sesuai	Inventarisasi atau pendataan tenaga kerja yang lengkap.	3 (Baik)	Memiliki SDM yang memiliki kemampuan TI dengan jumlah dan kualitas yang memadai untuk saat ini.

Secara keseluruhan, terdapat 55 orang SDM di lingkungan Bapelitbangda Kota Batu, namun SDM dengan latar belakang IT hanya berjumlah 4 orang saja. Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran F), jumlah SDM berlatar belakang IT yang hanya 4 orang ini cukup untuk kebutuhan saat ini, namun tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan TIK pada tahun tahun mendatang. Terutama ketika penerapan kebijakan penggunaan TIK diberlakukan secara penuh sesuai dengan target pada tahun 2018.

4.2.4.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.37 Penilaian sub dimensi ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Ketersediaan SDM Dengan Jumlah Dan Tingkat Kompetensi Yang Sesuai	Inventarisasi atau pendataan tenaga kerja yang lengkap.	2 (Kurang)	Memiliki SDM dengan kemampuan TI namun jumlahnya terbatas.

Secara keseluruhan, terdapat 180 orang SDM di lingkungan Dinas Pertanian Kota Batu. Sedangkan SDM dengan kemampuan IT merupakan pegawai harian lepas yang berjumlah 24 orang yang tersebar di berbagai desa di Kota Batu untuk melakukan pendampingan kepada petani dalam pemanfaatan aplikasi Among Tani. Dari wawancara yang dilakukan (Lampiran G), diketahui bahwa jumlah SDM dengan kemampuan TIK saat ini masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kota Batu, mengingat sebagian besar mata masyarakat Kota Batu berprofesi sebagai Petani.

4.2.5 Sub Dimensi Pengembangan SDM TIK

Penilaian Sub Dimensi Pengembangan SDM TIK didasarkan atas ada atau tidaknya program pengembangan yang terencana dan sudah dilaksanakan dengan baik.

4.2.5.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.38 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pengembangan SDM TIK	Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK.	3 (Baik)	Memiliki program pengembangan SDM TIK yang terencana namun belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara (Lampira D dan Lampiran G) yang dilakukan dengan narasumber, salah satu kegiatan pengembangan SDM TIK yang pernah dilaksanakan adalah pelatihan pengembangan aplikasi *smart city* Bersama Dinas Pertanian yang bekerja sama dengan IBM, UB dan ITS, pelatihan ini ditujukan kepada pegawai harian lepas yang direkrut khusus untuk pengembangan *smart*

city di Kota Batu. Selain itu, Sebagian kegiatan pengembangan lainnya hanya mengikuti penawaran kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti diklat, bimbingan teknis dan lainnya. Sehingga nilai untuk sub dimensi pengembangan SDM TIK adalah 3 (baik).

4.2.5.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.39 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pengembangan SDM TIK	Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK.	1 (Sangat Kurang)	Memiliki program pengembangan SDM TIK namun masih bersifat <i>ad hoc</i> dan terbatas.

Berdasarkan jawaban dari wawancara (Lampiran F) yang dilakukan, belum ada program pelatihan pengembangan *skill* SDM berkaitan dengan TIK di lingkungan Bapelitbangda Kota Batu. Namun telah ada perencanaan untuk mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi *e-planning* dengan jumlah peserta 100 orang.

4.2.5.3. Dinas Pertanian

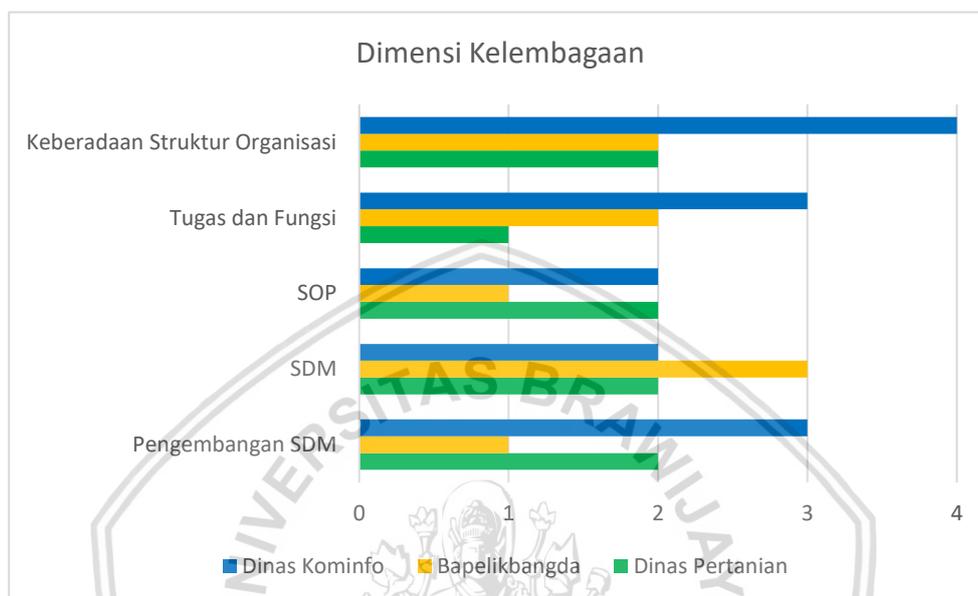
Tabel 4.40 Penilaian sub dimensi ketersediaan sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pengembangan SDM TIK	Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK.	2 (Kurang)	Memiliki program pengembangan SDM TIK namun masih bersifat <i>ad hoc</i> dan terbatas.

Dari wawancara yang dilakukan (Lampiran G), pada tahun 2017 telah dilakukan program pelatihan penggunaan aplikasi *smart city* bekerjasama dengan IBM, UB dan ITS. Program pelatihan dilakukan terhadap 24 orang pegawai harian lepas Dinas Pertanian yang direkrut khusus untuk program pengembangan *smart city*. Program ini dilaksanakan bersama dengan Dinas Kominfo.

4.2.6 Hasil Penilaian Dimensi Kelembagaan

Hasil penilaian keseluruhan sub dimensi dari dimensi kelembagaan ditampilkan dalam bentuk grafik batang dan tabel penilaian dibawah ini. Sumbu x menunjukkan rentang nilai setiap sub dimensi, mulai dari 1 (sangat kurang) – 4 (baik sekali) dan sumbu y yang berisi seluruh sub dimensi dari dimensi kelembagaan.



Gambar 4.2 Grafik Penilaian Dimensi Kelembagaan

Tabel 4.41 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Kelembagaan

No.	Sub Dimensi	Penilaian		
		Dinas Kominfo	Bapelitbangda	Dinas Pertanian
1.	Keberadaan Struktur Organisasi Efektif	4	2	2
2.	Tugas dan Fungsi	3	2	1
3.	Ketersediaan SOP	2	1	2
4.	Ketersediaan SDM	2	3	2
5.	Pengembangan SDM	3	1	2
Rata Rata		2,8 (Baik)	1,8 (Kurang)	1,8 (Kurang)

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI), didapatkan nilai rata rata untuk dimensi kelembagaan pada Dinas Kominfo adalah 2,8 yang berarti baik, 1,8 untuk Bapelitbangda yang berarti kurang dan untuk Dinas Pertanian 1,8 yang berarti kurang.

4.3 Penilaian Dimensi Infrastruktur

Penilaian dimensi infrastruktur didasarkan atas keberadaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan *e-government* dan pemanfaatannya di Dinas Kominfo Kota Batu. Penjabaran hasil dan analisis dimensi infrastruktur ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi sub dimensi dari dimensi infrastruktur, indikator yang menjadi fokus penilaian, dan nilai kondisi antara 1 hingga 4 dengan keterangan dari nilai kondisi tersebut, berdasarkan pedoman penilaian PeGI (Lampiran A).

4.3.1 Sub Dimensi *Data Center*

Pada Sub Dimensi *data center* penilaian didasarkan pada ada atau tidaknya *data center* di instansi terkait, pemeliharaan, dukungan integrasi dan adanya aplikasi pendukung yang memadai.

4.3.1.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.42 Penilaian Sub Dimensi *Data Center* di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
<i>Data Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC). • Piranti keras server, sistem operasi, aplikasi pendukung. • Fasilitas Pendukung. • Pemeliharaan, pengelolaan dan keamanan. 	1 (Kurang)	Tidak memiliki <i>data center</i>

Berdasarkan kuisisioner yang diisi oleh narasumber (Lampiran C) yang dilakukan, *data center* yang terdapat di Balaikota Among Tani Kota Batu masih berupa ruang server dimana server-server yang dibutuhkan oleh setiap SOPD di Balaikota Among Tani dikumpulkan. Terdapat server dengan tipe *rockmount* sebanyak 14 server dan *tower* sebanyak 4 server. Sistem operasi yang digunakan berbeda beda sesuai kebutuhan, namun didominasi oleh Sistem Operasi Linux CentOS. Ruang server berada di Gedung A lantai 5 di Balaikota Among Tani, kinerjanya dibantu dengan 2 *routermain* mikrotik 1009 dan 1036. Suhu dijaga kestabilan dengan 2 buah AC. Pemeliharaan dilakukan oleh UPT BAT. Kepemilikan server adalah milik masing masing SOPD. Nilai 1 (sangat kurang) diberikan karena secara keseluruhan, belum ada *data center* di Pemerintah Kota Batu. Dari pengumpulan server yang dilakukan, belum ada proses integrasi, belum ada

dukungan dari aplikasi tertentu dan juga belum memiliki *disaster recovery center* (DRC).

4.3.1.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.43 Penilaian Sub Dimensi *Data Center* di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
<i>Data Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Data Center dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC). • Piranti keras server, sistem operasi, aplikasi pendukung. • Fasilitas Pendukung. • Pemeliharaan, pengelolaan dan keamanan. 	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki <i>data center</i>

Berdasarkan observasi dan wawancara (Lampiran F) yang dilakukan, data center yang ada hanya pengumpulan server di satu tempat. Tidak ada mekanisme integrasi sistem, belum ada dukungan dari aplikasi tertentu dan juga belum memiliki *disaster recovery center* (DRC).

4.3.1.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.44 Penilaian Sub Dimensi *Data Center* di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
<i>Data Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Data Center dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC). • Piranti keras server, sistem operasi, aplikasi pendukung. • Fasilitas Pendukung. • Pemeliharaan, pengelolaan dan keamanan. 	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki <i>data center</i>

Sama seperti Dinas Pertanian dan Bapelitbangda, data center masih berupa server server yang dikumpulkan di ruang server Balaikota Among Tani Kota Batu.

Namun belum ada integrasi dan aplikasi yang memadai untuk menunjang kinerja. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.3.2 Sub Dimensi Jaringan Data

Penilaian Sub Dimensi jaringan data didasarkan pada ketersediaan infrastruktur jaringan data dan layanan yang terdapat pada Dinas Kominfo dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi.

4.3.2.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.45 Penilaian Sub Dimensi Jaringan Data di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Jaringan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan jaringan komputer: UTP, coax, fiber, wireless. • Cakupan jaringan dalam organisasi. • Ketersediaan perangkat keras dan lunak. • Ketersediaan akses internet. • <i>Service delivery channel</i>: web, email, telepon/smart phone, sms dll. 	3 (Baik)	Memiliki infrastruktur jaringan, adanya kemudahan akses pada user serta penggunaan dan kapasitas layanannya sudah cukup memadai

Berdasarkan hasil kuisisioner (Lampiran C), Kota Batu memiliki jaringan data yang terpusat melalui jaringan intranet di Gedung Balaikota Among Tani. Jaringan terhubung antar gedung melalui panel jaringan di masing-masing gedung. Jaringan antar gedung tersebut menghubungkan antar SOPD. Untuk jaringan internet, selain tersebar ke masing-masing SOPD di setiap Gedung melalui *access point* dan kabel, jaringan internet telah tersebar sampai 27 titik di seluruh desa, kelurahan dan kecamatan se-Kota Batu. Nilai 3 (baik) diberikan karena infrastruktur jaringan yang ada telah cukup baik dan dapat memberikan kemudahan akses kepada pengguna, namun belum ada *back up* layanan jika terdapat gangguan.

4.3.2.1. BAPELITBANGDA

Tabel 4.46 Penilaian Sub Dimensi Jaringan Data di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Jaringan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan jaringan komputer: UTP, coax, fiber, wireless. • Cakupan jaringan dalam organisasi. • Ketersediaan perangkat keras dan lunak. 	3 (Baik)	Memiliki infrastruktur jaringan, adanya kemudahan akses pada user serta penggunaan dan kapasitas layanannya

Tabel 4.47 Penilaian Sub Dimensi Jaringan Data di Bapelitbangda (lanjutan)

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan akses internet. • <i>Service delivery channel: web, email, telepon/smart phone, sms dll.</i> 		sudah cukup memadai.
--	--	--	----------------------

Bapelitbangda Kota Batu memiliki jaringan data yang terpusat melalui jaringan intranet di Gedung Balaikota Among Tani. Jaringan terhubung antar gedung melalui panel jaringan di masing-masing gedung. Jaringan antar gedung tersebut menghubungkan antar SOPD. Namun, dari hasil wawancara diketahui bahwa jaringan antar gedung dan *bandwith* yang ada masih kurang maksimal.

4.3.2.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.48 Penilaian Sub Dimensi Jaringan Data di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Jaringan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan jaringan komputer: UTP, <i>coax</i>, <i>fiber</i>, <i>wireless</i>. • Cakupan jaringan dalam organisasi. • Ketersediaan perangkat keras dan lunak. • Ketersediaan akses internet. • <i>Service delivery channel: web, email, telepon/smart phone, sms dll.</i> 	3 (Baik)	Memiliki infrastruktur jaringan, adanya kemudahan akses pada user serta penggunaan dan kapasitas layanannya sudah cukup memadai.

Jaringan data Dinas Pertanian terhubung dengan jaringan intranet di Gedung Balaikota Among Tani. Dari hasil wawancara, jaringan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada gangguan jaringan salah satunya karena *bandwith* yang kurang maksimal. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.3.3 Sub Dimensi Keamanan

Penilaian pada Sub Dimensi keamanan berdasarkan ada atau tidaknya mekanisme keamanan yang terencana dengan baik di lingkungan instansi terkait.

4.3.3.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.49 Penilaian Sub Dimensi Kemanan di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Piranti keras dan piranti lunak pengamanan sistem informasi. • Ketersediaan kebijakan/prosedur pengamanan sistem informasi. • Internet sehat dan aman. 	2 (Kurang)	Sudah memiliki mekanisme keamanan, namun belum terencana dengan baik.

Pengelolaan aspek keamanan informasi di Dinas Kominfo dijelaskan pada Peraturan Walikota no. 78 tahun 2017 tentang “Master Plan Batu Smart City”. Dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan mengenai *blue print* keamanan jaringan dan sistem informasi, *DRP (Disaster Recovery Planning)* dan *SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)*. Namun dalam pelaksanaannya, mekanisme keamanan informasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sejauh ini, mekanisme keamanan hanya mengandalkan antivirus untuk mencegah kerusakan data oleh virus dan belum ada mekanisme kemanan yang dilakukan secara periodik. Kedepan, akan diberlakukan kerangka kerja Sistem Manajemen Kemanan Informasi (SMKI) untuk mencapai keamanan yang maksimal. Sehingga penilaian untuk sub dimensi keamanan adalah 2 (kurang).

4.3.3.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.50 Penilaian Sub Dimensi Kemanan di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Piranti keras dan piranti lunak pengamanan sistem informasi. • Ketersediaan kebijakan/prosedur pengamanan sistem informasi. • Internet sehat dan aman. 	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki mekanisme keamanan informasi.

Saat ini belum ada mekanisme keamanan informasi yang diterapkan, tata kelola keamanan informasi terdapat pada masing masing bidang yang memiliki data terkait. Dalam pelaksanaannya, mekanisme keamanan informasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga penilaian untuk Sub Dimensi keamanan adalah 1 (sangat kurang).

4.3.3.2. Dinas Pertanian

Tabel 4.51 Penilaian Sub Dimensi Keamanan di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Piranti keras dan piranti lunak pengamanan sistem informasi. • Ketersediaan kebijakan/prosedur pengamanan sistem informasi. • Internet sehat dan aman. 	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki mekanisme keamanan informasi.

Dari hasil wawancara (Lampiran G), belum ada mekanisme keamanan secara teknis yang diterapkan di Dinas Pertanian. Keamanan informasi lebih kepada hal hal yang bersifat penyebaran informasi. Keamanan Informasi di Dinas Pertanian dilakukan melalui perjanjian keamanan yang dibuat dengan Dinas Kominfo, seperti apakah suatu informasi bersifat publik yang boleh dibuka untuk masyarakat atau hanya menjadi bahan informasi internal Pemerintahan Kota Batu. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (Sangat Kurang).

Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK

Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK didasarkan pada ada atau tidaknya fasilitas pendukung infrastruktur TIK yang memadai dan terencana dengan baik. Penilaian sub dimensi pendukung infrastruktur TIK ditunjukkan dalam Tabel 4.19.

4.3.4.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.52 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK	Fasilitas pendukung seperti: pendeteksi asap, pemadam api, akses control,	2 (Kurang)	Mempunyai fasilitas pendukung namun kurang memadai.

Tabel 4.53 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Dinas Kominfo (lanjutan)

	Kamera, cctv, sistem panel, backup, ups, interferensi suhu, kelembaban dll.		
--	---	--	--

Fasilitas pendukung yang dimiliki di ruang server Pemerintah Kota Batu berupa AC untuk mengatur suhu, pemadam api, cctv untuk keamanan dan kunci keamanan standar. Sedangkan untuk ruangan Dinas Kominfo sendiri memiliki fasilitas standar perkantoran. Dari hasil wawancara, masih terdapat kekurangan terutama dalam hal infrastruktur TIK, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.3.4.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.54 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK	Fasilitas pendukung seperti: pendeteksi asap, pemadam api, akses control, kamera, cctv, sistem panel listrik, backup, ups, interferensi suhu, kelembaban dll.	2 (Kurang)	Mempunyai fasilitas pendukung namun kurang memadai.

Fasilitas pendukung TIK yang ada di Bapelitbangda berupa standar fasilitas perkantoran, seperti AC untuk mengatur suhu, cctv untuk keamanan dan kunci keamanan standar. Sedangkan fasilitas pendukung server yang dimiliki mengikuti kebijakan dari Dinas Kominfo.

4.3.4.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.55 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK	Fasilitas pendukung seperti: pendeteksi asap, pemadam api, akses control,	2 (Kurang)	Mempunyai fasilitas pendukung



Tabel 4.56 Penilaian Sub Dimensi Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK di Dinas Pertanian (lanjutan)

	kamera, cctv, sistem panel listrik , backup, ups, interferensi suhu, kelembaban dll.		namun kurang memadai.
--	--	--	-----------------------

Fasilitas pendukung TIK yang ada di Dinas Pertanian berupa standar fasilitas perkantoran, seperti AC untuk mengatur suhu, cctv untuk keamanan dan kunci keamanan standar. Sedangkan fasilitas pendukung server yang dimiliki mengikuti kebijakan dari Dinas Kominfo.

4.3.4 Sub Dimensi *Disaster Recovery*

Penilaian Sub Dimensi *disaster recovery* didasarkan kepada ada atau tidaknya dokumen *disaster recovery* yang dievaluasi dan direvisi secara periodik.

4.3.5.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.57 Penilaian Sub Dimensi *disaster recovery* di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
<i>Disaster Recovery</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mitigasi dan rencana penanggulangan insiden Fasilitas DRC Proses replikasi 	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki dokumen <i>disaster recovery</i>

Rencana pemulihan bencana telah diatur dalam Peraturan Walikota no. 78 tahun 2017 tentang “Master Plan Batu Smart City”. Dalam bagian “Cetak Biru DRP (*Disaster Recovery Plan*) atau Rencana Pemulihan Pasca Bencana” telah dijabarkan mulai dari perencanaan DRP hingga proses pengujian. Nilai 1 (sangat kurang) diberikan karena Dinas Kominfo Kota Batu belum memiliki dokumen khusus mengenai *disaster recovery* dan juga belum memiliki *disaster recovery center*. Kegiatan mitigasi bencana juga belum diterapkan, penanggulangan akan dilakukan hanya jika terjadi suatu bencana atau kerusakan tertentu (*ad hoc*). Karena belum adanya dokumen dan mekanisme pemulihan bencana, nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.3.5.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.58 Penilaian Sub Dimensi *disaster recovery* di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
<i>Disaster Recovery</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi dan rencana penanggulangan insiden • Fasilitas DRC • Proses replikasi 	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki dokumen <i>disaster recovery</i>

Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa saat ini belum ada mekanisme penanggulangan bencana (*disaster recovery*) di Bapelitbangda Kota Batu, secara teknis, hanya melakukan *back up* data pada komputer lokal. Sehingga, nilai untuk sub dimensi *disaster recovery* untuk Bapelitbangda adalah 1 (sangat kurang).

4.3.5.2. Dinas Pertanian

Tabel 4.59 Penilaian Sub Dimensi *disaster recovery* di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
<i>Disaster Recovery</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi dan rencana penanggulangan insiden • Fasilitas DRC • Proses replikasi 	1 (Sangat Kurang)	Tidak memiliki dokumen <i>disaster recovery</i>

Saat ini belum ada mekanisme penanggulangan bencana yang dilakukan di Dinas Pertanian, mitigasi dan rencana penanggulangan bencana mengandalkan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Dinas Kominfo. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.3.5 Sub Dimensi Pemeliharaan TIK

Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK berdasarkan apakah telah dilakukan pemeliharaan dengan baik dan rutin terhadap aset aset TIK yang dimiliki.

4.3.6.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.60 Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pemeliharaan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur (h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung, dll). • Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan. • Ketersediaan <i>redundant</i> sistem saat perawatan. 	3 (Baik)	Pemeliharaan infrastruktur TIK sudah dilakukan dengan baik, namun belum dilakukan secara rutin.

Dari kuisisioner yang diisi (Lampiran C), diketahui bahwa pemeliharaan infrastruktur TIK dianggarkan setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan usulan perencanaan pada tahun sebelumnya. Sumber daya manusia yang dialokasikan untuk melaksanakan pemeliharaan adalah 8 orang dari Dinas Kominfo yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga tergantung kerumitan pemeliharaan atau perbaikan. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 adalah sebanyak Rp. 88.435.200. Nilai 3 (baik) diberikan karena dalam pelaksanaannya, pemeliharaan cenderung dilakukan ketika terjadi gangguan atau kerusakan saja, sehingga tidak terjadwal dan juga belum tersedianya *redundant* sistem dalam perawatan.

4.3.6.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.61 Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pemeliharaan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur (h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung, dll). • Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan. • Ketersediaan <i>redundant</i> sistem saat perawatan. 	2 (Kurang)	Pemeliharaan infrastruktur TIK belum dilakukan dengan baik.



Dari kuisisioner yang diisi oleh narasumber (Lampiran E), diketahui bahwa saat ini tidak ada strategi pemeliharaan infrastruktur di lingkungan Bapelitbangda Kota Batu. Pemeliharaan hanya dilakukan jika terjadi kerusakan/bencana (*maintenance by accident*), jika tidak ada masalah cenderung tidak ada pemeliharaan yang dilakukan. Ketika terjadi masalah, perbaikan dilakukan secara mandiri atau melalui pihak ke 3 jika dirasa sulit dan tidak ada perencanaan anggaran yang dilakukan, anggaran juga bersifat situasional.

4.3.6.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.62 Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pemeliharaan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur (h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung, dll). • Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan. • Ketersediaan <i>redundant</i> sistem saat perawatan. 	3 (Baik)	Pemeliharaan infrastruktur TIK sudah dilakukan dengan baik, namun belum dilakukan secara rutin.

Pemeliharaan aset TIK di Dinas Pertanian dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna untuk keseluruhan aset termasuk aset TIK dan Dinas Kominfo untuk pemeliharaan sistem sistem yang terintegrasi.

4.3.6 Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK

Penilaian Sub Dimensi pemeliharaan TIK berdasarkan apakah kegiatan inventarisasi peralatan TIK sudah terdokumentasi dan dilakukan secara periodik.

4.3.7.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.63 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Inventarisasi Peralatan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan manajemen aset (risk manajemen). • Pemahaman tentang inventarisasi. • Pemahaman tentang <i>asset life cycle</i> 	2 (Kurang)	Kegiatan inventarisasi peralatan TIK belum terdokumentasi dengan baik.



Tabel 4.64 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Dinas Kominfo (lanjutan)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan inventarisasi dan manajemen aset • SOP 		
--	---	--	--

Saat ini, belum ada sistem inventarisasi khusus yang diterapkan. Kegiatan inventarisasi masih berupa inventarisasi seluruh aset aset yang ada, baik aset TIK maupun non TIK sehingga tidak maksimal. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan melalui sistem pengelolaan barang dan aset daerah oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Karena belum ada kegiatan inventarisasi khusus terhadap aset-aset TIK yang dilakukan, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.3.7.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.65 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Inventarisasi Peralatan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan manajemen aset (risk manajemen). • Pemahaman tentang inventarisasi. • Pemahaman tentang <i>asset life cycle</i> • Kebijakan inventarisasi dan manajemen aset • SOP 	2 (Kurang)	Kegiatan inventarisasi peralatan TIK belum terdokumentasi dengan baik.

Dari wawancara diketahui bahwa belum ada sistem tata kelola infrastruktur TIK di lingkungan Bapelitbangda Kota Batu, yang ada hanya sistem pengelolaan barang dan aset daerah, yang di dalamnya termasuk infrastruktur TIK, sehingga inventarisasi khusus untuk aset TIK tidak maksimal. Karena belum ada kegiatan inventarisasi khusus terhadap aset-aset TIK yang dilakukan, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.3.7.2. Dinas Pertanian

Tabel 4.66 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Inventarisasi Peralatan TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan manajemen aset (risk manajemen). 	2 (Kurang)	Kegiatan inventarisasi peralatan TIK belum



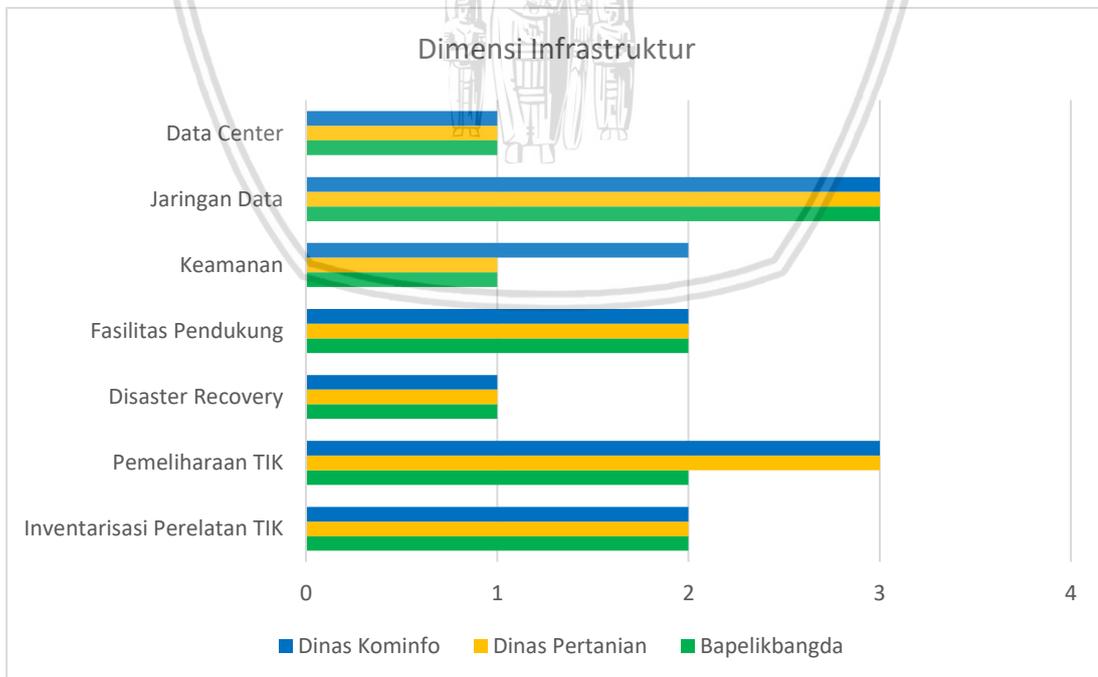
Tabel 4.67 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Peralatan TIK di Dinas Pertanian (lanjutan)

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang inventarisasi. • Pemahaman tentang <i>asset life cycle</i> • Kebijakan inventarisasi dan manajemen aset • SOP 		terdokumentasi dengan baik.
--	--	--	-----------------------------

Sama seperti Dinas Kominfo dan Bapelitbangda, kegiatan inventarisasi seluruh aset di Dinas Pertanian, baik aset TIK maupun non TIK dilakukan melalui sistem pengelolaan barang dan aset daerah. Sehingga inventarisasi khusus untuk aset aset TIK tidak bisa dilakukan dengan maksimal.

4.3.7 Hasil Penilaian Dimensi Infrastruktur

Hasil penilaian keseluruhan sub dimensi dari dimensi infrastruktur ditampilkan dalam bentuk grafik batang dan tabel penilaian dibawah ini. Sumbu x menunjukkan rentang nilai setiap sub dimensi, mulai dari 1 (sangat kurang) – 4 (baik sekali) dan sumbu y yang berisi seluruh sub dimensi dari dimensi infrastruktur.



Gambar 4.3 Grafik Penilaian Dimensi Infrastruktur



Tabel 4.68 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Infrastruktur

No.	Sub Dimensi	Penilaian		
		Dinas Kominfo	Bapelitbangda	Dinas Pertanian
1.	<i>Data Center</i>	1	1	1
2.	Jaringan Data	3	3	3
3.	Kemanan	2	1	1
4.	Fasilitas Pendukung	2	2	2
5.	<i>Disaster Recovery</i>	1	1	1
6.	Pemeliharaan TIK	3	2	3
7.	Inventarisasi Peralatan TIK	2	2	2
Rata Rata		2,0 (Kurang)	1,7 (Kurang)	1,9 (Kurang)

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI), didapatkan nilai rata rata untuk dimensi infrastruktur pada Dinas Kominfo adalah 2 yang berarti baik untuk Bapelitbangda adalah 1,7 yang berarti kurang dan Dinas Pertanian adalah 1,9 yang berarti kurang.

4.4 Penilaian Dimensi Aplikasi

Penilaian dimensi aplikasi berdasarkan pemanfaatan perangkat lunak seperti aplikasi dan website, baik yang dibuat oleh Dinas Kominfo sendiri maupun yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat. Penjabaran hasil dan analisis dimensi aplikasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi sub dimensi dari dimensi aplikasi, indikator yang menjadi fokus penilaian, dan nilai kondisi antara 1 hingga 4 dengan keterangan dari nilai kondisi tersebut, berdasarkan pedoman penilaian PeGI (Lampiran A).

4.4.1 Sub Dimensi Situs Wajib *Home Page*

Penilaian pada sub dimensi situs wajib home page berdasarkan keberadaan situs web yang sudah bersifat dinamis, selalu diperbaharui, adanya layanan yang bersifat interaktif, mendukung layanan interaktifitas dengan masyarakat dan keberadaan *back office* yang terintegrasi.

4.4.1.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.69 Penilaian Sub Dimensi Situs Web *Home Page* di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Situs web <i>home page</i>	Penyediaan informasi, interaksi dengan publik	1 (Sangat Kurang)	Mempunyai situs web resmi dengan informasi yang masih statis dan informasi yang <i>up to date</i>

Situs web Dinas Kominfo bersama dengan SOPD lain di Kota Batu disatukan dalam *website* resmi pemerintahan Kota Batu yang dapat diakses di laman www.batukota.go.id. *Website* ini dikelola oleh Dinas Kominfo yang informasinya selalu diperbaharui setiap hari. *Website* diintegrasikan oleh admin yang dipilih oleh Dinas Kominfo. Namun dari observasi yang dilakukan, laman Dinas Kominfo sendiri hingga saat ini belum bisa diakses. Nilai 1 (sangat kurang) diberikan untuk sub dimensi situs *web home page* karena dari observasi yang dilakukan, *website* www.batukota.go.id masih statis, walaupun informasi telah diperbaharui setiap hari. *Website* Kota Batu juga belum memiliki layanan yang interaktif yang mendukung aktifitas secara onlinde dengan masyarakat seperti penyampaian keluhan, kritik dan saran serta belum terhubung dengan *back office*.

4.4.1.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.70 Penilaian Sub Dimensi Situs Web *Home Page* di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Situs web <i>home page</i>	Penyediaan informasi, interaksi dengan publik	1 (Sangat Kurang)	Mempunyai situs web resmi dengan informasi yang masih statis dan informasi yang <i>up to date</i>

Situs web Bapelitbangda Kota Batu menjadi satu dengan SOPD lain di Kota Batu dalam *website* resmi pemerintahan Kota Batu yang dapat dilihat pada www.batukota.go.id. Namun, dari observasi yang dilakukan, laman Bapelitbangda sendiri belum ada didalam *website* Pemerintahan Kota Batu. Dan belum ada dukungan layanan interaktifitas dengan masyarakat seperti penyampaian kritik, keluhan dan saran. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.4.1.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.71 enilaian Sub Dimensi Situs Web *Home Page* di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Situs web <i>home page</i>	Penyediaan informasi, interaksi dengan publik	1 (Sangat Kurang)	Mempunyai situs web resmi dengan informasi yang masih statis dan informasi yang <i>up to date</i>

Sama seperti Dinas Kominfo dan Bapelitbangda, situs web Dinas Pertanian Kota Batu disatukan ke dalam website resmi Pemerintahan Kota Batu, yaitu www.batukota.go.id, namun, dari observasi yang dilakukan, laman Dinas termasuk Dinas Pertanian masih belum bisa diakses. Secara keseluruhan, *website* www.batukota.go.id masih bersifat statis, walaupun informasi telah diperbaharui setiap hari. Website Kota Batu juga belum memiliki layanan yang interaktif dan belum terhubung dengan *back office*. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.4.2 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan Publik)

Penilaian Sub Dimensi aplikasi fungsionalitas utama pelayanan publik berdasarkan keberadaan dan pemanfaatan aplikasi yang termasuk pada aplikasi fungsional utama 1.

4.4.2.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.72 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan Publik)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan publik.	3 (baik)	Memiliki setidaknya 4 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 1

Dinas Kominfo memiliki aplikasi among warga, among tani dan among kota, sebagai aplikasi pelayanan publik. Aplikasi among tani ditujukan kepada petani, bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Batu, among warga bertujuan untuk menghubungkan warga dengan pemerintah dan instansi terkait dan among kota sebagai portal informasi informasi terbaru di Kota Batu, selain itu terdapat PPID sebagai portal informasi publik Kota Batu. Dinas Kominfo setidaknya telah

memiliki 4 aplikasi yang termasuk ke dalam aplikasi pelayanan publik, sehingga penilaian untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.2.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.73 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan Publik)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan publik.	2 (kurang)	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 1

Kota Batu memiliki aplikasi Simduk Capil, SIM Perijinan dan SIM di Kecamatan, sebagai aplikasi pelayanan publik. Bapelitbangda kota Batu setidaknya telah memiliki 3 aplikasi yang termasuk ke dalam aplikasi pelayanan publik, sehingga penilaian terhadap Sub Dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.4.2.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.74 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 1 di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan Publik)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan publik.	2 (kurang)	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 1

Dinas Pertanian Kota Batu memanfaatkan aplikasi among tani dan among warga sebagai aplikasi pelayanan publik. Karena Dinas Pertanian kota Batu setidaknya telah memiliki 2 aplikasi yang termasuk ke dalam aplikasi pelayanan publik, penilaian terhadap Sub Dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.4.3 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum)

Penilaian Sub Dimensi aplikasi fungsionalitas utama administrasi dan manajemen umum berdasarkan keberadaan dan pemanfaatan aplikasi yang termasuk pada aplikasi fungsional utama 2.

4.4.3.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.75 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen umum	3 (Baik)	Memiliki setidaknya 3 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 2

Dinas Kominfo menggunakan beberapa aplikasi dalam mendukung kegiatan administrasi dan manajemen umum, diantaranya e-surat dan SAKIP untuk pelaporan.

4.4.3.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.76 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen umum	2 (Kurang)	Memiliki setidaknya 1 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 2

Untuk aplikasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen umum, berdasarkan wawancara, Bapelitbangda menggunakan aplikasi Simda Keuangan. Karena hanya terdapat 1 aplikasi yang digunakan dalam kategori aplikasi fungsional utama 2, nilai yang diberikan untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.4.3.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.77 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 2 di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen umum	2 (Kurang)	Memiliki setidaknya 1 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 2

Untuk aplikasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen umum, Dinas Pertanian menggunakan e-surat dan aplikasi Simda Keuangan. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.4.4 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi)

Penilaian Sub Dimensi aplikasi fungsionalitas utama legislasi berdasarkan keberadaan dan pemanfaatan aplikasi yang termasuk pada aplikasi fungsional utama 3.

4.4.4.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.78 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi legislasi	2 (Kurang)	Memiliki setidaknya 1 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 3

Pemerintah Kota Batu memiliki aplikasi berkaitan dengan fungsi legislasi di jdih.batukota.go.id. Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Batu memiliki katalog hukum berupa peraturan walikota dan peraturan daerah kota batu mulai dari tahun 2003-2015 yang dapat diakses publik.

4.4.4.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.79 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi legislasi	2 (Kurang)	Memiliki setidaknya 1 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 3

Pemerintah Kota Batu memiliki aplikasi berkaitan dengan fungsi legislasi di jdih.batukota.go.id. Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Batu memiliki katalog hukum berupa peraturan walikota dan peraturan daerah kota batu mulai dari tahun 2003-2015 yang dapat diakses publik.

4.4.4.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.80 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 3 di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi legislasi	2 (Kurang)	Memiliki setidaknya 1 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 3

Pemerintah Kota Batu memiliki aplikasi berkaitan dengan fungsi legislasi di jdih.batukota.go.id. Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Batu memiliki katalog hukum berupa peraturan walikota dan peraturan daerah kota batu mulai dari tahun 2003-2015 yang dapat diakses publik.

4.4.5 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 (Manajemen Pembangunan)

Penilaian Sub Dimensi aplikasi fungsionalitas utama manajemen pembangunan berdasarkan keberadaan dan pemanfaatan aplikasi yang termasuk pada aplikasi fungsional utama 4.

4.4.5.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.81 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 4 (Manajemen Pembangunan)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen pembangunan.	3 (Baik)	Memiliki setidaknya 3 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 4

Pemerintah Kota Batu memiliki aplikasi e-musrenbang, eproc (aplikasi lelang pengadaan online Pemerintah Kota Batu), e-monev. Terdapat lebih dari 3 aplikasi yang digunakan yang termasuk kedalam kategori aplikasi manajemen pembangunan, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.5.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.82 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan

Aplikasi Fungsional Utama 4 (Manajemen Pembangunan)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen pembangunan.	2 (Kurang)	Memiliki setidaknya 1 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 4
---	---	------------	---

Pemerintah Kota Batu memiliki aplikasi monev-pembangunan (e-monev) yang termasuk ke dalam aplikasi administrasi manajemen pembangunan. Karena hanya 1 aplikasi yang dimiliki, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.4.5.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.83 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 4 di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 4 (Manajemen Pembangunan)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen pembangunan.	2 (Kurang)	Memiliki setidaknya 1 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 4

Dinas Pertanian menggunakan aplikasi e-budgeting dan e-proposal untuk mendukung fungsi manajemen pembangunan.

4.4.6 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 (Manajemen Keuangan)

Penilaian Sub Dimensi aplikasi fungsionalitas utama manajemen keuangan berdasarkan keberadaan dan pemanfaatan aplikasi yang termasuk pada aplikasi fungsional utama 5.

4.4.6.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.84 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 5 (Manajemen Keuangan)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen keuangan.	3 (Baik)	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 4

Dinas Kominfo menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMP2KD, SIMP2EL, E-Budgeting, SIKOMAR untuk urusan manajemen keuangan. Terdapat lebih dari 2 aplikasi yang digunakan yang termasuk kedalam kategori aplikasi manajemen keuangan, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.6.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.85 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 5 (Manajemen Keuangan)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen keuangan.	3 (Baik)	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 4

Terdapat 2 aplikasi dalam kategori aplikasi fungsional utama 5 yang digunakan di lingkungan Bapelitbangda Kota Batu, yaitu Simda Keuangan dan Sim Gaji. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik)

4.4.6.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.86 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 5 di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 5 (Manajemen Keuangan)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen keuangan.	3 (Baik)	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 4

Untuk fungsi manajemen keuangan, Dinas Pertanian menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan SIM Gaji.

4.4.7 Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 (Manajemen Kepegawaian)

Penilaian Sub Dimensi aplikasi fungsionalitas utama manajemen kepegawaian berdasarkan keberadaan dan pemanfaatan aplikasi yang termasuk pada aplikasi fungsional utama 6.

4.4.7.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.87 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 6	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem	3	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang

Tabel 4.88 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 di Dinas Kominfo (lanjutan)

(Manajemen Kepegawaian)	fungsi manajemen kepegawaian.		termasuk dalam aplikasi utama 6
-------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------

Dinas Kominfo menggunakan aplikasi SIM GAJI, SAPK (sistem informasi data pegawai) dan sistem Absensi Online. Terdapat lebih dari 2 aplikasi yang digunakan yang termasuk kedalam kategori aplikasi manajemen kepegawaian, sehingga nilai untuk dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.7.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.89 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 6 (Manajemen Kepegawaian)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen kepegawaian.	3	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 6

Berdasarkan wawancara, Bapelitbangda menggunakan beberapa aplikasi yang dalam mendukung manajemen kepegawaian yaitu sistem absensi elektronik dan SIM Pegawai. Terdapat 2 aplikasi yang digunakan yang termasuk kedalam kategori aplikasi manajemen kepegawaian, sehingga nilai untuk dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.7.3. Dinas Pertanian

Tabel.4 90 Penilaian Sub Dimensi Aplikasi Fungsional Utama 6 di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Aplikasi Fungsional Utama 6 (Manajemen Kepegawaian)	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen kepegawaian.	3 (Baik)	Memiliki setidaknya 2 aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 6

Untuk mendukung fungsi manajemen kepegawaian, Dinas Pertanian menggunakan aplikasi SIM Pegawai dan absensi elektronik, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.8 Sub Dimensi Dokumentasi

Penilaian Sub Dimensi dokumentasi berdasarkan ada tidaknya dokumentasi yang baik yang dapat dijadikan rujukan untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut.

4.4.8.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.91 Penilaian Sub Dimensi Dokumentasi di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Dokumentasi	Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (<i>source code</i> , buku panduan, dokumen arsitektur, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak dan struktur data)	2 (Kurang)	Ada sokumentasi atau petunjuk aplikasi TIK namun hanya sebagian kecil saja.

Berdasarkan wawancara, terdapat dokumentasi untuk setiap aplikasi, namun tidak seluruh aplikasi memiliki sistem dokumentasi yang lengkap. Sebanyak 70% aplikasi yang digunakan diseluruh SOPD Kota Batu merupakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

4.4.8.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.92 Penilaian Sub Dimensi Dokumentasi di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Dokumentasi	Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (<i>source code</i> , buku panduan, dokumen arsitektur, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak dan struktur data)	2 (Kurang)	Ada sokumentasi atau petunjuk aplikasi TIK namun hanya sebagian kecil saja.

Terdapat dokumentasi aplikasi seperti *source code*, panduan dan sebagainya, namun dokumentasi masih tidak rapi dan tidak seluruh aplikasi memiliki dokumentasi yang lengkap.

4.4.8.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.93 Penilaian Sub Dimensi Dokumentasi di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Dokumentasi	Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (<i>source code</i> , buku panduan, dokumen arsitektur, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak dan struktur data)	2 (Kurang)	Ada sokumentasi atau petunjuk aplikasi TIK namun hanya sebagian kecil saja.

Terdapat dokumentasi aplikasi seperti *source code*, panduan dan sebagainya, namun dokumentasi masih tidak rapi dan tidak seluruh aplikasi memiliki dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi aplikasi ada di Dinas Kominfo.

4.4.9 Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK

Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK berdasarkan ada atau tidaknya kegiatan inventarisasi aplikasi, yang dilakukan secara periodik.

4.4.9.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.94 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Inventarisasi Aplikasi TIK	Adanya dokumen mengenai inventarisasi aplikasi	2 (Kurang)	Ada kegiatan inventarisasi aplikasi tetapi tidak rutin.

Berdasarkan wawancara, Dinas kominfo telah melakukan kegiatan inventarisasi atau pendataan aplikasi TIK. Namun dari dokumentasi inventarisasi, belum dapat diketahui status aplikasi apakah status aplikasi masih aktif atau tidak. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.4.9.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.95 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan

Inventarisasi Aplikasi TIK	Adanya dokumen mengenai inventarisasi aplikasi	1 (Sangat Kurang)	Adanya dokumentasi inventaris dari aplikasi yang dipunyai tetapi tidak melakukan kegiatan inventarisasi.
----------------------------	--	----------------------	--

Belum ada kegiatan inventarisasi di Bapelitbangda Kota Batu. Kegiatan inventarisasi secara menyeluruh dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Batu. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.4.9.3. Dinas Kominfo

Tabel 4.96 Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Inventarisasi Aplikasi TIK	Adanya dokumen mengenai inventarisasi aplikasi	1 (Sangat Kurang)	Adanya dokumentasi inventaris dari aplikasi yang dipunyai tetapi tidak melakukan kegiatan inventarisasi.

Belum ada kegiatan inventarisasi di Dinas Pertanian Kota Batu. Kegiatan inventarisasi secara menyeluruh dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Batu. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.4.10 Sub Dimensi Interoperabilitas

Penilaian Sub Dimensi Inventarisasi Aplikasi TIK berdasarkan pada kemampuan aplikasi untuk saling bertukar data.

4.4.10.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.97 Penilaian Sub Dimensi Interoperabilitas di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Interoperabilitas	Adanya kemampuan bertukar data atau informasi diantara beberapa aplikasi	3 (Baik)	Mempunyai 3 aplikasi yang berbeda dari kelompok aplikasi fungsional utama



Tabel 4.98 Penilaian Sub Dimensi Interoperabilitas di Dinas Kominfo (lanjutan)

			yang berbeda bisa saling bertukar data.
--	--	--	---

Dari hasil wawancara, terdapat 4 aplikasi dari 2 kelompok aplikasi fungsional utama yang telah terintegrasi, yaitu E-Budgeting, SIMDA, SIKOMAR, dan SMEP, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.10.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.99 Penilaian Sub Dimensi Interoperabilitas di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Interoperabilitas	Adanya kemampuan bertukar data atau informasi diantara beberapa aplikasi	3 (Baik)	Mempunyai 2 aplikasi yang berbeda dari kelompok aplikasi fungsional utama yang berbeda bisa saling bertukar data.

Integrasi aplikasi dilakukan oleh Dinas Kominfo, aplikasi yang telah terintegrasi di Pemerintahan Kota Batu saat ini adalah E-Budgeting, SIMDA, SIKOMAR, dan SMEP, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.10.2. Dinas Pertanian

Tabel 4.100 Penilaian Sub Dimensi Interoperabilitas di Dinas Pertanian

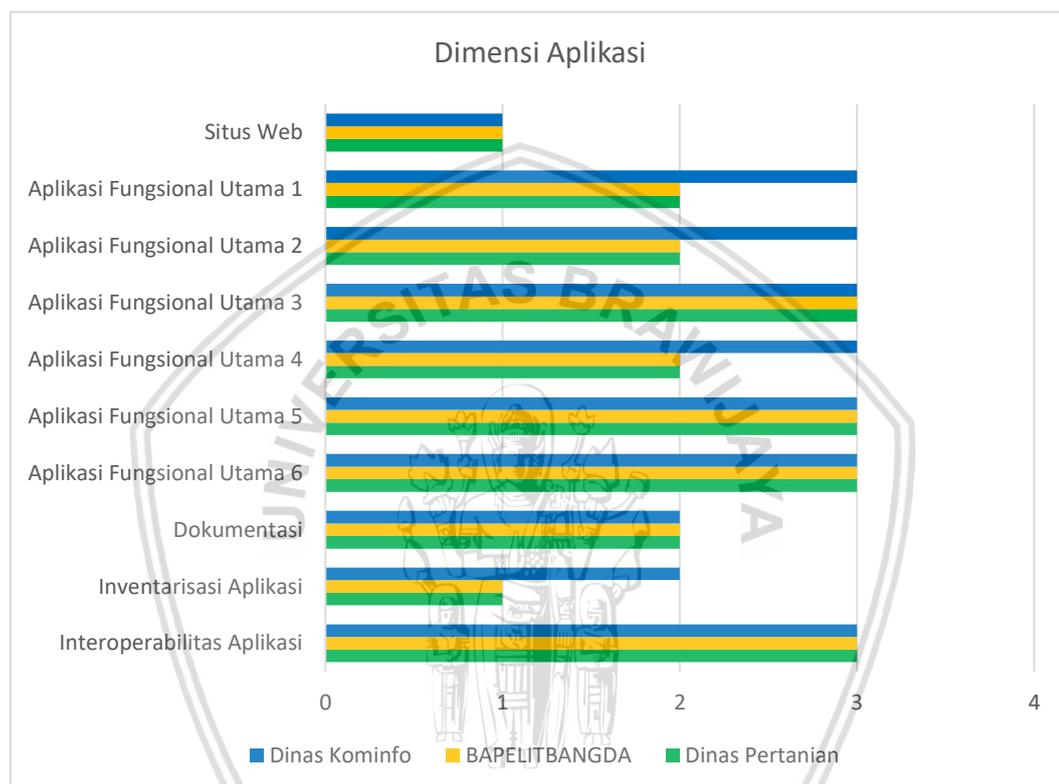
Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Interoperabilitas	Adanya kemampuan bertukar data atau informasi diantara beberapa aplikasi	3 (Baik)	Mempunyai 2 aplikasi yang berbeda dari kelompok aplikasi fungsional utama yang berbeda bisa saling bertukar data.



Integrasi aplikasi dilakukan oleh Dinas Kominfo, aplikasi yang telah terintegrasi di Pemerintahan Kota Batu saat ini adalah E-Budgeting, SIMDA, SIKOMAR, dan SMEP, sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.4.11 Hasil Penilaian Dimensi Aplikasi

Hasil penilaian keseluruhan sub dimensi dari dimensi aplikasi ditampilkan dalam bentuk grafik batang dan tabel penilaian dibawah ini. Sumbu x menunjukkan rentang nilai setiap sub dimensi, mulai dari 1 (sangat kurang) – 4 (baik sekali) dan sumbu y yang berisi seluruh sub dimensi dari dimensi aplikasi.



Gambar 4.4 Grafik Penilaian Dimensi Aplikasi

Tabel 4.101 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Aplikasi

No.	Sub Dimensi	Penilaian		
		Dinas Kominfo	Bapelitbangda	Dinas Pertanian
1.	Situs Web (<i>Homepage</i>)	1	1	1
2.	Aplikasi Fungsional Utama 1	3	2	2
3.	Aplikasi Fungsional Utama 2	3	2	2
4.	Aplikasi Fungsional Utama 3	2	2	2

Tabel 4.102 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Aplikasi (lanjutan)

5.	Aplikasi Fungsional Utama 4	3	2	2
6.	Aplikasi Fungsional Utama 5	3	3	3
7.	Aplikasi Fungsional Utama 6	3	3	3
8.	Dokumentasi	2	2	2
9.	Inventarisasi Aplikasi TIK	2	1	1
10.	Interoperabilitas Aplikasi	3	3	3
Rata Rata		2,5 (Kurang)	2,1 (Kurang)	2,1 (Kurang)

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja *Pemeringkatan E-Government* Indonesia (PeGI), didapatkan nilai rata rata untuk dimensi aplikasi pada Dinas Kominfo adalah 2,5 yang berarti kurang, penilaian untuk Bapelitbangda adalah 2,1 yang berarti kurang dan penilaian untuk Dinas Pertanian adalah 2,1 yang berarti kurang.

4.5 Penilaian Dimensi Perencanaan

Penilaian dimensi perencanaan berdasarkan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Penjabaran hasil dan analisis dimensi perencanaan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik yang berisi sub dimensi dari dimensi perencanaan, indikator yang menjadi fokus penilaian, dan nilai kondisi antara 1 hingga 4 dengan keterangan dari nilai kondisi tersebut, berdasarkan pedoman penilaian PeGI (Lampiran A).

4.5.1 Sub Dimensi Pengorganisasian/Fungsi

Hal yang dinilai dalam Sub Dimensi pengorganisasian/fungsi adalah apakah ada elemen organisasi yang melakukan perencanaan TIK, yang melibatkan semua stakeholders dan evaluasi secara periodik.

4.5.1.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.103 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pengorganisasian/Fungsi	Adanya fungsi yang melakukan perencanaan.	3 (Baik)	Ada elemen organisasi melakukan perencanaan TIK dan evaluasi dilakukan,

Tabel 4.104 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Dinas Kominfo (lanjutan)

			namun tidak secara periodik.
--	--	--	------------------------------

Secara keseluruhan di lingkungan pemerintahan Kota Batu, kegiatan perencanaan dilakukan oleh Bapelitbangda Kota Batu. Sedangkan di Dinas Kominfo, setiap bidang di Dinas Kominfo Kota Batu melakukan perencanaan TIK untuk urusan teknis pelaksanaan TIK, mulai dari bidang pengelolaan dan layanan informasi, bidang komunikasi, bidang infrastruktur dan aplikasi sampai bidang statistik dan persandian. Sehingga tidak ada satu unit yang khusus berfungsi melakukan perencanaan TIK, karena semua bagian bertanggung jawab dalam tugas perencanaan TIK masing masing.

4.5.1.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.105 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pengorganisasian/Fungsi	Adanya fungsi yang melakukan perencanaan.	3 (Baik)	Ada elemen yang melakukan perencanaan TIK dan evaluasi dilakukan namun tidak secara periodik.

Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi di Bapelitbangda Kota Batu merupakan bidang yang berfungsi dalam mengkaji dan meneliti perencanaan pemanfaatan TIK di Lingkungan Pemerintah dan Kota Batu sendiri. Dalam internal Bapelitbangda Kota Batu sendiri terdiri dari orang-orang dengan pengetahuan yang beragam, yang dapat mewakili kebutuhan SOPD di lingkungan Pemerintahan Kota Batu, sehingga proses perumusan perencanaan dapat dilakukan dengan lebih terarah.

4.5.1.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.106 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pengorganisasian/Fungsi	Adanya fungsi yang melakukan perencanaan.	2 (Kurang)	Ada elemen organisasi yang melakukan perencanaan

Tabel 4.107 Penilaian sub dimensi pengorganisasian/fungsi di Dinas Pertanian (lanjutan)

			TIK namun tidak melibatkan semua stakeholder
--	--	--	--

Dari wawancara yang dilakukan (Lampiran G), fungsi perencanaan di Dinas Pertanian Kota Batu secara keseluruhan dilakukan oleh Sub Bagian Program dan Pelaporan. Namun belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan dilakukan setiap tahun sebelum tahun anggaran.

4.5.2 Sub Dimensi Sistem Perencanaan TIK

Hal yang dinilai dalam Sub Dimensi sistem perencanaan TIK adalah apakah ada mekanisme perencanaan baku yang lengkap dengan kajian kebutuhan dan rencana pengembangan.

4.5.2.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.108 Penilaian sub dimensi sistem perencanaan TIK di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Sistem Perencanaan TIK	Adanya mekanisme proses perencanaan yang berlaku	3 (Baik)	Ada mekanisme perencanaan yang baku dan melibatkan SKPD SKPD, namun belum dilakukan evaluasi terhadap implementasi perencanaan tersebut.

Mekanisme perencanaan dimulai dari kajian kebutuhan TIK di Dinas Kominfo, hasil kajian kemudian diserahkan ke Bapelitbangda Kota Batu, yang disusun menjadi *draft* Peraturan Daerah TIK yang kemudian disahkan oleh DPRD. Untuk saat ini, perencanaan TIK masih berjalan, dengan target disahkannya Rencana Induk TIK Kota Batu pada tahun 2018.

4.5.2.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.109 Penilaian sub dimensi sistem perencanaan TIK di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Sistem Perencanaan TIK	Adanya mekanisme proses perencanaan yang berlaku	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada mekanisme perencanaan TIK yang baku.

Berdasarkan wawancara (Lampiran F), diketahui dalam tahun 2018 ini baru akan merencanakan secara makro dan mikro terkait pemanfaatan TIK, saat ini penyusunan rencana hanya berdasarkan kebutuhan (*ad hoc*) yang tidak melalui perencanaan.

4.5.2.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.110 Penilaian sub dimensi sistem perencanaan TIK di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Sistem Perencanaan TIK	Adanya mekanisme proses perencanaan yang berlaku	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada mekanisme perencanaan TIK yang baku.

Belum ada sistem perencanaan khusus TIK di Dinas Pertanian, perencanaan TIK mengikuti perencanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo, sedangkan di Dinas Kominfo saat ini rencana induk TIK sedang dalam proses penyusunan bersama Bapelitbangda yang ditargetkan akan disahkan tahun ini.

4.5.3 Sub Dimensi Dokumentasi *Master Plan*

Hal yang dinilai dalam sub dimensi dokumentasi *master plan* adalah apakah ada dokumen *master plan* yang lengkap dan mengandung seluruh dimensi PeGI, yang dijadikan acuan untuk implementasi dan diikuti sesuai dengan rencana.

4.5.3.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.111 Penilaian sub dimensi dokumentasi *master plan* di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Dokumentasi Master Plan	Adanya dokumentasi perencanaan TIK.	3 (Baik)	Ada dokumen <i>master plan</i> TIK namun hanya sebagian yang dilaksanakan.

Dinas Kominfo sudah memiliki dokumen perencanaan TIK dalam Master Plan Batu Smart City yang dikeluarkan pada tahun 2017, sebagai rencana pengembangan *smart city* di Kota Batu, termasuk *e-government* didalamnya. Namun, master plan ini belum dilaksanakan secara menyeluruh, karena baru berjalan kurang dari setahun. Karena sudah ada dokumen *master plan* TIK di Dinas Kominfo, maka penilaian untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.5.3.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.112 Penilaian sub dimensi dokumentasi *master plan* di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Dokumentasi Master Plan	Adanya dokumentasi perencanaan TIK.	1 (Kurang)	Tidak ada dokumen <i>master plan</i> TIK

Bapelitbangda saat ini belum memiliki *master plan* terkait penerapan TIK. Karena belum adanya dokumentasi *master plan* di Bapelitbangda, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.5.3.2. Dinas Pertanian

Tabel 4.113 Penilaian sub dimensi dokumentasi *master plan* di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Dokumentasi Master Plan	Adanya dokumentasi perencanaan TIK.	2 (Kurang)	Ada dokumen <i>master plan</i> TIK namun belum lengkap dan belum dilaksanakan.

Dinas Pertanian, saat ini belum memiliki *master plan* terkait penerapan TIK. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang). Karena belum adanya dokumentasi *master plan* di Dinas Pertanian, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.5.4 Sub Dimensi Implementasi *Master Plan*

Hal yang dinilai dalam Sub Dimensi implementasi *master plan* adalah apakah ada tindak lanjut dengan rencana kerja yang detail dan terdokumentasi serta dievaluasi dan direvisi secara periodik.

4.5.4.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.114 Penilaian sub dimensi implementasi *master plan* di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Implementasi <i>Master Plan</i>	Adanya rencana detil dari <i>master plan</i> TIK.	2 (Kurang)	Ada perencanaan rinci sebagai kelanjutan dari <i>master plan</i> , namun

Tabel 4.115 Penilaian sub dimensi implementasi *master plan* di Dinas Kominfo (lanjutan)

				belum terdokumentasi dengan baik.
--	--	--	--	-----------------------------------

Tindak lanjut dari Master Plan Batu Smart City, akan disahkan dan dilaksanakan dalam bentuk Rencana Induk TIK Kota Batu. Namun, Rencana Induk ini masih dalam tahap penyusunan dan belum diimplementasikan, berdasarkan kuisioner yang diisi oleh narasumber (Lampiran C), Rencana Induk TIK Kota Batu ditargetkan selesai dalam tahun 2018 ini. Karena belum adanya dokumentasi yang rinci terkait *master plan*, maka nilai untuk sub dimensi ini adalah 2 (kurang).

4.5.4.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.116 Penilaian sub dimensi implementasi *master plan* di Bapelitabangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Implementasi <i>Master Plan</i>	Adanya rencana detil dari <i>master plan</i> TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi perencanaan rinci sebagai kelanjutan dari <i>master plan</i> TIK.

Bapelitbangda belum memiliki *master plan* terkait penerapan TIK. Sehingga belum ada kelanjutan dari *master plan*. Nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang).

4.5.4.3. Dinas Pertanian

Tabel 4.117 Penilaian sub dimensi implementasi *master plan* di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Implementasi <i>Master Plan</i>	Adanya rencana detil dari <i>master plan</i> TIK.	1 (Sangat Kurang)	Tidak ada dokumentasi perencanaan yang rinci sebagai kelanjutan dari <i>master plan</i> TIK.

Dinas Pertanian belum memiliki *master plan* terkait penerapan TIK. Sehingga belum ada kelanjutan dari *master plan*. Nilai untuk sub dimensi ini adalah 1 (sangat kurang)



4.5.5 Sub Dimensi Pembiayaan

Hal yang dinilai dalam Sub Dimensi implementasi pembiayaan adalah apakah ada anggaran yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD, sesuai kebutuhan dan terserap. Hasil penilaian Sub Dimensi ini ditunjukkan pada Tabel 4.39.

4.5.5.1. Dinas Kominfo

Tabel 4.118 Penilaian sub dimensi pembiayaan di Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pembiayaan	Adanya unsur pembiayaan dalam dokumen perencanaan.	3 (Baik)	Pembiayaan tertuang dalam RPJM/RPJMD, RKP/RKPD, sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak terserap.

Unsur pembiayaan telah terdapat didalam RPJMD Kota Batu yang direncanakan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan wawancara (Lampiran D), pembiayaan dianggap sudah memadai, dimana Dinas Kominfo menetapkan skala prioritas terhadap penggunaan. Karena sudah ada unsur pembiayaan dalam RPJMD Kota Batu, namun keterserapan pembiayaan belum bisa dinilai untuk saat ini. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.5.4.2. BAPELITBANGDA

Tabel 4.119 Penilaian sub dimensi pembiayaan di Bapelitbangda

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pembiayaan	Adanya unsur pembiayaan dalam dokumen perencanaan.	3 (Baik)	Pembiayaan tertuang dalam RPJM/RPJMD, RKP/RKPD, sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak terserap.

Unsur pembiayaan telah terdapat didalam RPJMD Kota Batu yang direncanakan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022, sebanyak lebih kurang 300 juta, angka ini terkadang naik kadang turun tergantung kebutuhan tahun itu. Karena sudah ada unsur pembiayaan dalam RPJMD Kota Batu, namun keterserapan pembiayaan belum bisa dinilai untuk saat ini. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.5.4.3. Dinas Pertanian

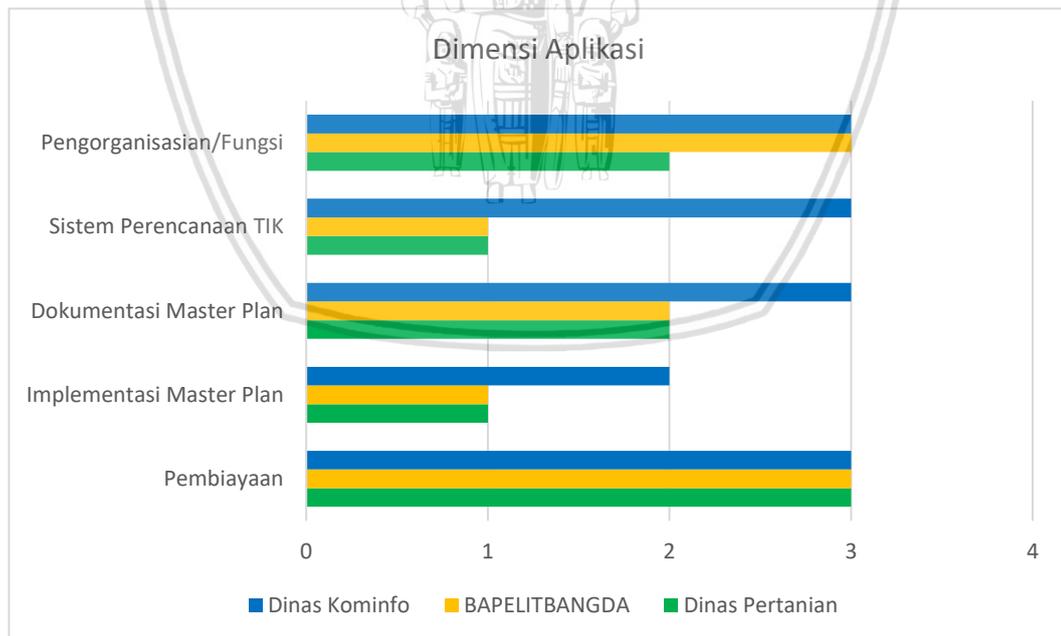
Tabel 4.120 Penilaian sub dimensi pembiayaan di Dinas Pertanian

Sub Dimensi	Indikator	Nilai Kondisi	
		Skor	Keterangan
Pembiayaan	Adanya unsur pembiayaan dalam dokumen perencanaan.	3 (Baik)	Pembiayaan tertuang dalam RPJM/RPJMD, RKP/RKPD, sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak terserap.

Unsur pembiayaan sudah terdapat di dalam RPJMD Kota Batu yang direncanakan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Karena sudah ada unsur pembiayaan dalam RPJMD Kota Batu, namun keterserapan pembiayaan belum bisa dinilai untuk saat ini. Sehingga nilai untuk sub dimensi ini adalah 3 (baik).

4.5.6 Hasil Penilaian Dimensi Perencanaan

Hasil penilaian keseluruhan sub dimensi dari dimensi perencanaan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel penilaian dibawah ini. Sumbu x menunjukkan rentang nilai setiap sub dimensi, mulai dari 1 (sangat kurang) – 4 (baik sekali) dan sumbu y yang berisi seluruh sub dimensi dari dimensi perencanaan.



Gambar 4.5 Grafik Penilaian Dimensi Perencanaan

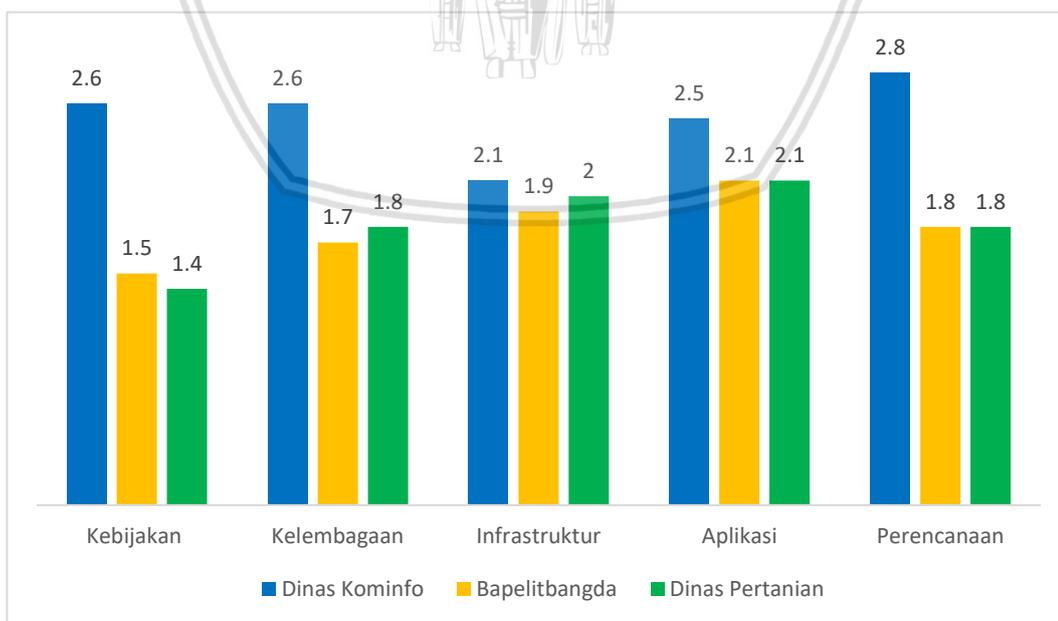
Tabel 4.121 Penilaian Keseluruhan Pada Dimensi Perencanaan

No.	Sub Dimensi	Penilaian		
		Dinas Kominfo	Bapelitbangda	Dinas Pertanian
1.	Pengorganisasian/Fungsi	3	3	2
2.	Sistem Perencanaan TIK	3	1	1
3.	Dokumentasi Master Plan	3	1	1
4.	Implementasi Master Plan	2	1	1
5.	Pembiayaan	3	3	3
Rata Rata		2,8 (Baik)	1,8 (Kurang)	1,6 (Kurang)

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI), didapatkan nilai rata rata untuk dimensi perencanaan pada Dinas Kominfo adalah 2.8 yang berarti baik, Bapelitbangda dengan nilai 1,8 yang berarti kurang dan Dinas Pertanian adalah 1,8 yang berarti kurang.

4.6 Hasil Penilaian Seluruh Dimensi

Hasil penilaian untuk seluruh dimensi PeGI untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian ditunjukkan pada Gambar 4.2



Gambar 4.6 Grafik Penilaian Keseluruhan Dimensi

Tabel 4.122 Penilaian seluruh dimensi di seluruh SOPD yang diteliti

No.	Sub Dimensi	Penilaian		
		Dinas Kominfo	Bapelitbangda	Dinas Pertanian
1.	Kebijakan	2,6	1,5	1,4
2.	Kelembagaan	2,6	1,7	1,8
3.	Infrastruktur	2,1	1,9	2
4.	Aplikasi	2,5	2,1	2,1
5.	Perencanaan	2,8	1,8	1,8
Rata Rata		2,5 (Kurang)	1,8 (Kurang)	1,8 (Kurang)

Dari hasil penilaian seluruh dimensi PeGI di 3 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kota Batu, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 2,5 (kurang), kemudian Dinas Pertanian dengan nilai 1,8 (kurang) dan Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,8 (kurang). Hasil penilaian penerapan *e-government* berdasarkan kerangka kerja PeGI untuk keseluruhan dimensi beserta sub dimensi dapat dilihat pada lampiran B.

BAB 5 PEMBAHASAN

Untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Batu, terutama di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian, penulis menyusun rekomendasi perbaikan layanan *e-government* berdasarkan kerangka kerja Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI). Rekomendasi disusun dalam bentuk tabel pada akhir pembahasan setiap dimensi yang terdiri atas sub dimensi masing masing dimensi yang dinilai dalam PeGI, kemudian rekomendasi perbaikan yang disusun untuk melakukan perbaikan pada setiap sub dimensi pada SOPD untuk mencapai nilai “sangat baik” dalam PeGI dan daftar SOPD yang dituju.

5.1. Dimensi Kebijakan

Kebijakan berdasarkan kerangka kerja PeGI merupakan landasan utama pengembangan dan penerapan *e-government* di sebuah instansi. Landasan utama tersebut disusun dalam bentuk dokumen dokumen yang memiliki kekuatan legal. Dokumen tersebut dapat berupa surat keputusan, pedoman, peraturan atau dokumen resmi lainnya, yang berisi program kerja, arah atau tujuan dan pengembangan *e-government* di lingkungan instansi. Terdapat 8 sub dimensi dalam dimensi kebijakan yang menjadi fokus penilaian yaitu manajemen atau proses kebijakan TIK, visi misi TIK, strategi penerapan kebijakan, pedoman, peraturan, keputusan instansi, skala prioritas TIK dan evaluasi atau manajemen risiko TIK.

Sub dimensi menilai keberadaan proses kebijakan TIK yang dibutuhkan agar penerapan TIK menjadi tepat dan terarah. Petersen (2004) membuat sebuah *framework* yang berisi 4 aspek yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan TIK, yaitu hukum, nilai, etika dan moral. Dengan mempertimbangkan 4 aspek tersebut dikombinasikan dengan proses yang inklusif dan komprehensif dapat memberikan peluang pengembangan kebijakan TIK untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sub dimensi selanjutnya pada dimensi kebijakan adalah visi dan misi TIK, menurut Harshman (2006) visi adalah keinginan atau tujuan dari suatu organisasi, sedangkan misi merupakan alasan keberadaan organisasi, tujuan organisasi dalam melayani masyarakat dan batasan batasan operasi. Visi, misi, tujuan dan strategi merupakan 4 komponen utama dalam rencana organisasi (Harshman, 2006). Keberadaan visi dan misi yang menggambarkan tujuan dan arah pengembangan adalah hal yang mutlak ada pada setiap instansi. Visi yang jelas akan membantu menggambarkan pencapaian apa yang hendak di raih di masa depan, sedangkan misi akan menjelaskan strategi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Visi dan misi yang baik akan menjadi identitas dan *guideline* bagi instansi.

Sub dimensi strategi penerapan kebijakan menilai keberadaan *roadmap* pengembangan *e-government* instansi dalam periode tertentu. Strategi penerapan kebijakan TIK dituangkan dalam bentuk rencana kerja, rencana induk,

program atau bentuk dokumen lainnya. Sub dimensi pedoman menilai keberadaan acuan pemanfaatan TIK secara umum pada bidang atau unit tertentu di instansi terkait, pedoman ini kemudian disusun dan didokumentasikan dalam bentuk formal. Sub dimensi peraturan TIK menilai aturan-aturan yang secara khusus dikeluarkan secara formal oleh pimpinan instansi dalam urusan penerapan TIK, peraturan dapat menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK. Sub dimensi keputusan instansi merupakan keputusan formal yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi yang berisi arahan atau perintah tertentu yang berhubungan dengan penerapan TIK di lingkungan instansi terkait.

Sub dimensi selanjutnya adalah skala prioritas TIK. Dalam proses pengembangan sistem, menyusun skala prioritas perlu dilakukan untuk menyusun tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang paling mendesak hingga kebutuhan yang pengembangannya lebih fleksibel. Menurut Karl E. Wiegers (1999) bentuk skala prioritas secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama membagi menjadi 3 skala yaitu *high*, sangat mendesak dan sangat dibutuhkan, *medium*, merupakan sistem pendukung dan dibutuhkan namun tidak mendesak dan *low* merupakan peningkatan dari sistem yang telah ada yang kebutuhannya dapat ditunda. Kategori kedua juga membagi kebutuhan menjadi 3 skala yaitu *essential* baru bisa dilakukan jika syarat sudah terpenuhi, *conditional* bentuk pembaharuan dan *optional* kebutuhan yang lebih bersifat tambahan.

Sub dimensi evaluasi TIK atau manajemen risiko TIK merupakan kegiatan pencegahan dan atau pengendalian jika suatu saat terjadi gangguan atau bencana yang berpotensi menimbulkan kerugian TIK di instansi, seperti kehilangan data, pembajakan, dan lainnya. Menurut Indrajit (2013) entitas pengendalian yang harus dimiliki dan dilakukan oleh organisasi adalah:

- Kerangka Manajemen Risiko TI: Berisi panduan utama yang harus digunakan dalam menangani risiko.
- Model Pengembangan Konteks Risiko: Pendekatan yang digunakan dalam memahami dampak risiko terhadap aktivitas organisasi.
- Mekanisme Identifikasi Kejadian: Tata cara dalam mengidentifikasi risiko yang tidak diinginkan dan.
- Prosedur Pengkajian Risiko: Langkah-langkah dalam menganalisa profil dan karakteristik dari risiko untuk menemukan strategi pengelolaan.
- Pedoman Mengembangkan Model Tanggapan Risiko (Response): Standar penentuan strategi penanggulangan risiko yang dihadapi dalam model tanggapan aksi.
- Tata Kelola Pemeliharaan dan Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko: Strategi untuk memastikan tata cara pengelolaan risiko dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh organisasi.

Dari hasil penilaian menggunakan kerangka kerja PeGI, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,6 yang berarti "baik", sedangkan Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,5 yang berarti "sangat kurang" dan Dinas Pertanian

mendapatkan nilai 1,4 yang berarti “sangat kurang”. Dinas Kominfo sudah memiliki kebijakan penerapan *e-government* dalam mendukung proses bisnis Pemerintah Kota Batu, yang tertuang didalam Perwali No.78 Tahun 2018, yang didukung dengan adanya strategi penerapan, keputusan instansi, peraturan dan skala prioritas. Namun, belum ada Rencana Induk yang berisi strategi penerapan TIK secara menyeluruh. Pada Dinas Pertanian, belum ada penerapan kebijakan TIK yang baku dan diterapkan secara mandiri, kebijakan TIK saat ini hanya mengikuti arahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo atau institusi lain yang berhubungan secara vertikal dengan Dinas Pertanian, contohnya Kementerian Pertanian. Sedangkan di Bapelitbangda Kota Batu, penerapan kebijakan di Bapelitbangda Kota Batu condong bersifat vertikal, dimana permintaan pembuatan kebijakan dapat berubah sewaktu waktu, sehingga penerapan kebijakan belum bisa berjalan dengan konsisten.

Secara keseluruhan pada dimensi kebijakan, di 3 Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang diteliti, belum ada komponen pendukung kebijakan yang dapat membantu pengembangan *e-government* di lingkungan pemerintahan Kota Batu, seperti pedoman kebijakan, manajemen risiko/evaluasi TIK, skala prioritas yang rinci dan strategi penerapan kebijakan yang jelas. Produk kebijakan yang digunakan saat ini adalah Master Plan Batu Smart City yang terdapat di dalam Perwali no.78 tahun 2017 yang dijalankan oleh Dinas Kominfo bekerjasama dengan dinas dinas terkait.

Rekomendasi perbaikan untuk Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian pada setiap sub dimensi pada dimensi kebijakan disusun dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Kebijakan

Sub Dimensi	Rekomendasi Perbaikan	SOPD		
		1	2	3
Manajemen/Proses Kebijakan TIK	Menyusun manajemen kebijakan TIK yang baku	✓	✓	✓
	Melaksanakan kebijakan TIK dengan baik dan konsisten.	✓		
Visi dan Misi TIK	Memperbaharui visi dan misi agar penerapan TIK menjadi prioritas dalam SOPD.	✓	✓	✓
	Menjadikan visi dan misi instansi sebagai acuan dalam menentukan strategi TIK.			
Strategi Penerapan Kebijakan	Membuat strategi penerapan TIK khusus untuk internal SOPD, sehingga kebutuhan akan TIK di SOPD terkait dapat diakomodir dengan baik.		✓	✓
	Memaksimalkan pelaksanaan penerapan kebijakan TIK, terutama dalam urusan pelayanan masyarakat.	✓	✓	✓

Tabel 5.2 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Kebijakan (lanjutan)

	Menyusun strategi TIK secara menyeluruh untuk setiap SOPD dengan mengeluarkan Rencana Induk TIK.	✓		
Pedoman	Membuat pedoman pelaksanaan kebijakan TIK yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan konsisten.	✓		
	Mendokumentasikan pedoman pelaksanaan kebijakan TIK dengan jelas.	✓		
	Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan TIK kepada stakeholder yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di SOPD terkait.	✓	✓	✓
Peraturan	Membuat peraturan khusus penerapan TIK, dengan isi yang jelas dan dilaksanakan dengan baik dan konsisten.	✓	✓	✓
	Menyempurnakan peraturan penerapan TIK sehingga dapat berjalan dengan lebih baik dan konsisten.	✓		
Keputusan Instansi	Mengeluarkan keputusan instansi terkait penerapan TIK yang isinya jelas dan dilaksanakan dengan baik di lingkungan SOPD terkait agar penerapan TIK lebih terarah.	✓	✓	✓
Skala Prioritas TIK	Menyusun skala prioritas penerapan TIK sesuai dengan kebutuhan SOPD, dan mendokumentasikannya dengan baik.		✓	✓
	Menyempurnakan skala prioritas yang ada dengan menyusun dokumentasi yang baik.	✓		
Evaluasi/Manajemen Risiko TIK	Melaksanakan evaluasi penerapan TIK secara berkala dan terstruktur (dapat mengacu pada kuisisioner evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB) .	✓	✓	✓
	Menyusun manajemen risiko TIK yang dapat diterapkan diseluruh SOPD.	✓		
	Menyusun laporan evaluasi dan manajemen resiko sehingga dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi TIK di SOPD.	✓	✓	✓

Keterangan: (1) Dinas Kominfo, (2) Bapelitbangda, (3) Dinas Pertanian

5.2. Dimensi Kelembagaan

Kelembagaan berdasarkan kerangka kerja PeGI berkaitan dengan keberadaan organisasi yang berwenang dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK yang memiliki struktur organisasi yang lengkap yang dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan dan fungsi lainnya dengan baik. Tugas dan fungsi tersebut didokumentasikan dengan rumusan yang jelas lengkap dengan unit kerja beserta aparatur yang memadai mulai dari segi jumlah, jabatan, status, kompetensi dan kewenangan yang cukup. Terdapat lima

sub dimensi dalam dimensi ini, yaitu keberadaan struktur organisasi yang efektif, tupoksi, SOP, SDM dan pengembangan SDM.

Pada sub dimensi struktur organisasi yang efektif, keberadaan struktur organisasi akan menetapkan bagaimana sebuah tugas dibagi, siapa melapor kepada siapa dan mekanisme koordinasi yang formal serta bagaimana pola interaksi akan diikuti (Gammahendra, 2014). Sebuah organisasi yang efektif mempunyai tiga komponen yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi (Robbins, 1994 dalam Gammahendra, 2015).

- Kompleksitas: merujuk pada tingkat *differensiasi* didalam organisasi yaitu *differensiasi horizontal* merupakan pemisahan unit di tingkat horizontal berdasarkan spesialisasi yang ada, *differensiasi vertikal* merupakan kedalaman hirarki organisasi dan *differensiasi spasial* merupakan tingkat sejauh mana fasilitas dan pegawai tersebar secara geografis.
- Formalisasi: Merupakan teknik tentang bagaimana standar pegawai seharusnya di organisasi. Formalisasi dilakukan melalui proses seleksi, syarat jabatan, aturan, prosedur, kebijakan, pelatihan dan ritual.
- Sentralisasi: Merujuk pada kebebasan memilih keputusan. Sentralisasi biasanya ada pada level manajemen atas.

Untuk organisasi yang berfungsi dalam mengelola TIK dalam organisasi, menurut Agarwal (2002) terdapat 3 prinsip dalam mengelola fungsi TIK yaitu:

- Mendorong evolusi antara proses bisnis dan TIK: Peran strategis TIK dalam organisasi adalah untuk menerapkan strategi dan proses bisnis yang inovatif. Fokus dari prinsip ini adalah untuk menyamakan strategi TIK dengan proses bisnis dalam organisasi.
- Memelihara hubungan antar jaringan: Terdapat empat stakeholder vital dalam mendukung penerapan TIK dalam organisasi yaitu manajemen eksekutif, manajemen bisnis, manajemen TIK dan vendor eksternal.
- Mengelola delapan nilai proses: Terdapat 8 nilai dalam proses TIK yaitu manajemen infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, manajemen relasi, nilai inovasi, solusi, penyediaan layanan, perencanaan strategi dan manajemen keuangan.

Sub dimensi tugas dan fungsi berisi rumusan yang jelas mengenai tugas dan fungsi, batasan, serta lingkup kerja pengelola TIK di organisasi. Tugas dan fungsi ini disusun dan didokumentasikan dengan jelas dan lengkap yang disahkan oleh pimpinan organisasi atau instansi terkait. Sub dimensi selanjutnya adalah ketersediaan sistem dan prosedur kerja, organisasi perlu menyusun prosedur kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas tugas berkaitan dengan TIK. Prosedur kerja dapat didokumentasikan secara formal dan dilakukan evaluasi dan revisi secara berkala. Pada sub dimensi ketersediaan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan sumberdaya manusia dalam suatu organisasi harus didukung oleh kemampuan, latar belakang, kompetensi dan jumlah yang disesuaikan dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Perencanaan SDM juga perlu

mempertimbangkan kebutuhan untuk masa yang akan datang. Sub dimensi pengembangan SDM TIK, menilai proses pengembangan SDM berkaitan dengan *skill* TIK yang dibutuhkan dalam organisasi.

Berdasarkan penilaian menggunakan kerangka kerja PeGI, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,6 yang berarti “baik” untuk dimensi kelembagaan, sedangkan Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,7 yang berarti “kurang” dan Dinas Pertanian mendapatkan nilai 1,8 yang berarti “kurang”. Dinas Kominfo telah memiliki struktur organisasi IT yang memiliki tugas dan fungsi pokok yang jelas, sebagaimana diatur dalam Perwali No.86 Tahun 2016. Namun, belum ada prosedur kerja yang baku yang dapat dijalankan secara menyeluruh dan ketersediaan sumber daya manusia dengan latar belakang IT yang sangat kurang. Pada Bapelitbangda, saat ini belum ada unit khusus yang menangani urusan TIK di Bapelitbangda Kota Batu, juga belum ada pedoman tata kerja pelaksanaan TIK yang diterapkan. Dari segi sumber daya manusia (SDM), jumlah tenaga SDM dengan berlatar belakang TIK yang berjumlah 4 orang dianggap masih dapat mengakomodir urusan TIK, terutama di Sub Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, namun, jumlah ini tidak akan mencukupi untuk tahun tahun kedepan, dimana targetnya untuk tahun ini Kota Batu akan menetapkan Rencana Induk TIK sebagai bagian dari penerapan *e-government*. Pada Dinas Pertanian, berdasarkan struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Batu, belum ada unit atau bagian khusus yang bertugas mengelola urusan TIK, Dinas Pertanian Kota Batu saat ini hanya mengikuti arahan Dinas Kominfo untuk urusan pengelolaan TIK.

Rekomendasi perbaikan untuk Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian pada setiap sub dimensi pada dimensi kelembagaan disusun dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.3 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Kelembagaan

Sub Dimensi	Rekomendasi Perbaikan	SOPD		
		1	2	3
Keberadaan Struktur Organisasi yang Efektif	Mengembangkan struktur organisasi berkaitan dengan pengelolaan TIK yang memiliki wewenang tinggi didalam SOPD. Unit atau bagian baru direkomendasikan agar berada di bawah sekretaris utama agar unit tersebut lebih leluasa dalam mengarahkan dan menetapkan perencanaan dan pengelolaan TIK di SOPD terkait.		✓	✓
Tugas dan Fungsi	Menyusun tugas dan fungsi organisasi berkaitan dengan TIK secara lengkap		✓	✓
	Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik.	✓	✓	✓
Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang Lengkap dan Terdokumentasi	Menyusun prosedur kerja berkaitan dengan TIK dengan lengkap, terdokumentasi dan dilakukan evaluasi secara berkala.	✓	✓	✓

Tabel 5.4 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Kelembagaan (lanjutan)

	Melakukan sosialisasi prosedur kerja TIK kepada seluruh elemen di SOPD terkait.	✓	✓	✓
Ketersediaan SDM dengan Jumlah dan Tingkat Kompetensi yang Sesuai	Membuat perencanaan kebutuhan SDM (jumlah, latar belakang, tugas, kompetensi) sesuai dengan kebutuhan kegiatan SOPD saat ini maupun periode yang akan datang, sehingga kekurangan SDM dapat diminimalisir di awal.	✓	✓	✓
Pengembangan SDM	Menyusun rencana program pengembangan SDM TIK secara berkala sesuai kebutuhan.	✓	✓	✓

Keterangan: (1) Dinas Kominfo, (2) Bapelitbangda, (3) Dinas Pertanian

5.3. Dimensi Infrastruktur

Infrastruktur berdasarkan kerangka kerja PeGI berkaitan dengan sarana prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam organisasi. Dimensi infrastruktur terdiri atas tujuh sub dimensi yaitu *data center*, jaringan data, keamanan, fasilitas pendukung infrastruktur TIK, pusat pemulihan bencana, pemeliharaan TIK dan kegiatan inventarisasi peralatan TIK.

Untuk sub dimensi *data center* (pusat data), jaringan data, keamanan dan pusat pemulihan bencana, Pemerintah Kota Batu telah menyusun *blue print* yang terdapat didalam Master Plan Batu Smart City yang dikeluarkan dalam Peraturan Walikota no. 78 tahun 2017. *Data center* merupakan kumpulan *server* yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga membentuk satu *server tunggal*, *data center* berperan untuk mendukung pengelolaan secara terpusat, menyediakan bantuan, sistem *back up*, pengelolaan daya, keamanan dan sebagainya. *Data center* ditempatkan pada ruangan atau bangunan yang dirancang khusus. Dalam Rancangan Peraturan Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Teknis Pusat Data, berdasarkan rekomendasi TIA-942 (salah satu standar *data center* yang telah diakui internasional) *data center* harus memiliki beberapa area fungsi khusus, yaitu:

- Ruang masuk (*entrance room*): ruang antar muka sistem pengkabelan *data center* dan antar bangunan.
- Area distribusi utama (*main distribution area*): area pusat yang menempatkan *main cross-connect*, *router* inti dan *switches* untuk infrastruktur LAN (*Local Area Network*) dan SAN (*Storage Access Network*).
- Area Distribusi Horizontal (*Horizontal Distribution Area*): Lokasi distribusi pengkabelan ke area distribusi perangkat.
- Area Distribusi Perangkat (*Equipment Distribution Area*): Ruang untuk perangkat akhir, sistem computer dan perangkat telekomunikasi.
- Area Distribusi Zona (*Zone Distribution Area*): Terletak antara distribusi horizontal dan area distribusi perangkat.

Data center yang ideal harus memiliki pusat pemulihan bencana yang kemudian dinilai dalam sub dimensi pusat pemulihan bencana. Penempatan fasilitas pemulihan bencana berdasarkan Rancangan Peraturan Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Teknis Pusat Data harus mempertimbangkan:

- Jarak terhadap lokasi *data center* dengan risiko yang minimal.
- Biaya yang layak.
- Memenuhi *Service Level Agreement* (SLA) yang disyaratkan.

Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,1 untuk dimensi ini, sedangkan Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,9 dan Dinas Pertanian mendapatkan nilai 2. Masih banyak yang perlu dibenahi oleh setiap SOPD yang diteliti, diantaranya pembangunan *data center* dan pengintegrasian dengan baik bersama aplikasi aplikasi pendukung, perbaikan sistem keamanan, pembuatan manajemen *disaster recovery* dan manajemen pemeliharaan TIK yang saat ini dilakukan hanya jika terjadi gangguan (*ad hoc*). Untuk Dinas Pertanian saat ini mengikuti arahan Dinas Kominfo dalam urusan infrastruktur TIK begitu juga dengan Bapelitbangda. Dari 3 Organisasi Perangkat Daerah yang diteliti, Infrastruktur yang ada memiliki kondisi yang kurang lebih sama, seperti *data center* masih berupa pengumpulan server server yang saat ini masih belum saling terintegrasi, keamanan informasi yang masih perlu dibenahi karena belum ada mekanisme keamanan yang diterapkan, kegiatan *back up* data baru dilakukan di komputer lokal saja dan hanya dilakukan jika ada gangguan serta belum ada mekanisme *disaster recovery* yang diterapkan, sehingga resiko kehilangan data cukup besar.

Rekomendasi perbaikan untuk Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian pada setiap sub dimensi pada dimensi infrastruktur disusun dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.5 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Infrastruktur

Sub Dimensi	Rekomendasi Perbaikan	SOPD		
		1	2	3
<i>Data Center</i>	Membangun <i>data center</i> dengan memenuhi standar layanan data center, memperhatikan integrasi aplikasi dan <i>back up</i> layanan <i>data center</i> . Sebagaimana telah direncanakan dalam Master Plan Batu Smart City.	✓		
	Membentuk tim perencanaan pengembangan <i>data center</i> yang terdiri dari masing masing perwakilan SOPD, sehingga kebutuhan tiap SOPD dapat dipenuhi dengan baik oleh Dinas Kominfo.	✓	✓	✓
	Menyusun aturan kepemilikan server yang terdapat di ruang server Balaikota Among Tani.	✓		
Jaringan Data	Mengembangkan jaringan data dengan memperhatikan kemudahan akses oleh user dan mengadakan <i>back up</i> layanan jika terjadi gangguan.	✓		



Tabel 5.6 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Infrastruktur (lanjutan)

Keamanan	Menyusun rencana mekanisme keamanan informasi data, yang dapat digunakan di seluruh SOPD, yang terencana dengan baik dan dievaluasi secara periodik.	✓		
	Melakukan sosialisasi mekanisme keamanan informasi terhadap elemen di SOPD.	✓	✓	✓
Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK	Melakukan perencanaan pengadaan fasilitas pendukung infrastruktur TIK dengan memperhatikan kebutuhan dan keamanan informasi data yang dimiliki di setiap SOPD.	✓	✓	✓
Pusat Pemulihan Bencana (<i>disaster recovery center</i>)	Menyusun dokumen <i>disaster recovery plan</i> .	✓		
	Melakukan pengujian terhadap dokumen <i>disaster recovery plan</i> .	✓		
Pemeliharaan TIK	Mengadakan mekanisme dan jadwal pemeliharaan TIK yang terstruktur dan dilaksanakan secara rutin.	✓	✓	✓
Inventarisasi Peralatan TIK	Melakukan dokumentasi daftar inventarisasi peralatan TIK yang dilaksanakan secara rutin.	✓	✓	✓
	Melakukan pelatihan peningkatan pengetahuan mengenai manajemen aset TIK	✓	✓	✓

Keterangan: (1) Dinas Kominfo, (2) Bapelitbangda, (3) Dinas Pertanian

5.4. Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi berdasarkan kerangka kerja PeGI berkaitan dengan ketersediaan dan pemanfaatan perangkat lunak yang mendukung layanan *e-government* secara langsung atau tidak langsung. Dimensi aplikasi terdiri atas 10 sub dimensi yaitu situs web, aplikasi fungsional utama 1-6, dokumentasi, inventarisasi aplikasi TIK dan interoperabilitas aplikasi.

Situs web merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat melalui penyebaran informasi. Untuk mendorong pengembangan website di setiap pemerintah daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan. Didalam peraturan tersebut, Kemkominfo menyusun standar situs web pemerintah daerah, mulai dari konten, pengelolaan, keamanan, evaluasi hingga teknologi yang digunakan. Untuk konten yang terdapat didalam web pemerintah sekurang kurangnya meliputi profil badan pemerintah, narasi kebijakan dan program prioritas pemerintah, kebijakan dan produk hukum pemerintah, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, profil layanan publik, layanan aspirasi dan pengaduan, akun resmi media sosial serta kontak pengelola situs web.

Aplikasi fungsional utama merupakan aplikasi untuk mendukung kinerja pemerintah menjadi lebih cepat efektif dan efisien, aplikasi fungsional utama

terdiri dari 6 kategori aplikasi yaitu pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan dan manajemen kepegawaian. Sub dimensi dokumentasi merupakan keberadaan dokumen yang berisi informasi lengkap tentang perangkat lunak. Menurut Ian Sommerville (2011) sebuah dokumentasi perangkat lunak haruslah berfungsi sebagai:

- Media komunikasi perantara antar tim pengembang.
- Penyimpan sistem informasi untuk digunakan oleh teknisi untuk pemeliharaan.
- Penyedia informasi untuk pengelola dalam membuat perencanaan biaya dan jadwal proses pengembangan perangkat lunak.
- Menjelaskan kepada pengguna tentang bagaimana cara mengelola sistem.

Sub dimensi inventarisasi aplikasi TIK menilai kegiatan pendokumentasian seluruh aset aplikasi TIK yang dimiliki oleh instansi, agar diketahui status dan kondisi dari aplikasi terkait. Sub dimensi interoperabilitas aplikasi menilai kemampuan aplikasi yang digunakan untuk saling berintegrasi atau bertukar informasi. Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 7 tahun 2013, terdapat pedoman penerapan interoperabilitas yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah penyelenggara *e-government* untuk pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja PeGI, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,5 untuk dimensi aplikasi, sedangkan Bapelitbangda mendapatkan nilai 2,1 dan Dinas Pertanian mendapatkan nilai 2,1. Secara keseluruhan, pemanfaatan aplikasi untuk mendukung kinerja pemerintahan mulai dari pelayanan publik, administrasi manajemen umum, manajemen legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan dan manajemen kepegawaian sudah cukup baik, karena sebagian besar aplikasi (70%) yang digunakan merupakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat beberapa hal yang mendapat penilaian kurang, diantaranya situs web yang saat ini masih bersifat statis dan interaktivitas dengan publik yang masih sangat kurang, walaupun informasi didalamnya selalu diperbaharui.

Rekomendasi perbaikan untuk Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian pada setiap sub dimensi pada dimensi aplikasi disusun dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.7 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Aplikasi

Sub Dimensi	Rekomendasi Perbaikan	SOPD		
		1	2	3
Situs Wajib (Homepage)	Mengembangkan situs web yang dinamis, terintegrasi dengan <i>back office</i> dan mendukung layanan interaktif sebagai bentuk pelayanan terutama terhadap masyarakat Kota Batu.	✓		

Tabel 5.8 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Aplikasi (lanjutan)

	Membentuk tim pengelola website yang dapat menangani kebutuhan penyebaran informasi setiap SOPD. Tim pengelola bisa saja tersebar di setiap SOPD untuk menangani kebutuhan publikasi setiap SOPD.	✓	✓	✓
Aplikasi Fungsional Utama Utama 1-6	Menyusun SOP penggunaan untuk masing masing aplikasi yang terdokumentasi dan dilaksanakan dengan baik.	✓	✓	✓
Manual Petunjuk Aplikasi TIK (Dokumentasi)	Membuat dokumentasi yang lengkap terhadap aplikasi yang belum memiliki dokumentasi, sehingga ketika terjadi gangguan atau pengembangan lebih lanjut, proses perbaikan atau pembaharuan dapat dilakukan dengan lebih cepat.	✓	✓	✓
	Mengumpulkan dokumentasi aplikasi yang masih tersebar di SOPD tertentu, sehingga seluruh status aplikasi dapat diketahui dengan mudah.	✓		
Inventaris Aplikasi TIK	Melakukan kegiatan inventarisasi aplikasi TIK dengan rinci dan membuat dokumentasi inventarisasi dengan baik. Sehingga dapat diketahui apakah suatu aplikasi masih aktif atau sedang mengalami gangguan.	✓		
	Melakukan kegiatan inventarisasi secara berkala.	✓		
Interoperabilitas	Melakukan proses interoperabilitas aplikasi sesuai target dan kebutuhan Pemerintah Kota Batu	✓		
	Menyeragamkan platform aplikasi ketika akan mengembangkan sebuah aplikasi, sehingga proses interoperabilitas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.	✓	✓	✓

Keterangan: (1) Dinas Kominfo, (2) Bapelitbangda, (3) Dinas Pertanian

5.5. Dimensi Perencanaan

Dimensi perencanaan dalam kerangka kerja PeGI berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Berdasarkan Panduan Tata Kelola TIK Nasional, perencanaan sistem merupakan proses untuk menetapkan visi, arsitektur TIK berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan realisasi implementasi visi dan arsitektur TIK tersebut. Setiap institusi pemerintah sedikitnya harus memiliki perencanaan atas komponen berikut:

- Arsitektur Informasi: model informasi organisasi yang mendefinisikan kebutuhan informasi yang disusun dalam proses organisasi.

- Arsitektur Aplikasi: model aplikasi organisasi yang mendefinisikan lingkup aplikasi beserta syarat dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengakomodir seluruh level proses bisnis dalam organisasi.
- Arsitektur Infrastruktur Teknologi: perencanaan topologi, konfigurasi dan spesifikasi infrastruktur teknologi sesuai kebutuhan organisasi.
- Organisasi dan Manajemen: struktur organisasi dan deskripsi peran, kebijakan dan prosedur dalam menjalankan manajemen TIK.
- Pendekatan dan Roadmap Implementasi: pola pendekatan yang digunakan untuk memastikan implemmentasi secara keseluruhan dengan tahap tahap target dalam durasi waktu tertentu.

Terdapat 5 sub dimensi dari dimensi perencanaan yaitu pengorganisasian/fungsi, sistem perencanaan, dokumentasi master plan, implementasi master plan dan pembiayaan. Sub dimensi pengorganisasian/fungsi menilai keberadaan unit atau bagian di organisasi yang berfungsi mengkoordinasikan kegiatan perencanaan TIK yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait. Sub dimensi sistem perencanaan menilai mekanisme perencanaan baku yang diterapkan didalam organisasi. Sub dimensi dokumentasi *master plan* dan sub dimensi implemntasi *master plan* menilai apakah organisasi telah memiliki rencana pengembangan dan penerapan TIK yang baik dan telah terdokumentasi secara formal serta apakah ada tindak lanjut dari rencana tersebut dalam rencana kerja yang detail. Sub dimensi pembiayaan menilai penganggaran penerapan TIK apakah sudah terdokumentasi secara formal dalam format pembiayaan yang baku seperti RPJMD.

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kerangka kerja PeGI untuk dimensi perencanaan, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,8 untuk dimensi ini, sedangkan Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,8 dan Dinas Pertanian mendapatkan nilai 1,8. Secara keseluruhan Dinas Kominfo telah memiliki perencanaan TIK yang baik, yang dapat dilihat di dalam Perwali no.78 tahun 2016 tentang Master Plan Batu Smart City, namun dalam pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu dibenahi, seperti belum adanya rencana induk TIK yang harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batu dalam upaya pengembangan *e-government*. Rencana Induk TIK perlu disusun agar pengelolaan dan penerapan TIK dapat dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh SOPD Kota Batu. Rekomendasi perbaikan untuk Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian pada setiap sub dimensi pada dimensi perencanaan disusun dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.9 Rekomendasi Perbaikan Dimensi Perencanaan

Sub Dimensi	Rekomendasi Perbaikan	SOPD		
		1	2	3
Pengorganisasian/ Fungsi	Melakukan kegiatan perencanaan TIK dengan melibatkan seluruh <i>stake holder</i> , dengan evaluasi yang dilakukan secara periodik.	✓	✓	✓
Sistem Perencanaan	Menyusun mekanisme perencanaan yang mengacu kepada visi dan misi instansi.	✓	✓	✓
	Melakukan koordinasi dengan seluruh SOPD dalam menyusun kebutuhan dan pengembangan TIK di Pemerintah Kota Batu.	✓		
Dokumentasi <i>Master Plan</i>	Menyusun dokumentasi master plan yang lengkap yang mengandung unsur dimensi PeGI yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dan dilaksanakan dengan baik.	✓	✓	✓
Implementasi Master Plan	Menyusun rencana kerja sebagai tindak lanjut master plan dengan rencana kerja yang detil dan terdokumentasi dengan evaluasi yang dilakukan secara periodik.	✓		
Anggaran/Pembiayaan	Menyusun anggaran sesuai kebutuhan dan target pencapaian dengan mangacu pada master plan TIK dan dituangkan dalam RPJMD	✓	✓	✓

Keterangan: (1) Dinas Kominfo, (2) Bapelitbangda, (3) Dinas Pertanian

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penilaian penerapan *e-government* di 3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Batu menggunakan kerangka kerja Pemeringkatan *e-government* Indonesia di Dinas Kominfo, Bapelitbangda dan Dinas Pertanian Kota Batu, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian penerapan *e-government* untuk Dinas Kominfo menggunakan PeGI didapatkan nilai 2,5 yang berarti “kurang” untuk Bapelitbangda didapatkan nilai 1,8 yang berarti “kurang” dan untuk Dinas Pertanian didapatkan hasil 1,8 yang berarti “kurang”.
2. Penilaian untuk masing masing sub dimensi pada setiap SOPD yang diteliti adalah sebagai berikut:
 - a. Dimensi kebijakan, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,6 yang berarti “baik”, Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,5 yang berarti “sangat kurang” dan pada Dinas Pertanian mendapatkan nilai 1,4 yang berarti “sangat kurang”.
 - b. Dimensi kelembagaan, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,6 yang berarti “baik”, Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,7 yang berarti “kurang” dan pada Dinas Pertanian mendapatkan nilai 1,8 yang berarti “kurang”.
 - c. Dimensi infrastruktur, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,1 yang berarti “kurang”, Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,9 yang berarti “kurang” dan Dinas Pertanian mendapatkan nilai 2 yang berarti “kurang”.
 - d. Dimensi aplikasi, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,5 yang berarti “kurang”, Bapelitbangda mendapatkan nilai 2,1 yang berarti “kurang” dan Dinas Pertanian mendapatkan nilai 2,1 yang berarti “kurang”.
 - e. Dimensi perencanaan, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 2,8 yang berarti “baik”, Bapelitbangda mendapatkan nilai 1,8 yang berarti “kurang” dan Dinas Pertanian mendapatkan nilai 1,8 yang berarti “kurang”.
3. Untuk melakukan perbaikan atas penerapan *e-government* di SOPD yang diteliti, disusun rekomendasi perbaikan berdasarkan kerangka kerja PeGI. Perbaikan untuk setiap SOPD yang diteliti adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kominfo

Untuk dimensi kebijakan, melaksanakan kebijakan TIK dengan baik dan konsisten, menjadikan visi dan misi sebagai acuan dalam menentukan strategi TIK, memaksimalkan penerapan kebijakan TIK dalam urusan pelayanan masyarakat, membuat pedoman pelaksanaan kebijakan TIK, menyempurnakan skala prioritas dengan dokumentasi yang baik, menyusun kebijakan manajemen risiko TIK, melakukan evaluasi penerapan TIK secara berkala.

Untuk dimensi kelembagaan, melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik, menyusun prosedur kerja terkait TIK dengan lengkap, membuat perencanaan kebutuhan SDM dengan latar belakang TIK, menyusun rencana program pengembangan *skill* SDM TIK sesuai kebutuhan.

Untuk dimensi infrastruktur, membangun *data center* sesuai standar yang baik, menyusun rencana mekanisme keamanan informasi data, menyusun *disaster recovery plan*, mengadakan mekanisme pemeliharaan aset TIK secara rutin, melakukan dokumentasi daftar inventarisasi aset TIK.

Untuk dimensi aplikasi, mengembangkan situs web yang dinamis, mendukung interaktifitas dengan masyarakat dan terintegrasi dengan *back office*, menyusun SOP penggunaan setiap aplikasi, melakukan kegiatan inventarisasi aplikasi TIK secara lengkap dan menyeluruh.

Untuk dimensi perencanaan, melakukan kegiatan perencanaan TIK dengan melibatkan seluruh *stake holders*, melakukan koordinasi dengan seluruh SOPD dalam menyudun kebutuhan pengembangan TIK dan menyusun rencana induk TIK.

b. Bapelibangda dan Dinas Pertanian

Untuk dimensi kebijakan, menyusun kebijakan TIK yang formal dan dilaksanakan dengan baik, menjadikan visi misi instansi sebagai acuan dalam menentukan strategi TIK, membuat peraturan khusus penerapan TIK, mengeluarkan keputusan instansi terkait penerapan TIK, menyusun skala prioritas penerapan TIK sesuai kebutuhan, melaksanakan evaluasi penerapan TIK secara berkala, menyusun laporan evaluasi dan manajemen risiko TIK.

Untuk dimensi kelembagaan, mengembangkan struktur organisasi dengan tugas dan fungsi pengelolaan urusan TIK, menyusun prosedur kerja berkaitan dengan TIK secara lengkap, membuat perencanaan kebutuhan SDM TIK dan pengembangan *skill* SDM TIK sesuai kebutuhan.

Untuk dimensi infrastruktur, melakukan perencanaan pengembangan fasilitas pendukung infrastruktur TIK, mengadakan mekanisme pemeliharaan aset TIK secara rutin dan melakukan inventarisasi aset TIK.

Untuk dimensi aplikasi, membentuk tim pengelola website untuk menangani kebutuhan publikasi, menyusun SOP setiap aplikasi yang digunakan.

Untuk dimensi perencanaan, melakukan kegiatan perencanaan TIK yang melibatkan seluruh *stake holders*, menyusun mekanisme perencanaan dengan mengacu pada visi dan misi instansi, menyusun rencana induk TIK.

6.2. Saran

1. Penilaian bisa dilanjutkan untuk menilai penerapan *e-government* di Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya, sehingga hasil penilaian nantinya dapat memetakan sejauh mana penerapan *e-government* telah berjalan secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
2. Penelitian selanjutnya dapat membahas keterikatan atau keterhubungan antar dimensi dan sub dimensi yang ada di dalam PeGI, sehingga dapat diketahui apakah pencapaian suatu dimensi dalam suatu waktu dapat meningkatkan pencapaian dimensi yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhomod, S. M. & Shafi, Mohd Mudasir. 2012. *Best Practice in E-government: A review of Some Innovative Models Proposed in Different Countries*. International Journal of Electrical & Computer Science IJECS-IJENS, vol: 12, no 01, February 2012
- Anderson, J. E. 2003. *Public policymaking: An introduction*. Boston: Houghton.
- Ausi, Fahmi & Sensuse, D.I. 2014. Penyusunan Strategi *E-government* Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan *E-government* Indonesia (Pegi) Di Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional. Tesis. Fakultas Ilmu Komputer. Universitas Indonesia. Depok.
- Brewer, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Djogo, T., Sirait M, T., Suharjito, D. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor: World Agroforestri Center (ICRAF)
- Harshman, Carl L. 2006, *Mission – Vision – Values: Toward Common Definitions*. <http://www.harshman.com/>
- Hasibuan, Z.A & Santoso, H.B. 2005. Standarisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.
- Hernikawati, Dewi & Sensuse, Dana Indra. 2013. Uji Validitas Indikator-Indikator Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Dengan Analisis Faktor. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, vol 6, no 1, 2016.
- Husen, Abrar. 2010. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indrajit, Richardus Eko. 2013. Mengkaji dan Mengelola Risiko TIK. Seri 999 E-Artikel Sistem dan Teknologi Informasi.
- Kasper, Eva. 2015. A Definition for Infrastructure - Characteristics and Their Impact on Firms Active in Infrastructure, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität München. München.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2013. Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik. Jakarta.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2013. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Pedoman Teknis Pusat Data. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2017. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Portal Dan Situs Web Badan Pemerintahan. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Cetak biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government. Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 tentang Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Jakarta.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lanvin, Bruno. 2002. *The E-government Handbook for Developing Countries*. The World Bank.
- Petersen, Rodney J. 2004. A Framework for IT Policy Development <https://er.educause.edu/articles/2004/1/a-framework-for-it-policy-development>.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Instruksi Presiden. Jakarta.
- Razak, Armilawaty. 2013. "Strategi Pengembangan E-Government Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI): Studi Kasus Kementerian Pertanian Indonesia". Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Depok.
- Romayah, S., Suroso, A.I. & Ramadhan, A. 2014, Evaluasi Implementasi E-government di Instansi XYZ. Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), vol 12 No 4, 2014.
- Rubel, Thom. 2013. Smart Government: Creating More Effective Information and Services. IDC Gov. Insights, 2013.
- Simatupang, Pantjar. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1, No 1, Maret 2003, hlm 1-21.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Jakarta: Penerbit Andi.

- Tantra, Rudy. 2012. *Manajemen Proyek Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Walikota Batu, 2016, Peraturan Walikota Batu No. 74 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batu. Peraturan Walikota. Batu.
- Walikota Batu. 2016. Peraturan Walikota Batu No. 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Peraturan Walikota. Batu.
- Walikota Batu. 2016. Peraturan Walikota Batu No. 89 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kota Batu. Peraturan Walikota. Batu.
- Walikota Batu. 2017. Peraturan Walikota Batu No. 78 tahun 2017 Tentang Master Plan Batu Smart City. Peraturan Walikota. Batu.
- Wieggers, Karl E. 1999. First Things First: Prioritizing Requirements. <http://www.processimpact.com/articles/prioritizing.pdf>
- Yusuf, A.M. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zafiropoulos, Kostas., Karavasilis, Ionnanis & Vrana Vasiliki. 2012. Assessing the Adoption of *e-government* Services by Teachers in Greece. Artikel. Future Internet 2012, 4, hlm 528-544.